

**PENERIMAAN PEMBACA TENTANG PEMBERITAAN PEMAKZULAN
PRESIDEN JOKOWI PADA PORTAL BERITA *ONLINE* TEMPO.CO**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

ANATIA SIMAMORA
NPM. 20043010202

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERIMAAN PEMBACA TENTANG PEMBERITAAN PEMAKZULAN
PRESIDEN JOKOWI PADA PORTAL BERITA *ONLINE* TEMPO.CO**

Disusun oleh:

Anatia Simamora
NPM. 20043010202

Telah disetujui untuk ujian skripsi

DOSEN PEMBIMBING


Syifa Syarifah A., S.Sos., M.Commun
NIP. 198403242024212021

Mengetahui,

DEKAN FISIP


Dr. Catur Suratnoaji, M.Si
NIP. 196804182021211006

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERIMAAN PEMBACA TENTANG PEMBERITAAN
PEMAKZULAN PRESIDEN JOKOWI PADA PORTAL BERITA
ONLINE TEMPO.CO**

Oleh:

Anatia Simamora
NPM. 20043010202

Telah dipertahankan di hadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 18 November 2024

PEMBIMBING

Syifa Syarifah A., S.Sos., M.Commun
NIP. 198403242024212021

TIM PENGUJI,

1. Ketua

Dr. Irwan Dwi Arianto, M.I.Kom
NIP. 197602082021211003

2. Sekretaris

Syifa Syarifah A., S.Sos., M.Commun
NIP. 198403242024212021

3. Anggota

Ratih Pandu Mustikasari, S.I.Kom., M.A
NIP. 199205292022032010

Mengetahui,

DEKAN FISIP



Dr. Catur Suratnoaji, M.Si
NIP. 196804182021211006

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anatia Simamora
NPM : 20043010202
Fakultas / Program Studi : FISIP / Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Penerimaan Pembaca tentang Pemberitaan
Pemakzulan Presiden Jokowi pada Portal Berita
Online Tempo.co

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di UPN "Veteran" Jawa Timur maupun di institusi pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik.
3. Hasil karya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima konsekuensi apapun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPN "Veteran" Jawa Timur.

Surabaya, 11 Desember 2024



Anatia Simamora

ABSTRAK

PENERIMAAN PEMBACA TENTANG PEMBERITAAN PEMAKZULAN PRESIDEN JOKOWI PADA PORTAL BERITA *ONLINE* TEMPO.CO

Anatia Simamora
20043010202

Penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji mengenai penerimaan pembaca terhadap berita pemakzulan Presiden Jokowi pada portal berita Tempo.co. Di dalam pemberitaannya, Tempo menyampaikan pendapat dan pernyataan pihak yang pro dan kontra mengenai isu pemakzulan serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap isu tersebut. Media massa memainkan peran yang besar dalam membentuk opini publik, namun melalui analisis resepsi dapat diketahui bahwa proses pemaknaan khalayak dipengaruhi oleh beragam faktor kontekstual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan pembaca terhadap pemberitaan pemakzulan Presiden Jokowi pada portal berita *online* Tempo.co. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan dengan pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu pemakzulan Jokowi dalam pandangan pembaca adalah isu yang tampaknya tidak sesuai dengan konstitusi. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa isu pemakzulan Jokowi merupakan konsekuensi sebagai akibat kemunduran yang terjadi dalam pemerintahan Jokowi. Penerimaan pembaca menunjukkan, Tempo dalam pemberitaannya terkait polemik tersebut tampak setuju terhadap pemakzulan Jokowi. Meski begitu mayoritas pembaca masih merasa media ini cukup kredibel dan dapat dipercaya terlepas bagaimana media ini tampak memihak. Dalam analisis resepsi, Stuart Hall menganalisis posisi penerimaan pembaca menjadi tiga kategori, tetapi dalam penelitian ini, penerimaan terhadap berita pemakzulan Jokowi di Tempo hanya ditemukan dua posisi. Dengan mayoritas pembaca berada pada posisi dominan hegemoni.

Kata Kunci: *Resepsi, Khalayak, Pemakzulan Jokowi, Media Massa, Tempo*

ABSTRACT

***READERS' RECEPTION OF THE IMPEACHMENT NEWS OF
PRESIDENT JOKOWI ON THE ONLINE NEWS PORTAL TEMPO.CO***

Anatia Simamora
20043010202

This study examines readers' reception of news about the impeachment of President Jokowi on the Tempo.co news portal. In its reporting, Tempo presents the opinions and statements from both the pro and con sides regarding the impeachment issue, as well as how the public reacts to the issue. Mass media plays a significant role in shaping public opinion, but through reception analysis, it can be understood that the process of audience interpretation is influenced by various contextual factors. The purpose of this study is to understand how readers receive news about the impeachment of President Jokowi on the Tempo.co online news portal. This research uses a qualitative descriptive method, with data collected through in-depth interviews. The results of the study show that the impeachment issue of Jokowi, in the readers' view, is an issue that seems to be unconstitutional. On the other hand, there is a view that the impeachment issue of Jokowi is a consequence of the setbacks that occurred during Jokowi's administration. Readers' reception shows that Tempo, in its reporting on the controversy, seems to support the impeachment of Jokowi. However, the majority of readers still consider the media to be credible and trustworthy, regardless of how it may appear to be biased. In reception analysis, Stuart Hall categorizes reader reception into three positions, but in this study, only two positions were found regarding the news of Jokowi's impeachment on Tempo, with the majority of readers occupying the dominant hegemonic position.

Keywords: *Reception, Audience, Jokowi Impeachment, Mass Media, Tempo*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Penerimaan Pembaca tentang Pemberitaan Pemakzulan Presiden Jokowi pada Portal Berita *Online* Tempo.co**” dengan baik. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana jurusan Ilmu Komunikasi yang akan disandang oleh penulis.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Catur Suratnoaji, M.SI. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Dr. Syafrida Nurrachmi Febriyanti, M.Med.Kom Selaku Koorprogdi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Syifa Syarifah Alamiyah, S.Sos., M.Commun selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah baik, sabar membimbing dan mengarahkan penulis.
4. Orang tua penulis yang jauh di Sumatra. Bapak dan Mama yang selalu memanjatkan doa dan harapan untuk penulis serta tetap percaya terhadap kemampuan penulis, dikala penulis sendiri ragu terhadap diri sendiri. Terutama Mama yang selalu berusaha berhati-hati menanyakan keadaan penulis di perantauan, menghargai perasaan kecil penulis dan menguatkan penulis saat sedang lemah.

5. Abang Ahong, Kak Tesa dan Jagau—saudara penulis yang terkasih—yang juga selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
6. Rosalinda dan Betseba, teman seperjuangan penulis yang sama-sama merantau dan berjuang di Surabaya. Terimakasih sudah saling mendoakan dan menguatkan dalam perkuliahan selama ini.
7. Friska dan Wilda teman sejurusan yang selalu menemani dan mendukung penulis. Terimakasih sudah membantu penulis dalam mencari ide dan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis meminta kritik serta saran yang membangun, agar penulis dapat belajar serta berkembang lebih baik lagi. Apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf. Semoga, skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak khususnya pada bidang Ilmu Komunikasi.

Surabaya, 12 Desember 2024

Anatia Simamora

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Media Massa Sebagai Ruang Politik	16
2.2.2 Efek Media.....	18

2.2.3 Media Online Tempo.co	19
2.2.4 Pemakzulan (Impeachment)	21
2.2.5 Analisis Resepsi.....	23
2.3 Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Metode dan Jenis Penelitian.....	27
3.2 Defenisi Konseptual.....	27
3.2.1 Analisis Resepsi.....	27
3.2.2 Berita “Pemakzulan Presiden Jokowi”	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	29
3.5 Teknik Penentuan Informan	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Tenik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian	34
4.1.1 Gambaran Umum Berita Pemakzulan Presiden Jokowi pada Tempo.co.....	34
4.1.2 Identitas Informan.....	40
4.2 Hasil dan Pembahasan	44
4.2.1 Kesadaran dan Pengetahuan Pembaca Terhadap Pemakzulan Presiden.....	44
4.2.1.1 Kemunculan Isu Disebabkan Kemunduran dalam Pemerintahan Jokowi.....	45

4.2.1.2 Kemunculan Isu Disebabkan Rivalitas Politik dalam Pemilu 2024	51
4.2.2 Pandangan Pembaca Terhadap Isu Pemakzulan Presiden	56
4.2.2.1 Pemakzulan Presiden Merupakan Wacana Inkonstitusional, dan Keributan Politik yang Tidak Perlu	56
4.2.2.2 Pemakzulan Presiden Merupakan Wacana yang Perlu Dilakukan Akibat Kemunduran dalam Pemerintahan	61
4.2.2.3 Kemungkinan Wacana Pemakzulan Jokowi Dapat Terjadi	66
4.2.2.4 Penerimaan Pembaca Terhadap Isu Pemakzulan Jokowi	72
4.2.3 Pemaknaan Pembaca Tentang Media Tempo	81
4.2.3.1 Tempo Sebagai Media yang Kritis Terhadap Pemerintah	82
4.2.3.2 Tempo Sebagai Media yang Pro terhadap Pemakzulan Jokowi	84
4.2.3.3 Penerimaan Pembaca Tentang Pemberitaan Pemakzulan Jokowi pada Tempo	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Media Terpercaya di Indonesia 2023	7
Tabel 2.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 4.1 : Berita Tempo Mengenai Pemakzulan Presiden.....	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Tingkat Kepuasan Publik terhadap Presiden Jokowi.	2
Gambar 1.2 : Pemberitaan Beberapa Media Terkait Isu Pemakzulan Jokowi	3
Gambar 2.1 : Logo Tempo.co.....	19
Gambar 2.7 : Kerangka Berpikir.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Interview Guideline	96
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	98
Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan	133

BAB I

PENDAHULUAN

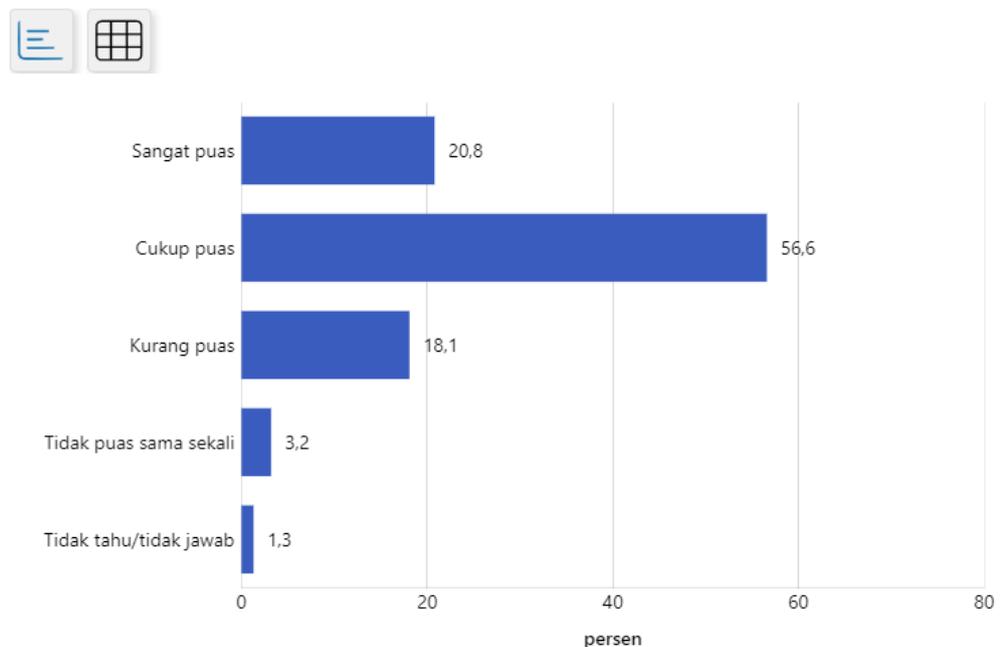
1.1 Latar Belakang

Penelitian ini mengkaji bagaimana penerimaan pembaca tentang pemberitaan mengenai “Pemakzulan Presiden Jokowi” pada portal berita Tempo.co. Isu pemakzulan terhadap presiden Jokowi ini muncul menjelang Pemilu 2024. Pemakzulan (Impeachment) sendiri berasal dari kata “makzul” yang berarti berhenti memegang jabatan atau turun tahta. Merujuk dari KBBI, memakzulkan adalah menurunkan dari tahta atau memberhentikan dari jabatan. Di Indonesia, *impeachment* diartikan sebagai langkah untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya oleh lembaga legislatif (DPR) karena adanya pelanggaran hukum yang spesifik (Satriya, 2022). Pemberhentian presiden pernah dilakukan 2 kali di Indonesia, yaitu terhadap Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Soekarno diberhentikan oleh MPRS dikarenakan adanya indikasi keterlibatan Soekarno dengan peristiwa G-30 S/PKI. Sedangkan, Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR oleh keterlibatan sang Presiden dalam kasus *Bruneigate* dan Yanatera Bulog.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang telah menjabat selama 2 Periode, sejak tahun 2014. Beliau mengawali karirnya dalam politik sebagai Wali Kota Solo (2005), lalu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta (2012-2014) sebelum akhirnya maju sebagai Presiden di tahun 2014. Presiden Jokowi terkenal sebagai Presiden

yang dekat dengan rakyat, sederhana, serta fokus pada pembangunan infrastruktur dan reformasi dalam birokrasi. Hal ini membuat Presiden Jokowi sangat disayangi oleh rakyat terutama dianggap sebagai Presiden yang paling memperhatikan rakyat kecil. Pengaruh Presiden Jokowi dalam dunia politik juga meningkat. Namun seiring dengan itu, tentunya muncul banyak tantangan politik selama kepemimpinan beliau. Isu mengenai Pemakzulan Jokowi inipun termasuk menjadi salah satunya.

Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Jokowi menurut Polling Institute (Desember 2023)



Gambar 1.1 : Tingkat Kepuasan Publik terhadap Presiden Jokowi.

Sumber: Databoks

Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul pertama kali ketika mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengirim surat terbuka kepada DPR RI pada Juni 2023 melalui akun Twitter-nya (Tempo.co, 2024). Surat tersebut memberikan saran untuk

menggunakan hak angket sebagai langkah awal dalam memulai proses pemakzulan atau *impeachment* terhadap Presiden Jokowi. Langkah ini diambil oleh Denny sebagai tanggapan terhadap pernyataan Jokowi yang menyiratkan keinginan untuk campur tangan dalam konteks Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Denny berpendapat bahwa campur tangan yang diinginkan oleh Kepala Negara menjelang Pilpres merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.



Gambar 1.2 : Pemberitaan Beberapa Media Terkait Isu Pemakzulan Jokowi

Isu pemakzulan Jokowi naik kembali di tahun 2024, setelah sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat sipil yang menyebut diri sebagai “Petisi 100, Penegak Daulat Rakyat” mengunjungi Menkopolhukam Mahfud Md. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa, 9 Januari 2024. Mereka meminta Mahfud untuk memakzulkan Jokowi sebelum Pemilu 2024. Beberapa dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden yang dilaporkan di antaranya terkait dengan adanya nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi (MK), intervensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Dewan Pengawas KPK melalui revisi Undang-Undang

KPK, penerbitan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang APBN yang seharusnya dibahas dan mendapat persetujuan DPR, dan menerbitkan Perpu Cipta Kerja dengan mengesampingkan perintah dari putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang inkonstitusional bersyarat (Detik News, 2024).

Berbagai pemberitaan tentang upaya dan wacana pemakzulan Presiden yang ada telah menjadi sumber polemik yang memicu beragam opini dari masyarakat. Polemik ini menyebabkan munculnya berbagai pendapat yang bertentangan. Sebagian masyarakat merasa bahwa upaya pemakzulan ini hanyalah strategi pengalihan perhatian yang dilakukan untuk mendukung kandidat paslon lain, terutama karena hal ini dilakukan menjelang Pemilu 2024. Seperti yang diungkapkan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, melalui akun X nya (CNN Indonesia, 2024). Dukungan mengenai wacana pemakzulan juga banyak terutama terlihat dari gerakan demo yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa sebagai respon terhadap hal tersebut. Seperti yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta pada 7 Februari 2024 lalu.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam faktor yang membarengi kemunculan wacana ini adalah mengenai kemunduran pemerintahan Jokowi berupa penurunan demokrasi yang terjadi dalam pemerintahan Jokowi. Penurunan demokrasi ini diindikasikan melalui kualitas Pemilu yang semakin menurun. V-Dem Institute (2024) melaporkan bahwa pemilu Indonesia, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, telah dipengaruhi oleh sejumlah masalah, seperti manipulasi suara, intimidasi terhadap pemilih, dan intervensi

pemerintah yang berlebihan dalam proses pemilihan (Febriandy & Wahid, 2024).

Media massa memainkan peran penting dalam menyediakan informasi terkini dan mendalam tentang isu pemakzulan serta implikasinya bagi pemerintahan dan masyarakat. Adanya isu pemakzulan presiden tentunya dapat menciptakan keadaan politik yang tidak stabil dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, media massa perlu terus memantau dan memberikan liputan yang akurat dan berimbang tentang perkembangan pemakzulan, termasuk alasan-alasan di baliknya, proses hukum yang terlibat, serta reaksi dan opini dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan media massa merupakan acuan bagi masyarakat dalam menilai suatu fenomena bahkan sosok atau individu tertentu. Melalui media massa, individu diberikan akses terhadap beragam informasi yang menjadi pijakan utama bagi mereka dalam membentuk pemahaman, apresiasi, dan justifikasi terhadap berbagai tindakan (Silvani et al., 2021).

Informasi yang disampaikan melalui media massa tidak hanya memengaruhi persepsi dan pandangan individu, tetapi juga memengaruhi langkah-langkah yang mereka ambil dalam kehidupan sehari-hari (Silvani et al., 2021). Politisi, pejabat pemerintah, dan tokoh militer secara luas dikenal di tengah masyarakat berkat dukungan dari media massa. Dengan bantuan media massa, para politisi bisa dipresentasikan dalam citra yang menguntungkan, yang membuat reputasi mereka meningkat dan mendapatkan dukungan serta simpati dari masyarakat. Namun, media massa juga memiliki potensi untuk

menghancurkan karier politik atau profesi seseorang melalui penulisan berita yang menciptakan citra negatif yang merugikan.

Meskipun media massa masih menjadi acuan bagi publik untuk menilai suatu fenomena, pembaca dalam hal ini juga memiliki kemampuan untuk secara bebas menciptakan makna dan bertindak sesuai interpretasi yang mereka buat terhadap teks media (Purnamasari, 2018). Fenomena tersebut menunjukkan bahwasanya pembaca sebagai khalayak terlibat tidak secara pasif melainkan aktif dalam menentukan makna dari sebuah pesan media. Pesan media sendiri selalu terbuka dan polisemi (memiliki banyak arti) sehingga dapat diinterpretasikan berbeda tergantung konteks dan budaya penerima (khalayak). Fenomena ini menggambarkan bagaimana pemaknaan pesan media tidaklah statis, melainkan tergantung pada refleksi individu terhadap pesan yang diterimanya. Hal inilah yang coba dijelaskan dan ditelaah melalui analisis resepsi.

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi dengan masyarakat, dengan berbagai fungsi yang dijalankannya. Fungsi-fungsi tersebut termasuk menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, mempengaruhi, dan sebagai kontrol sosial (Silvani et al., 2021). Dalam perannya sebagai kontrol sosial, media massa sebagai pers, dianggap sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi, selain legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Silvani et al., 2021). Dalam konteks ini, media massa berfungsi sebagai pengawas kekuasaan dan menjaga keseimbangan di antara kepentingan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Hal ini memastikan bahwa pers

senantiasa menjaga independensinya dan mempertahankan sikap yang netral terhadap semua kelompok dan organisasi yang ada, sehingga dapat memberikan informasi yang objektif dan kritis kepada masyarakat.

Tempo merupakan salah satu media berita yang terkenal di Indonesia, menduduki posisi yang penting sebagai media oposisi. Dikenal dengan jurnalisme kritis dan investigatifnya, Tempo sering mengambil peran sebagai pengawas pemerintah dan penjaga kebebasan pers. Sejarahnya yang panjang, termasuk dua kali mengalami pembredelan selama era Orde Baru, mencerminkan betapa seringnya mereka menghadapi tekanan politik akibat pemberitaannya yang tidak kompromi terhadap kebenaran (Tempo.co, n.d.).

Dengan berkembangnya teknologi digital, Tempo bertransformasi menjadi portal berita yang dikenal dengan nama Tempo Interaktif, sebelum kemudian menjadi Tempo.co pada akhir 2011. Dengan berbagai inovasi ini, Tempo telah menjadi salah satu merek media yang dipercaya di Indonesia. Bahkan, menurut survei Reuters Institute yang berjudul Digital Report 2023, Tempo menempati peringkat keenam dari lima belas media massa *online*.

Tabel 1.1 : Media Terpercaya di Indonesia 2023

Sumber: Databoks

No.	Nama Media	Nilai
1	Kompas	69
2	CNN	68
3	TVRI	66
4	SCTV (Liputan6)	64
5	Detik.com	63
6	Tempo	60
7	TVOne	60
8	Berita TV Lokal	57
9	Tribun News	55

10	Jawa Pos	54
11	Merdeka.com	52
12	Sindonews.com	52
13	Kumparan.com	50
14	Suara.com	48
15	Tirto.id	44

Di mata masyarakat, Tempo dihormati atas keberaniannya mengangkat isu-isu yang menantang pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak demokratis. Namun, posisi mereka sebagai media oposisi juga membawa tantangan, termasuk kritik atas dugaan jurnalisme fitnah dan pemaparan opini yang tidak berdasar. Pada tahun 2022, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Anastasia dan Salman menyoroiti objektivitas liputan Tempo.co terhadap Presiden Jokowi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Tempo.co mencapai tingkat ketidakberpihakan sebesar 51,03%, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal penggabungan fakta dan opini, kesesuaian antara isi dan judul, serta penyajian dari berbagai sudut pandang. Meski demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa Tempo tetap memainkan peran kritis dalam menyajikan informasi kepada publik (Yunita & Salman, 2022).

Tempo telah menjadi salah satu pelopor dalam membawa isu-isu krusial ke ruang publik Indonesia. Dengan terus menghadirkan perspektif alternatif dan memperluas wacana, Tempo memainkan peran yang krusial dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan sikap kritisnya tersebut, tentunya dikhawatirkan akan mempengaruhinya dalam mengkontruksi suatu berita. Terutama dalam isu pemakzulan presiden Jokowi, Tempo.co ataupun media

berita lainnya tentunya akan memilih perspektif atau cara penyampaiannya masing-masing. Lalu dengan hasil konstruksi tersebut, tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda tergantung dari individu yang menerima. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan analisis bagaimana penerimaan pembaca terhadap pemberitaan mengenai pemakzulan Presiden Jokowi pada portal berita *online* Tempo.co.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerimaan pembaca tentang pemberitaan pemakzulan Presiden Jokowi pada portal berita *online* Tempo.co?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pembaca tentang pemberitaan pemakzulan Presiden Jokowi pada portal berita *online* Tempo.co.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ataupun kegunaan dalam perkembangan penelitian dengan kajian komunikasi politik yang ada pada Program Studi Ilmu Komunikasi. UPN “Veteran” Jawa Timur. Hasil penelitian dapat membantu memperdalam pemahaman mengenai penerimaan pembaca terhadap teks media terutama dalam ranah isu politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk mengetahui bagaimana penerimaan pembaca Tempo.co terhadap pemberitaan mengenai isu pemakzulan presiden.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi maupun rujukan bagi pembaca yang hendak mengetahui bagaimana penerimaan pembaca terhadap pemberitaan mengenai isu pemakzulan Presiden Jokowi pada portal berita *online* Tempo.co

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai titik perbandingan, serta kebutuhan akan peninjauan literatur terkait topik yang hampir serupa untuk mengidentifikasi kontribusi baru berdasarkan pada kekurangan yang masih ada dalam penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu memberikan wawasan yang berharga dalam merancang kerangka penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama berjudul “Resepsi Pembaca Terkait Berita Demo 4/11 di Kompas. Com” yang ditulis oleh Novita Ika Purnamasari (Jurnal *Aspikom* Vol. 3, hal 958, 2018). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemaknaan pembaca berita di media *online* terkait berita demo 4/11 di Kompas.com. Metode Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis resepsi yang diadaptasi dari model Carolyn Michelle, dengan memegang konsep terpenting bahwa makna teks tidak melekat pada teks media, melainkan diciptakan dalam interaksi antara khalayak dengan teks. Penelitian ini melibatkan empat partisipan dari kalangan mahasiswa dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berita demo 4/11, kebebasan berpendapat di Indonesia mengalami pergeseran makna dan toleransi

keagamaan menjadi polemik karena agama yang harusnya menjadi pemersatu ditengah masyarakat Indonesia yang majemuk justru digunakan untuk memantik konflik. Penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan pribadi serta kebiasaan bermedia yang diikuti dengan literasi media yang baik mempengaruhi pemaknaan mereka.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari segi metode dan jenis penelitian yang sama-sama mengenai penerimaan terhadap suatu berita dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya adalah, teori yang digunakan penelitian ini adalah analisis resepsi model Carolyn Michelle, sedangkan penulis menggunakan teori resepsi Stuart Hall. Objek penelitian juga berbeda yang mana penelitian ini mengambil berita isu Demo 4/11 pada Kompas.com sementara penulis menyoroti isu Pemakzulan Presiden Jokowi pada Tempo.co.

2. Penelitian kedua berjudul “Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Berita kasus Meiliana Di Media *Online*” yang ditulis oleh Sofiana Santoso (Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 12, No. 2, September 2022). Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pemahaman dan penerimaan khalayak terhadap berita tentang kasus Meiliana di media massa *online*. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teori resepsi Stuart Hall. Dengan wawancara terhadap enam orang informan dari kalangan mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda-beda, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat

bermacam-macam interpretasi khalayak dalam memaknai berita kasus Meiliana yang mengeluhkan volume suara adzan di media *online* berdasarkan latar belakang sosial dan budaya mereka. Penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa faktor-faktor kontekstual mempengaruhi penerimaan khalayak terhadap teks media.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian yang merupakan analisis resepsi menggunakan teori Stuart Hall terhadap isu berita. Selain itu metode yang digunakan juga sama yaitu kualitatif, dengan perolehan data dari wawancara. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian dan juga media, yang mana penelitian ini memiliki objek penelitian berita kasus Meiliana pada media massa *online* sementara penulis mengenai berita isu Pemakzulan Presiden Jokowi yang fokus pada media Tempo.co saja.

3. Penelitian ketiga dengan judul “*Reception Analysis* Masyarakat Surabaya terhadap Wacana Presiden 3 Periode Dalam Indonesia Lawyers Club Episode “Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi” yang ditulis oleh Rizal Wahyu Saputra dan Dyva Claretta (Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting Vol. 3 No 3 639-647, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan masyarakat tentang wacana presiden 3 periode dalam channel YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) episode “Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif analisis resepsi encoding-decoding Stuart Hall. Data dikumpulkan dengan

wawancara mendalam terhadap 5 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan kemungkinan adanya presiden yang menjabat selama tiga periode, karena tindakan tersebut dianggap melanggar konstitusi dan prinsip dasar negara yang tercantum dalam UUD 1945 yang berlaku di Indonesia. Meskipun semua responden mengakui kinerja Presiden Jokowi, namun mereka tetap berpendapat bahwa beliau tidak layak untuk diperbolehkan meneruskan masa jabatannya karena hal tersebut dapat mengancam reformasi dan mengganggu stabilitas negara.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu melakukan analisis resepsi dengan menggunakan teori Stuart Hall. Metode penelitian sama-sama secara kualitatif dengan pengumpulan data secara wawancara mendalam (*in dept interview*). Perbedaannya adalah objek yang dilakukan analisis merupakan video tentang wacana presiden 3 periode dalam channel YouTube Indonesia Lawyers Club. Sedangkan penulis menganalisis berita isu Pemakzulan Jokowi pada portal Tempo.co.

Tabel 2.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu

Aspek yang dikaji	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3
Judul Penelitian	Resepsi Pembaca Terkait Berita Demo 4/11 di Kompas. Com	Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Berita kasus Meiliana Di Media <i>Online</i>	<i>Reception Analysis</i> Masyarakat Surabaya terhadap Wacana Presiden 3 Periode Dalam Indonesia Lawyers Club

			Episode “Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi”
Teori yang Dipakai	Resepsi Carolyn Michelle	Resepsi Stuart Hall	Resepsi Stuart Hall
Metodologi Penelitian	Kualitatif deskriptif	Kualitatif	Kualitatif
Hasil Penelitian	Temuan penelitian menunjukkan bahwa berita mengenai demonstrasi 4/11 mencerminkan perubahan dalam konsep kebebasan berpendapat di Indonesia, serta meningkatnya kontroversi terkait toleransi keagamaan. Agama, yang seharusnya bersatu dalam masyarakat Indonesia yang beragam, malah menjadi sumber konflik. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pengalaman pribadi dan pengetahuan, serta kebiasaan dalam mengonsumsi media yang didukung oleh tingkat literasi yang	Penelitian ini menyimpulkan bahwa beragam interpretasi masyarakat terhadap berita tentang kasus Meiliana, yang mengeluhkan volume suara adzan melalui media <i>online</i> , dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya mereka. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor kontekstual memengaruhi cara khalayak menerima teks media tersebut.	Hasil penelitian menemukan bahwa mayoritas menolak gagasan tentang kemungkinan seorang presiden menjabat selama tiga periode, karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan prinsip dasar negara yang terdapat dalam UUD 1945 yang berlaku di Indonesia.

	baik, memengaruhi bagaimana individu memahami dan menafsirkan informasi tersebut.		
--	---	--	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Media Massa Sebagai Ruang Politik

Menurut Cangara, media massa merupakan instrumen untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, TV, dan radio (Wahyuni, 2014). Media massa merupakan alat yang digunakan oleh suatu badan atau individu untuk menyampaikan pesan kepada sejumlah besar khalayak yang beragam, tersebar luas, dan tidak dikenal secara personal, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara bersamaan dan cepat oleh banyak orang (Wahyuni, 2014). Media massa dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya, yaitu media cetak seperti surat kabar, majalah, brosur, pamflet, dan sejenisnya, serta media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain (Nova dalam Wahyuni, 2014).

Menurut Onong U. Effendi (dalam Wahyuni, 2014), karakteristik media massa (pers) dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Periodisitas

Media massa, seperti surat kabar, diterbitkan secara teratur dalam periode yang tetap, misalnya setiap hari, mingguan, dua mingguan, bulanan, atau dua bulanan.

2. Publisitas

Media massa ditujukan untuk khalayak yang sangat beragam. Oleh karena itu, konten seperti berita, editorial, dan artikel haruslah relevan dengan kepentingan umum.

3. Universalitas

Media massa harus mencakup berbagai berita tentang peristiwa-peristiwa dari seluruh dunia serta aspek-aspek kehidupan manusia yang beragam.

4. Aktualitas

Aktualitas merujuk pada kecepatan dalam menyampaikan laporan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat kepada khalayak. Dalam konteks surat kabar, kecepatan ini menjadi faktor penting karena berkaitan dengan reputasi media dan persaingan dengan media lainnya.

5. Objektivitas

Objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh para profesional jurnalis. Surat kabar yang berkualitas harus mampu menyajikan fakta secara obyektif sehingga kebenaran informasi yang disampaikan tidak dipertanyakan.

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan realitas politik. Saat ini, kehidupan politik hampir tidak dapat dipisahkan dari media massa karena kita hidup dalam era mediasi, dimana media massa memegang peran sentral dalam dinamika politik (*politics in the age of mediation*) (Hamad, 2004). Dalam era mediasi, media massa menjadi titik fokus utama dalam penyebaran informasi politik, pembentukan opini, dan pengaruh terhadap perilaku politik

masyarakat. Peristiwa politik, baik yang bersifat rutin maupun luar biasa, menjadi bahan berita yang sangat menarik bagi media massa. Bahkan kegiatan sehari-hari seperti rapat partai atau pidato politik dapat diangkat menjadi berita yang relevan jika dianggap memiliki nilai berita. Apalagi jika ada situasi yang lebih luar biasa seperti pergantian presiden di tengah jabatan atau pembubaran parlemen secara langsung. Hal tersebut menunjukkan bagaimana media massa pada hakikatnya merupakan ruang politik.

Hakikat media massa sebagai ruang politik menyoroti peran penting media massa dalam membentuk dinamika politik dan berkontribusi terhadap proses demokrasi dan partisipasi politik dalam masyarakat. Hal ini terjadi ketika media massa melalui tulisan-tulisannya, membentuk dan mengarahkan opini publik mengenai sebuah masalah politik dan/atau aktor politik (Hamad, 2004). Dalam hal ini media massa merupakan sarana dari komunikasi politik yang penting dalam mengkonstruksi citra bagi para aktor politik. Para aktor politik, termasuk pejabat pemerintah, partai politik, dan kandidat, secara aktif berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian media massa agar kegiatan dan pesan politik mereka disampaikan kepada publik secara luas melalui berbagai platform media. Aspek pembentukan opini seperti ini merupakan tujuan utama, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian para aktor politik.

2.2.2 Efek Media

Dalam masyarakat modern, pengaruh media massa semakin besar karena individu mendapatkan banyak informasi tentang dunia dari media massa. Namun, pada saat yang bersamaan, mereka menghadapi kesulitan dalam memverifikasi

kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh media. Pengaruh yang dimiliki oleh media terhadap masyarakat tergantung pada cara kerja media tersebut. McQuail mengungkapkan bahwa hanya dengan memahami bagaimana media beroperasi, kita dapat memahami bagaimana masyarakat memengaruhi media dan sebaliknya (Wahyuni, 2014).

Media massa memainkan peran yang sangat penting terutama dalam efeknya terhadap pembentukan opini publik. Media massa memberi pengaruh terhadap opini publik dengan melakukan 3 kegiatan sekaligus, meliputi penggunaan simbol-simbol politik (*language of politics*), penggunaan strategi pengemasan pesan (*framing strategies*), penggunaan fungsi agenda media (*agenda setting function*) (Hamad, 2004). Ketika melakukan ketiga kegiatan tersebut, media bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu dalam suatu kekuatan politik tertentu, kepentingan politik pengelola media, relasi media, dan faktor eksternal seperti tekanan yang bersumber dari pembaca, sistem politik yang sedang berlaku, dan kekuatan luar lainnya.

2.2.3 Media Online Tempo.co



Gambar 2.1 : Logo Tempo.co

Sumber: tempo.co

Portal berita Tempo.co adalah media *online* yang menyajikan berita mengenai politik, hukum, nasional, dunia, bisnis, bola, seleb hingga travel. Media

online sendiri merupakan wujud dari perkembangan teknologi dalam pertukaran informasi di internet. Media online, sebagai bentuk baru dari media massa, masih menggunakan prinsip-prinsip jurnalisme dalam operasionalnya. Karakteristik media online yang berbasis teknologi, interaktif, fleksibel, dan dapat digunakan secara privat maupun publik, serta memiliki aturan yang sederhana dan saling berhubungan, memungkinkan suatu instansi untuk mengakses pasar global melalui internet (Nursitawati & Suseno, 2024).

Penggunaan media *online* sebagai sarana komunikasi massa semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan peningkatan penggunaan media *online*, antara lain:

- (1) Ketersediaan akses yang mudah,
- (2) Harga yang terjangkau,
- (3) Kecepatan dalam mengakses informasi,
- (4) Kemampuan untuk bergerak secara fleksibel, dan
- (5) Beragamnya layanan yang tersedia. Banyak individu yang memilih internet sebagai sumber utama informasi, sebagai platform personal, atau untuk hiburan (Silvani et al., 2021).

Tempo Interaktif, salah satu media digital pertama di Indonesia, didirikan pada tahun 1995 oleh enam orang wartawan. Nama dan logo Tempo dipilih karena dianggap singkat dan bersahaja, netral, dan tidak memiliki simbolisme golongan. Pada tahun 2011, Tempo Interaktif berganti nama menjadi Tempo.co untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan ekosistem industri media (Tempo.co, n.d.).

Tempo.co mendapatkan beberapa penghargaan, termasuk Silver Award "The Best Mobile Media 2011" pada Asia Digital Media Award dan menjadi juara dunia pada kompetisi yang digelar oleh Global Editors Network di Wina, Austria. Visi Tempo.co adalah menjadi acuan dalam meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan. Tempo.co terus mengembangkan aplikasi yang mengintegrasikan semua platform produk informasi, seperti majalah, koran, dan digital, dan telah menerima lebih dari 100 penghargaan dalam dan luar negeri.

2.2.4 Pemakzulan (Impeachment)

Pengaturan mengenai pemakzulan atau yang lebih dikenal dengan *impeachment* merupakan konsekuensi wajar jika suatu negara berusaha memperkuat sistem presidensial. Hal tersebut merupakan bagian dari prinsip *checks and balances* antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Marsillam (dalam Ayuningtiyas et al., 2023) menjelaskan bahwa pemakzulan merupakan suatu interaksi antara legitimasi (pidana) dan otoritas publik yang berada di bawah pengawasan pengadilan, dengan sifat yang semi-politik dan stabil, karena adanya tuduhan atau pengabaian yang masih dalam kerangka konstitusional.

Konsep *impeachment* pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-14. Meskipun Inggris adalah negara monarki, parlemen telah menggunakan mekanisme *impeachment* untuk meminta pertanggungjawaban raja. Di Amerika Serikat, pembahasan mengenai *impeachment* sudah dimulai sejak negara ini berdiri. Pengalaman traumatis terhadap kekuasaan absolut raja di Inggris menyebabkan para pendiri Amerika Serikat menganggap *impeachment* sebagai alat penting untuk

mengawasi pejabat publik yang memegang kekuasaan besar, sehingga mereka dapat dilengserkan melalui prosedur yang sesuai dengan konstitusi apabila terbukti melakukan korupsi. Di Indonesia, *impeachment* diartikan sebagai proses pemberhentian Presiden selama masa jabatannya oleh lembaga legislatif (DPR) akibat pelanggaran hukum tertentu. Pengertian *impeachment* di Indonesia lebih terbatas dibandingkan dengan pengertian di Amerika Serikat. Istilah *impeachment* baru mulai dikenal setelah amandemen UUD 1945 (Satriya, 2022).

Anibal Perez Linan (dalam Satriya, 2022) membagi model mekanisme *impeachment* menjadi 3 yaitu: (1) *Congressional Model*; (2) *Judicial Model*; dan (3) *Mixed Model*. *Congressional model* yaitu apabila keputusan terakhir untuk memberhentikan Presiden berada di tangan lembaga legislatif. Sedangkan, *Judicial model* yaitu apabila keputusan terakhir dari proses pemberhentian Presiden berada di tangan lembaga yudisial. *Mixed Model* yaitu model yang menggabungkan tipe pemberhentian Presiden dengan *Congressional model* dan *Judicial model*. Indonesia dalam hal ini termasuk ke dalam kategori *Congressional model*. Hal ini dikarenakan proses *impeachment* Presiden di Indonesia meletakkan keputusan akhir *impeachment* di tangan lembaga legislatif, MPR.

Secara teori, *impeachment* adalah kewenangan yang khusus dimiliki oleh lembaga legislatif. Dalam negara yang memiliki struktur parlementer bikameral, kedua kamar parlemennya akan terlibat dalam mekanisme pemakzulan. Biasanya, lembaga legislatif berperan sebagai pihak yang memulai proses pemakzulan dengan melakukan penyelidikan melalui komite khusus. Setelah penyelidikan selesai dan laporan disampaikan kepada lembaga legislatif, maka lembaga legislatif akan

mengambil keputusan melalui pemungutan suara mengenai apakah tuduhan terhadap presiden dapat dilanjutkan atau tidak, dengan ketentuan yang dapat berbeda-beda di setiap negara.

Pemakzulan di Indonesia diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Proses pemakzulan Presiden di Indonesia melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR bertanggung jawab untuk melakukan proses penuntutan, yang merupakan bagian dari hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR. Hak menyatakan pendapat ini dapat diajukan apabila minimal 25 anggota DPR menyatakan adanya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Selain itu, hak menyatakan pendapat juga dapat diajukan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (MKRI, 2010).

2.2.5 Analisis Resepsi

Analisis resepsi berkembang menjadi teori yang dikenal sebagai Analisis Resepsi atau Resepsi Khalayak, yang merupakan perkembangan dari karya Stuart Hall pada tahun 1973 (Dixon, 2019). Dalam studi komunikasi massa, peran khalayak sering kali dilihat dalam dua dimensi yang berbeda: khalayak aktif dan khalayak pasif. Stuart Hall mengemukakan konsep khalayak aktif sebagai individu yang secara aktif terlibat dalam proses memberikan makna terhadap pesan yang diterimanya, dengan merujuk pada pengalaman dan pengetahuan pribadi masing-masing (Purnamasari, 2018). Hal ini menggambarkan bagaimana pemaknaan pesan

media tidaklah statis, melainkan tergantung pada refleksi individu terhadap pesan yang diterimanya.

Stuart Hall mengembangkan paradigma encoding-decoding yang memiliki anggapan bahwa khalayak secara aktif melakukan konstruksi dan interpretasi makna terhadap apa yang mereka baca, lihat dan dengar. Hall mengatakan bahwa produsen media mungkin mengaplikasikan pesan-pesan yang memperkuat hegemoni ideologis, namun tidak semua khalayak akan mengikuti gagasan-gagasan tersebut dalam cara yang pasif atau patuh. Sebaliknya, khalayak justru terlibat dalam penilaian kontinu atas media yang mereka terima dan, sebagai hasilnya, mereka dapat menolak setiap encoding hegemonik yang mungkin dibangun oleh media tersebut.

Hall menekankan bahwa khalayak mengembangkan pemahaman atas pesan-pesan media dengan menggunakan 'logika yang terletak' - yaitu, cara mereka memfilter informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan individu (Dixon, 2019). Hall menyimpulkan bahwa berbagai pola dekoding media mungkin terjadi bergantung pada faktor-faktor kontekstual dan pengalaman individu, yang memengaruhi cara mereka memahami dan menafsirkan pesan media:

1. Posisi Hegemoni Dominan

Khalayak menafsirkan produk media dan menerima pesan budaya dominan yang dihasilkan oleh produk tersebut. Di sini, khalayak dengan sengaja setuju dengan pesan hegemonik yang dibangun oleh media profesional.

2. Posisi Negosiasi

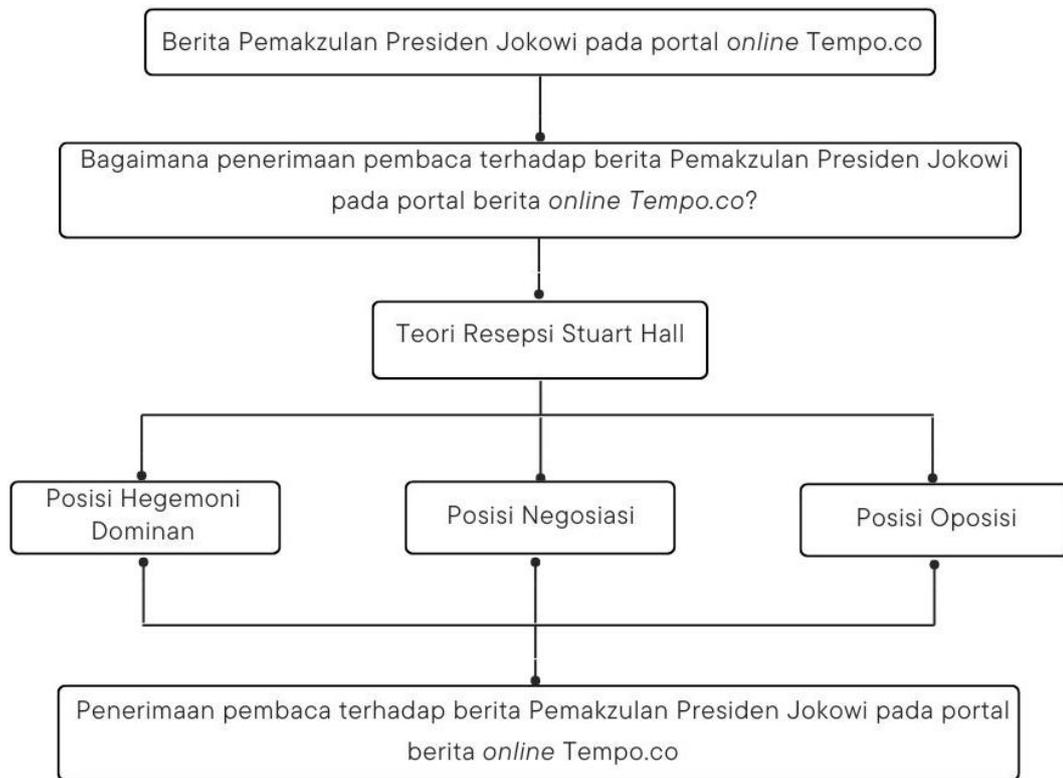
Khalayak mungkin menghasilkan pembacaan yang dinegosiasikan jika pesan dari pemberi pesan diakui secara umum, namun pengalaman individu membawa anggota khalayak untuk mempertanyakan atau menolak beberapa aspek dari pesan tersebut. Dengan demikian, khalayak dengan sengaja setuju dengan beberapa pernyataan hegemonik yang dihasilkan oleh media profesional sambil mempertanyakan aspek lainnya.

3. Posisi Oposisi

Khalayak memahami pesan namun menolak untuk mempercayainya atau menggunakan pengalaman pribadi/pandangan ideologis mereka untuk menantang pesan yang dihasilkan. Dengan cara ini, khalayak dengan sengaja menghasilkan pembacaan yang berlawanan terhadap pernyataan hegemonik yang dihasilkan oleh media.

2.3 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis resepsi berita pemakzulan Presiden Jokowi yang ada pada portal *online* Tempo.co dengan menggunakan teori resepsi Stuart Hall. Fokus penelitian ini adalah hendak menggambarkan bagaimana penerimaan pembaca terhadap berita-berita mengenai pemakzulan Presiden Jokowi yang ada pada portal berita *online* Tempo.co.



Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis resepsi. Metode kualitatif deskriptif menurut Corbin (dalam F. Nugrahani, 2014) merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalis, gerakan sosial, dan atau hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif menekankan sifat yang terbangun secara sosial, serta hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Menurut Moleong (dalam Arikunto, 2021), sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.

3.2 Defenisi Konseptual

3.2.1 Analisis Resepsi

Analisis Resepsi adalah metode yang digunakan untuk mengkaji bagaimana khalayak berinteraksi dengan media massa. Dalam analisis ini, fokusnya adalah memberikan interpretasi atas cara khalayak memahami teks media, baik itu berupa media cetak, media elektronik, maupun media internet. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana karakteristik teks media diterima dan dipahami oleh khalayak.

Riset khalayak menurut Stuart Hall menitikberatkan pada dua hal utama: (a) analisis dalam konteks sosial dan politik di mana konten media diproduksi (*encoding*); dan (b) konsumsi konten media (*decoding*) dalam konteks kehidupan sehari-hari. Analisis resepsi dalam penelitian ini memusatkan perhatian pada individu dalam proses komunikasi massa (*decoding*), yang mencakup pemaknaan dan pemahaman yang lebih dalam terhadap berita pemakzulan Jokowi serta bagaimana individu menginterpretasikan konten media Tempo mengenai pemakzulan Jokowi tersebut.

3.2.2 Berita “Pemakzulan Presiden Jokowi”

Berita pemakzulan Presiden Jokowi adalah berita terkait perkembangan isu pemakzulan Jokowi. Di Indonesia, pemakzulan diartikan sebagai proses pemberhentian Presiden selama masa jabatannya oleh lembaga legislatif (DPR) akibat pelanggaran hukum tertentu. Pemberitaan mengenai pemakzulan Presiden Jokowi muncul sejak tahun 2023, lalu memanas kembali di awal tahun 2024 sampai beberapa saat setelah Pemilu. Berbagai pemberitaan tentang upaya dan wacana pemakzulan Presiden yang ada telah menjadi sumber polemik yang memicu beragam opini dari masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai strategi pengalihan perhatian untuk mendukung kandidat lain menjelang Pemilu. Ada juga dukungan terhadap wacana pemakzulan, terlihat dari gerakan demo oleh kalangan mahasiswa.

Pemberitaan mengenai pemakzulan yang disoroti dalam penelitian ini adalah pemberitaan Tempo. Portal Tempo menjadi salah satu media berita yang rutin menampilkan berita terkait perkembangan, kronologi, dan pandangan berbagai pihak terkait isu pemakzulan Jokowi tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Isu yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu pemakzulan presiden merupakan isu yang dialami oleh masyarakat Indonesia dengan media yang merupakan portal berita yang dapat diakses secara luas. Maka dari itu lokasi penelitian ini adalah negara Indonesia.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau entitas yang menjadi fokus atau objek dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Dalam penelitian ini memiliki subjek penelitian yaitu orang yang telah membaca berita mengenai pemakzulan presiden Jokowi, berusia 17 tahun ke atas. Peneliti mengusahakan pemilihan subjek dengan latarbelakang yang berbeda-beda, diharapkan mampu memberikan pandangan yang berbeda mengenai isu ini.

Objek dalam penelitian ini adalah 5 berita mengenai Pemakzulan Presiden Jokowi pada Tempo.co yang telah peneliti pilih untuk dilakukan analisis resepsi:

1. Berita “Yusril Sebut Gerakan Pemakzulan Jokowi Inskontitusional, Ancam Keberlangsungan Pemilu”

2. Berita “Luhut Sebut Isu Pemakzulan Jokowi adalah Keributan Politik yang Tak Perlu”
3. Berita “Sebut Penuhi Unsur Pemakzulan, Ini 3 Pernyataan Bivitri Susanti Soal Pelanggaran Jokowi”
4. Berita “Demonstrasi Mahasiswa Tuntut Pemakzulan Presiden Jokowi”
5. Berita “Mahfud Md Sebut Hak Angket Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu, tapi Presiden Bisa Disanksi Pemakzulan”

3.5 Teknik Penentuan Informan

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menurut Sugiono merupakan sebuah teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan (Noor, 2011). Dengan kata lain, unit sampel yang dipilih didasarkan pada kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian atau keperluan yang ditetapkan.

Menurut Arikunto, dalam proses pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian, harus mempertimbangkan beberapa syarat, seperti pengambilan sampel yang didasarkan pada ciri-ciri, sifat, atau karakteristik tertentu yang menjadi ciri utama populasi (Arikunto, 2021). Subjek yang dipilih sebagai sampel harus secara signifikan mencerminkan ciri-ciri yang ada dalam populasi. Dalam penelitian ini subjek penelitian yang diambil adalah dengan kriteria:

1. Laki-laki atau Perempuan berusia 17 tahun ke atas
2. Merupakan warga negara Indonesia

3. Telah membaca berita mengenai Pemakzulan Presiden Jokowi di portal berita Tempo.co

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara merupakan interaksi percakapan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik wawancara menurut Nasution (Rukajat, 2018) dilakukan dengan 2 cara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara “semi-terstruktur”, yaitu wawancara dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya lalu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut (Arikunto, 2021). Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan wawancara secara terbuka serta dilengkapi dengan pengamatan yang mendalam untuk memahami sikap, pandangan, dan pemaknaan pembaca terhadap teks berita pemakzulan Presiden Jokowi.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (Noor, 2011) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga

dapat ditarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan sepanjang proses pengumpulan data serta setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari subjek yang diwawancarai.

Menurut Miles dan Huberman “aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Aktivitas analisis data yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing atau verification*).

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Pengumpulan data merupakan data keseluruhan yang diambil untuk memecah data menjadi bagian kemudian memilah data mana saja yang akan diambil untuk dijadikan bahan dari penelitian yang sedang berlangsung. Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pembaca berita pemakzulan Presiden Jokowi pada Tempo.co. Hasil dari

wawancara tersebut dirangkum dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti. Peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap pengalaman individu baik pribadi maupun sosial yang berhubungan dengan pemaknaan pembaca terhadap teks berita.

3. Penyajian data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah *data display* atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan membentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data wawancara dengan teks atau narasi.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing or Verification*)

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Simpulan dalam kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Berita Pemakzulan Presiden Jokowi pada Tempo.co

Dalam teori resepsi Hall, produk media dibuat dengan cara yang sudah diatur (Dixon, 2019). Sebuah surat kabar tidak sekadar mencatat peristiwa yang terjadi. Cerita-cerita dikumpulkan oleh reporter berpengalaman. Peristiwa-peristiwa diatur menggunakan struktur cerita yang sudah ada. Pilihan kata dan cara penyampaian cerita diatur untuk menghibur, bisa laku di pasaran, atau bisa meyakinkan. Proses pembuatan media seperti ini selalu akan membangun pandangan dunia yang dimediasi. Jurnalis tidak sekadar melaporkan fakta-fakta mentah. Mereka menyajikan versi cerita yang dipilih dengan hati-hati. Mereka memilih narasumber dan memilih gambar atau rekaman video untuk menegaskan, mempertanyakan, atau memberi alasan pada sudut pandang tertentu.

Hall juga mengatakan bahwa proses pembuatan media ini menggunakan berbagai kode formal, baik itu visual atau suara. Kode-kode ini mungkin tidak selalu langsung terkait dengan cerita yang dilaporkan, tetapi mereka menambahkan pesan-pesan yang disampaikan. Dalam mengkaji penerimaan pembaca, peneliti akan terlebih dahulu memaparkan makna apa yang ingin disampaikan oleh media kepada pembaca.

Melalui pemberitaannya mengenai isu Pemakzulan Presiden Jokowi, Tempo.co rutin menyajikan perkembangan informasi terkait aksi dan opini pro

kontra yang terjadi di masyarakat. Berikut 5 berita Tempo mengenai Pemakzulan Presiden:

Tabel 4.1 : Berita Tempo Mengenai Pemakzulan Presiden

No.	Berita	Kesimpulan Berita
1	Yusril Sebut Gerakan Pemakzulan Jokowi Inskontitusional, Ancam Keberlangsungan Pemilu (14 Januari 2024)	<p data-bbox="735 656 1265 763">Yusril Sebut Gerakan Pemakzulan Jokowi Inkonstitusional, Ancam Keberlangsungan Pemilu</p> <p data-bbox="751 792 1050 842">Reporter: Daniel A. Fajri Editor: Linda novi trianita</p> <p data-bbox="735 864 1007 887">Minggu, 14 Januari 2024 15:20 WIB</p>  <p data-bbox="651 1294 1356 1989">Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menganggap gerakan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Petisi 100 merupakan langkah yang inkonstitusional. Yusril mempertanyakan mengapa gerakan itu menyambangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md yang merupakan salah satu calon wakil presiden di pemilu 2024. Yusril juga kemudian menjelaskan proses pemakzulan yang akan memakan waktu yang lama dalam prosesnya. Dalam berita ini Tempo menuliskan juga keterangan bahwa Yusril berasal dari partai yang mendukung Prabowo Subianto.</p>

2	<p>Luhut Sebut Isu Pemakzulan Jokowi adalah Keributan Politik yang Tak Perlu (1 Januari 2024)</p>	<p>Luhut Sebut Isu Pemakzulan Jokowi adalah Keributan Politik yang Tak Perlu</p> <p>Reporter: Daniel A. Fajri Editor: Eko Ari Wibowo</p> <p>Rabu, 17 Januari 2024 19:01 WIB</p> <p>Ikuti Kami di  Google News</p> <p>Bagikan    </p>  <p>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan isu pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang muncul belakangan ini. Luhut mengatakan wacana pemakzulan Jokowi ini sebagai keributan politik yang tidak perlu. Luhut menyinggung ada sosok pejabat yang turut berkomentar soal isu pemakzulan itu. Menurutnya faktor untuk dapat dilaksanakannya pemakzulan sangat banyak. Ia ragu itu dapat terlaksana jelang pemilihan umum 2024.</p>
---	---	--

3	<p>Sebut Penuhi Unsur Pemakzulan, Ini 3 Pernyataan Bivitri Susanti Soal Pelanggaran Jokowi (28 Januari 2024)</p>	<p>Sebut Penuhi Unsur Pemakzulan, Ini 3 Pernyataan Bivitri Susanti Soal Pelanggaran Jokowi</p> <p>Reporter: Khumar Mahendra Editor: S. Dian Andryanto</p> <p>Minggu, 28 Januari 2024 13:29 WIB</p> <p>Ikuti Kami di  Google News</p> <p>Bagikan    </p>  <p>Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memenuhi unsur untuk dimakzulkan. Pernyataan itu disampaikan menyusul kontroversi ucapan Jokowi tentang presiden boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu 2024. Bivitri mengatakan, perbuatan tercela presiden tidak dinilai secara personal, melainkan dalam konteks jabatan presiden. Tak hanya itu, Bivitri menyebutkan, keberpihakan presiden dan menteri dalam pemilu akan berdampak buruk kepada demokrasi. Menurut dia, keberpihakan presiden merupakan bahaya dari nepotisme yang selama ini digaungkan.</p>
---	--	--

4	<p>Demonstrasi Mahasiswa Tuntut Pemakzulan Presiden Jokowi (8 Februari 2024)</p>	<p>Demonstrasi Mahasiswa Tuntut Pemakzulan Presiden Jokowi</p> <p>Reporter: Bagus Pribadi Editor: Andry Triyanto Tjitra</p> <p>Kamis, 8 Februari 2024 08:11 WIB</p> <p>      </p> <p>  </p> <p>Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, pada Rabu kemarin, 7 Februari 2024. Para mahasiswa itu menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sejumlah isu yang disuarakan dalam aksi tersebut, yakni soal kecurangan pemilu, korupsi, kolusi dan nepotisme, agraria, monopoli sumber daya alam, lingkungan, biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal, kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender, kekerasan aparat dan produk hukum bermasalah.</p>
---	--	--

5	<p>Mahfud Md Sebut Hak Angket Tak bisa Ubah Hasil Pemilu, tapi Presiden Bisa Disanksi Pemakzulan (27 Februari 2024)</p>	<p>Mahfud Md Sebut Hak Angket Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu, tapi Presiden Bisa Disanksi Pemakzulan</p> <p>Reporter: Adil Al Hasan Editor: Juli Hantoro</p> <p>Selasa, 27 Februari 2024 06:40 WIB</p> <p>   </p>  <p>Calon Wakil Presiden Mahfud Md yang mengatakan bahwa dugaan kecurangan Pemilu 2024 dapat ditangani melalui jalur politik dengan mengajukan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, menurutnya, hak angket tersebut tidak akan mengubah hasil Pemilu. Dia juga menjelaskan bahwa hak angket tersebut dapat mengenakan sanksi pada Presiden, termasuk pemakzulan atau impeachment.</p>
---	---	--

Secara keseluruhan, berita Tempo mengenai pemakzulan presiden Jokowi, hendak menyampaikan bahwa pihak-pihak yang pro pemakzulan Jokowi memiliki opini bahwa wacana ini merupakan aksi yang diperlukan sebagai konsekuensi dari kemunduran dalam pemerintahan Jokowi, terutama terkait dugaan nepotisme dalam Pemilu 2024 dan juga penurunan indeks demokrasi. Sementara itu, pihak yang kontra beranggapan bahwa wacana ini tidak penting dan merupakan sebuah upaya untuk mengacaukan Pemilu 2024. Tempo juga memberikan pesan mengenai kemungkinan terjadinya wacana ini melalui pengajuan hak angket ke DPR.

4.1.2 Identitas Informan

Dalam penelitian ini, terdapat 9 orang informan yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan bersedia diwawancarai oleh peneliti. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas subjek penelitian dengan menggunakan nama samaran. Berikut adalah identitas informan beserta keterangan yang telah disepakati untuk dipublikasikan:

1. Informan 1

Nama : Sandy
Usia : 22 Tahun
Asal Daerah : Pematangsiantar

Informan 1 merupakan mahasiswa perguruan tinggi Surabaya, jurusan Administrasi Bisnis yang berasal dari Pematangsiantar. Saat ini dirinya berusia 22 tahun. Informan 1 aktif dalam sebuah organisasi kesukuan di kampusnya. Kerap menghabiskan waktunya dengan berselancar dalam media sosial seperti *instagram* dan *youtube* membuat dirinya lumayan mengikuti perkembangan isu politik yang ada. Meski begitu, ia mengaku tidak terlalu mendalami isu politik seperti mencari tahu lebih lanjut dikarenakan memang tidak terlalu suka politik.

2. Informan 2

Nama : Vincent
Usia : 23 Tahun
Asal Daerah : Bekasi

Informan 2 merupakan mahasiswa hukum yang berasal dari Bekasi dan berusia 23 tahun. Vincent merupakan mahasiswa yang aktif menyukai dan

mengikuti isu politik dan hal ini menjadikannya ikut bergabung dan aktif dalam organisasi pergerakan politik aktivis, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Dalam organisasi tersebut, dirinya kerap mendiskusikan isu-isu sosial yang terjadi dan melakukan pergerakan atau deklarasi apabila terjadi ketidakadilan.

3. Informan 3

Nama : Windi

Usia : 22 Tahun

Asal Daerah : Bontang

Informan 3 merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi yang berasal dari bontang dan saat ini berusia 22 tahun. Dalam perkuliahannya ia kerap mempelajari mengenai jurnalistik dan menjadikannya memiliki pengetahuan yang lumayan terkait media-media yang ada di Indonesia. Dia mengaku tidak terlalu pandai politik dan baru aktif mengikuti isu politik di Pilpres 2024 ini dikarenakan maraknya berita dan cuplikan terkait Paslon di sosial media seperti Instagram, Twiter dan Tiktok.

4. Informan 4

Nama : Heru

Usia : 27 Tahun

Asal Daerah : Cilegon

Informan 4 merupakan seorang Supervisor Mechanical Static di perusahaan kimia, Cilegon. Lulusan teknik mesin universitas asal Malang ini kerap mengikuti isu politik melalui media sosial meskipun tidak begitu tertarik dalam dunia politik kerana tidak begitu relate dalam kehidupan atau ruang lingkup kerjanya.

5. Informan 5

Nama : Budi
Usia : 23 Tahun
Asal Daerah : Sipahutar, Tapanuli Utara

Informan 5 merupakan mahasiswa Hukum salah satu perguruan tinggi Surabaya. Selama kuliah informan 5 aktif dalam mengikuti organisasi seperti BEM Fakultas Hukum, dan panitia Pencegahan Kekerasan Seksual BEM Fakultas Hukum. Sebagai Advokasi BEM, informan 5 aktif dalam mengikuti forum kemahasiswaan untuk demonstrasi. Hal ini juga menjadikannya aktif dalam mengikuti kegiatan demonstrasi mahasiswa, misalnya pada saat demonstrasi UU Cipta Kerja, isu kelangkaan minyak, dan demonstrasi penyelesaian agraria mengenai pertanahan. Informan 5 memiliki minat dalam mengikuti perkembangan politik dan aktif mengikuti isu-isu politik yang ada di Indonesia.

6. Informan 6

Nama : Juni
Usia : 22 Tahun
Asal Daerah : Medan

Informan 6 adalah mahasiswa yang berasal dari medan dan kini sedang menempuh pendidikan di Surabaya. Informan 6 ini merupakan seorang mahasiswa hukum di Jawa Timur yang memiliki minat untuk berkecimpung di dunia politik. Oleh sebab itu dia sering membaca berita terkait isu-isu yang sedang terjadi dan sering mendiskusikannya dengan teman sejurusan.

7. Informan 7

Nama : Sondang
Usia : 24 Tahun
Asal daerah : Yogyakarta

Informan 7 merupakan seorang *freshgraduated* lulusan Universitas di Yogyakarta, jurusan manajemen. Informan 7 tinggal di Yogyakarta dan saat ini dalam kesibukan mencari kerja. Meskipun tidak terlalu menyukai isu politik, informan 7 kerap mengikuti perkembangan atau informasi terkait pemerintahan dan negara melalui sosial media dan portal berita *online*.

8. Informan 8

Nama : Rena
Usia : 23 Tahun
Asal Daerah : Pangururan, Sumut

Informan 8 merupakan mahasiswi akhir teknik kimia di Medan, berusia 23 tahun yang berasal dari Pangururan. Informan 8 mengikuti perkembangan informasi dari sosial media dan juga membaca dari media berita *online*. Informan 8 sedikit menyukai berita-berita politik dan tertarik dalam mengikuti perkembangan atau isu pemerintah.

9. Informan 9

Nama : Kevin
Usia : 30 Tahun
Asal Daerah : Palembang

Informan 9 merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan bangunan Palembang. Semasa kuliah ia menempuh jurusan hukum. Informan 9 menyukai isu politik dan senang mengikuti perkembangan isu melalui media sosial dan portal berita online.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Kesadaran dan Pengetahuan Pembaca Terhadap Pemakzulan Presiden

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan, ditemukan bahwa tingkat kesadaran seluruh informan terhadap isu pemakzulan Presiden Jokowi cukup tinggi. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa kesadaran mereka mengenai isu ini dipicu oleh keviralan isu tersebut di media sosial. Dari 9 Informan terdapat 2 informan yang memiliki riwayat terlibat aktif dalam mendiskusikan isu tersebut dalam organisasi atau forum kemahasiswaan. Sementara sisanya mengikuti isu ini melalui media berita *online* dan media sosial.

Dari wawancara dengan 9 informan juga ditemukan berbagai jawaban dan pendapat mengenai latarbelakang isu pemakzulan Presiden Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki pengetahuan dasar yang berbeda mengenai isu tersebut dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Perbedaan sumber informasi serta kesesuaian dengan pandangan atau ideologi masing-masing informan mempengaruhi cara mereka memahami dan menafsirkan latarbelakang isu tersebut.

4.2.1.1 Kemunculan Isu Disebabkan Kemunduran dalam Pemerintahan

Jokowi

Beberapa informan menganggap bahwa isu pemakzulan Presiden Jokowi muncul akibat adanya kemunduran dalam pemerintahan beliau. Seperti Informan 1 yang menyatakan bahwa isu ini disebabkan oleh praktik nepotisme yang dilakukan oleh Presiden.

Informan 1

“... penyebab terjadinya wacana pemakzulan Presiden ini karena adanya unsur nepotisme. Yang mana pada saat masa pemerintahan Jokowi, banyak kerabat-kerabatnya yang diangkat untuk masuk dan menjabat didalam pemerintahan, baik itu dari keluarga menantunya maupun keluarga bapak Presiden itu sendiri.”

Informan 1 menjelaskan bahwa munculnya isu ini disebabkan oleh adanya dugaan kuat mengenai nepotisme dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, isu ini berkembang karena terdapat banyak kerabat dekat Presiden yang diangkat dan diberikan posisi penting dalam pemerintahan, yang dinilai sebagai indikasi praktik nepotisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nepotisme adalah perilaku yang menunjukkan kesukaan berlebihan kepada kerabat dekat, atau kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri. Di Indonesia, nepotisme merupakan tindakan kriminal yang tercantum dalam Pasal 22 UU 28/1999. Setiap pejabat negara yang terlibat dalam praktik nepotisme akan dijatuhi hukuman penjara dengan durasi minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar (BPK, 2024).

Berdasarkan jawaban Informan 1 tersebut dapat dilihat bahwa ada asumsi dalam masyarakat mengenai penunjukan anggota keluarga atau kerabat dalam

jabatan-jabatan strategis yang menimbulkan persepsi publik bahwa ada ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan kesempatan di pemerintahan. Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara dalam hal ini telah menggugat Presiden RI Joko Widodo dan keluarganya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Januari lalu (Kompas.com, 2024b). Gugatan tersebut menyoroti dugaan praktik nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi dalam membangun dinasti politik yang bertentangan dengan TAP MPR No.XI/1998, Undang-Undang (UU) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Pernyataan Informan 1 ini juga diperkuat oleh Informan 2, yang menyoroti salah satu aspek yang memicu isu ini, yaitu pencalonan anak seorang presiden dalam Pemilu.

Informan 2

“latar belakangnya munculnya isu ini sendiri menurut saya adanya gejolak dari pemerintahan yang diperhatikan oleh masyarakat, yang dimana saat itu banyak terjadi perubahan-perubahan undang-undang terkhusus pada, ya momen nya mbak tahu sendiri mau Pemilu terus yang diusung dari beberapa koalisi itu salah satunya adanya kehadiran anak presiden disitu. Itu juga yang menjadi dasar perhatian mengenai adanya isu ini.”

Informan 2 menilai bahwa pencalonan putra presiden menambah bobot kritik terhadap praktik nepotisme, karena dianggap sebagai contoh nyata dari pewarisan kekuasaan dalam lingkup keluarga, yang menguatkan argumen bahwa ada upaya untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh keluarga dalam struktur politik. Gejolak ini mencerminkan kekhawatiran dan ketidakpuasan masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi politik yang berlanjut dalam lingkup keluarga presiden, yang semakin memperkuat isu mengenai nepotisme dan kecurangan dalam pemilihan umum.

Pernyataan Informan 2 merujuk pada perubahan undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden. Perubahan tersebut memungkinkan putra sulung Presiden untuk mencalonkan diri dalam Pemilu 2024, yang dinilai oleh banyak pihak sebagai langkah yang mengundang kontroversi dan menciptakan gejolak dalam masyarakat. Dugaan terkait intervensi kekuasaan Presiden terhadap keputusan MK pada saat itu diperkuat oleh posisi Anwar Usman sebagai ketua MK yang merupakan ipar Presiden Jokowi. Hal tersebut mengakibatkan Anwar Usman juga menjadi tergugat dan berujung pada pemberhentiannya dari jabatan ketua MK karena terbukti melanggar kode etik dalam penanganan uji materi syarat batas usia calon presiden-calon wakil presiden (Kompas.com, 2024a).



Gambar 4.1 Dinamika Terkait Dugaan Nepotisme Jokowi

Meski begitu pada akhirnya gugatan terkait dugaan nepotisme pada Presiden Jokowi dinyatakan tidak terbukti oleh MK. Menurut Mahkamah, keputusan MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang mengungkapkan adanya pelanggaran berat kode etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi

nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak cukup menjadi bukti untuk meyakinkan mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut (Tempo.co, 2024).

Sejalan dengan dugaan kemunduran di Pemerintahan Jokowi informan 5, 6 dan 8 memiliki pandangan yang serupa bahwa yang melatar-belakangi munculnya isu ini adalah kekecewaan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait dengan perubahan UU atau kebijakan yang kurang memuaskan.

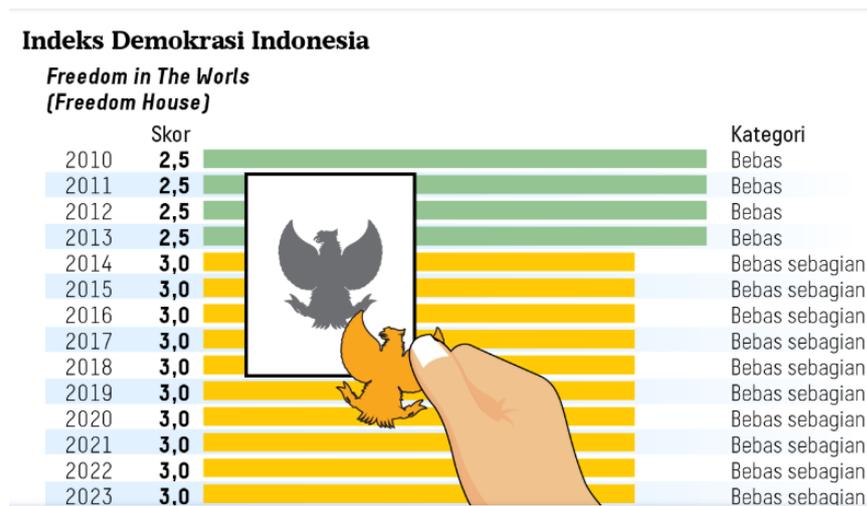
Informan 5

“Menurut saya latar belakangnya itu yang pertama banyaknya informasi mengenai langkah-langkah ataupun kebijakan pemerintah terutama presiden dalam memberikan pelayanan publik atau mencapai suatu program. Misalnya soal bantuan sosial dan juga informasi-informasi mengenai perencanaan pemindahan ibu kota yang melibatkan dana yang begitu besar, utang negara dan juga penurunan indeks demokrasi.”

Melalui pernyataan Informan 5 munculnya isu ini merupakan hasil dari adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai sejumlah kebijakan yang dianggap sepihak oleh Presiden Jokowi. Kebijakan yang dimaksud meliputi penggunaan dana negara yang sangat besar untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pengelolaan utang negara, serta alokasi bantuan sosial. Ia menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut telah menimbulkan perdebatan sengit di masyarakat, dengan sebagian pihak merasa bahwa pengeluaran besar tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang diterima oleh rakyat.

Selain itu, Informan 5 juga mengungkapkan bahwa penurunan indeks demokrasi di Indonesia menjadi latar belakang penting lainnya dari isu ini. Menurutnya, penurunan tersebut mencerminkan kekhawatiran masyarakat tentang

melemahnya kualitas demokrasi dan transparansi dalam pemerintahan, yang pada gilirannya memicu ketidakpuasan dan tuntutan reformasi. Demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan kebijakan dan arah pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih. Berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari yang sebelumnya 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada tahun 2023. Kondisi ini menimbulkan kecemasan terhadap kebebasan pers di Indonesia (Kompas.id, 2024).



Gambar 4 2. Indeks Demokrasi Indonesia (Freedom House).

Sumber: *kompas.id*

Informan 8 secara spesifik menyoroti bahwa salah satu faktor utama yang memicu munculnya isu pemakzulan Presiden Jokowi adalah dugaan keberpihakan Presiden dalam Pemilu 2024. Menurutnya, keputusan-keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi dalam konteks pemilihan umum telah menimbulkan kekecewaan yang signifikan di kalangan masyarakat. Kekecewaan ini, lanjut Informan 8, mencakup persepsi bahwa Presiden telah menunjukkan dukungan yang tidak adil

atau bias terhadap kandidat tertentu, yang dianggap sebagai bentuk campur tangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya.

Informan 8

“Kalau ditanya latar belakangnya, menurut saya sih karena nggak sesuai ekspektasi orang banyak aja gitu loh. Kayak awalnya Jokowi bilang kalau dia tidak bakal terlalu berpihak tapi pada ujungnya dia jadi berpihak gitukan. Jadi banyak yang kecewa gitu.”

Setelah sebelumnya sangat menggaungkan netralitas, Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh berpihak dan berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Hal tersebut diutarakan di tengah acara bersama Menteri Pertahanan dan capres no urut 02 Prabowo Subianto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, pada Rabu 24 Januari 2024. Pernyataan tersebutlah yang pada akhirnya menuai kritik dari sejumlah pihak disebabkan netralitas Presiden yang semakin dipertanyakan pada Pemilu 2024 dan dengan pernyataan tersebut justru menjadikan dugaan orang mengenai Jokowi yang memihak dirasa tervalidasi (Tempo.co, 2024).

Fenomena tersebut pada akibatnya menyebabkan kepercayaan publik menjadi menurun seperti apa yang diungkapkan oleh Informan 6. Informan 6 berpendapat bahwa latar belakang munculnya isu ini dipicu oleh ketidakpercayaan yang meluas, baik terhadap legislatif atau parlemen maupun terhadap Presiden Jokowi sendiri. Menurutnya, ketidakpercayaan ini berakar dari sejumlah faktor, termasuk keputusan-keputusan politik dan kebijakan yang dianggap tidak transparan atau tidak sesuai dengan harapan rakyat. Hal ini, pada gilirannya, telah memicu keresahan dan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat.

Informan 6

“Latar belakang munculnya isu ini sudah pasti sesuai dengan pemakzulan itu sendiri, kenapa ada, ya karena ada ketidakpercayaan legislatif atau parlemen sama presiden. Begitu pula ketidakpercayaan warga negara Indonesia dengan presiden sekarang.”

4.2.1.2 Kemunculan Isu Disebabkan Rivalitas Politik dalam Pemilu 2024

Terdapat 4 Informan yang memiliki pendapat bahwa isu ini berkaitan dengan Pemilu 2024, dimana ada pihak yang ingin menjatuhkan lawan politik atau merasa tidak terima dengan kekalahan yang dialami pada Pemilu. Momennya yang muncul menjelang Pemilu 2024 (14 Februari 2024) memunculkan dugaan kuat bahwa isu ini dipicu panasnya rivalitas antar calon presiden dan wakil presiden.

Informan 9

”Saat itu ada prediksi bahwa akan dimajukan, makanya di buat wacana ini untuk ancang-ancang kalau terjadi demikian, ya pada intinya untuk menjatuhkan saingan politik yang kuat, seperti anak presiden...”

Informan 9 menyimpulkan bahwa isu ini sudah menjadi ”ancang-ancang” dari adanya ketakutan dari pihak-pihak tertentu karena melihat adanya potensi besar dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dianggap memiliki peluang besar untuk meraih suara tinggi dalam pemilu, yang membuat beberapa pihak merasa terancam. Oleh karena itu, mereka mungkin akan berusaha untuk menggoyahkan dukungan tersebut melalui berbagai cara, termasuk dengan menciptakan wacana atau isu yang merugikan seperti agenda pemakzulan Jokowi. Pernyataan Informan 9 ini disimpulkan melihat maraknya prediksi mengenai pencalonan Gibran sejak awal tahun 2023, juga mengenai awal mula wacana ini yang berawal dari tindakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengirim surat terbuka kepada DPR RI pada

Juni 2023. Informan 9 mengartikan tindakan tersebut sebagai upaya memanasi situasi Pemilu 2024. Informan 4 dan Informan 7 juga berpendapat bahwa latar belakang isu pemakzulan presiden besar kaitannya dengan pencalonan Gibran yang dianggap sebagai ancaman bagi lawan politik Paslon 02.

Informan 4

“...ada perubahan UU yang menguntungkan beliau buat maju, akhirnya karena banyak yang kecewa muncullah wacana mau memakzulkan presiden Jokowi ini. Terutama dari pihak lawan politik 02, pasti tidak terima dengan munculnya Gibran sebagai Cawapres. “

Informan 4 dengan tegas menyatakan bahwa dugaan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap salah satu pasangan calon (Paslon) dalam Pemilu 2024 adalah tidak berdasar dan salah kaprah. Menurutnya, klaim bahwa Presiden memberikan privileg khusus kepada Paslon 02—seperti yang sering diasumsikan oleh sebagian orang—hanya merupakan spekulasi yang tidak didukung oleh bukti konkret. Informan 4 berargumen bahwa anggapan tersebut lebih banyak didorong oleh narasi yang bersifat subjektif dan tidak memperhitungkan fakta-fakta objektif yang ada.

Lebih jauh, Informan 4 mengaitkan munculnya isu ini dengan ketidaksukaan yang muncul terhadap Gibran Rakabuming Raka, yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Ia menyimpulkan bahwa ketidaksukaan terhadap Gibran merupakan latar belakang utama yang memicu sentimen negatif dan tuduhan keberpihakan yang diarahkan pada Presiden Jokowi. Informan 4 berpendapat bahwa penolakan terhadap Gibran sebagai calon wakil presiden telah menjadi faktor yang memicu berbagai spekulasi dan kritik terhadap Presiden, yang pada gilirannya memperburuk citra politik paslon yang didukung oleh Informan 4.

Informan 4, yang secara terbuka mengakui dukungannya terhadap Paslon 02 dalam Pemilu 2024, merasa bahwa isu pemakzulan dan tuduhan keberpihakan ini cenderung diarahkan secara personal dengan tujuan untuk merusak atau menurunkan kredibilitas paslon yang ia dukung. Ia berpendapat bahwa kampanye negatif dan tuduhan semacam ini lebih merupakan strategi untuk mempengaruhi opini publik dan mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif yang seharusnya dibahas dalam pemilihan. Dalam pandangannya, isu ini bukan hanya tentang politik dan kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana dinamika dukungan politik dapat berkontribusi pada perpecahan dan konflik dalam arena politik.

Informan 7 berpendapat bahwa wacana pemakzulan Presiden Jokowi merupakan manifestasi dari pergolakan politik yang terkait erat dengan Pemilu 2024. Menurut Informan 7, isu ini muncul sebagai respons dari pihak-pihak yang merasa sakit hati dan tidak menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ia berargumen bahwa ketidakpuasan terhadap Gibran, yang merupakan anak Presiden Jokowi, telah memicu reaksi politik yang intens dan wacana pemakzulan sebagai bentuk protes terhadap keputusan tersebut.

Informan 7

“Menurut saya inih dikarenakan adanya pergolakan politik di Pemilu. Ada perbedaan pilihan di Pemilu. Ada yang sakit hati begitu. Masyarakat tidak terima Gibran mencalonkan juga melihat kedekatan pak Jokowi dengan salah satu paslon.”

Isu pemakzulan ini, selain dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pencalonan Gibran, juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang lebih luas, termasuk rivalitas antar partai politik dan kelompok kepentingan. Meskipun ia tidak mendalami berita politik secara mendalam, keterlibatannya dengan media sosial memungkinkan

Informan 7 untuk mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana isu ini berkembang dan bagaimana masyarakat bereaksi terhadapnya. Pandangan tersebut menunjukkan wacana pemakzulan sebagai bagian dari ketegangan politik yang lebih besar, di mana ketidakpuasan terhadap keputusan pencalonan dan rivalitas politik saling berinteraksi untuk mempengaruhi opini publik.

Pada akhirnya dugaan para Informan semakin menguat ketika melihat maraknya upaya pengajuan kepada DPR untuk hak angket mengenai kecurangan Pemilu 2024 yang terutama berasal dari pihak lawan politik paslon 02. Melihat fenomena tersebut, Informan 3 berpendapat bahwa isu ini berkaitan erat dengan adanya ketidakpuasan mendalam terhadap Presiden Jokowi dari sebagian orang yang mungkin sudah memiliki sikap negatif terhadapnya sejak awal. Ia menyimpulkan hal ini berdasarkan pengamatannya bahwa aksi-aksi yang menuntut pemakzulan presiden banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang merupakan pendukung dari calon presiden yang kalah dalam Pemilu 2024. Menurutnya, tuntutan tersebut tampaknya lebih merupakan manifestasi dari ketidakpuasan politik dan kemarahan atas hasil pemilihan yang tidak sesuai dengan harapan mereka, ketimbang sebuah gerakan yang didorong oleh alasan-alasan obyektif mengenai kinerja pemerintah.

Dengan demikian, Informan 3 melihat bahwa latar belakang politik dan hasil pemilu menjadi faktor penting dalam memahami dinamika tuntutan pemakzulan ini, serta menilai bahwa pergeseran atau ketidakstabilan politik yang terjadi mungkin lebih berkaitan dengan rivalitas politik ketimbang dengan isu-isu substansial tentang kepemimpinan Jokowi. Sejak awal munculnya isu, pandangan

seperti ini kerap diungkapkan oleh berbagai pihak, serta tokoh ahli. Salah satu pihak yang menolak keras wacana tersebut, Direktur Humas Haidar Alwi Institute (HAI) Sandri Rumanama menilai bahwa isu pemakzulan Jokowi merupakan bentuk kepanikan kandidat yang takut kalah Pemilu yang akan datang (Suara.com, 2024).

Informan 3

“Ya karna emang nggak suka aja ga si ama pak Jokowi kayaknya. Maksudnya yang teriak-teriak pemakzulan itu kebanyakan dari kubu yang kalah gitu loh. Jadi kayak merasa ini tuh ya karena basicnya ga suka aja ama pak Jokowi. Bukan karena pak Jokowi bermasalah”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sembilan informan, tampak jelas bahwa semua informan menyadari adanya isu pemakzulan Presiden Jokowi, namun mereka memiliki pandangan yang bervariasi mengenai latar belakang munculnya isu tersebut. Informan 1, 2, 5, 6, dan 8 memiliki kesimpulan bahwa adanya kemunduran dalam pemerintahan Jokowi merupakan faktor yang memicu isu pemakzulan. Mereka mengidentifikasi beberapa aspek utama dari kemunduran tersebut, berupa penggunaan dana yang besar untuk kebijakan dan program pemerintah yang dianggap tidak efektif atau tidak adil. Selain itu, keberpihakan Presiden dalam Pemilu 2024 yang dinilai tidak netral, juga menjadi sorotan utama. Perubahan undang-undang yang diduga menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil, serta dugaan praktik politik dinasti atau nepotisme dalam keluarga Presiden, turut memperburuk persepsi publik dan menjadi bagian dari latar belakang isu pemakzulan.

Di sisi lain, informan 3, 4, 7 dan 9 menyimpulkan bahwa latar belakang isu pemakzulan lebih berkaitan dengan dinamika politik selama Pemilu 2024. Mereka menilai bahwa ketidakpuasan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka

sebagai wakil presiden, serta ketidaksukaan terhadap Presiden Jokowi secara keseluruhan, merupakan faktor utama yang memicu wacana pemakzulan. Menurut pandangan tersebut, ketidakpuasan dan ketidakterimaan terhadap hasil Pemilu, serta rivalitas politik yang tajam, telah memperburuk situasi dan meningkatkan intensitas tuntutan pemakzulan.

4.2.2 Pandangan Pembaca Terhadap Isu Pemakzulan Presiden

4.2.2.1 Pemakzulan Presiden Merupakan Wacana Inkonstitusional, dan Keributan Politik yang Tidak Perlu

Dalam pemberitaan Tempo, tanggapan tokoh-tokoh yang kontra terhadap pemakzulan Jokowi diberitakan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menganggap gerakan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Petisi 100 merupakan langkah yang inkonstitusional dan merupakan sebuah gerakan yang mengancam keberlangsungan Pemilu. Yusril mempertanyakan mengapa gerakan itu menyambangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md yang merupakan salah satu calon wakil presiden di pemilu 2024 (Tempo.co, 2024). Luhut Panjaitan juga menyebut wacana ini merupakan keributan politik yang tak perlu (Tempo.co, 2024).

Menanggapi hal tersebut, Informan 1 percaya bahwa masalah atau isu yang sedang dibahas terkait pemakzulan memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi (inkonstitusional). Hal ini menunjukkan bahwa proses pemakzulan atau situasi yang menyebabkan pemakzulan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, pemakzulan adalah sesuatu yang buruk atau negatif dalam konteks pemerintahan. Informan 1 khawatir bahwa jika pemakzulan

terjadi, itu akan menimbulkan ketidakstabilan dan membuat negara tidak berfungsi dengan baik. Ia mencemaskan bahwa situasi ini bisa mengakibatkan negara menjadi kacau, mirip dengan apa yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia ketika terjadi krisis politik yang besar. Dalam hal ini Informan 1 juga mempercayai bahwa isu ini hanyalah upaya dalam membuat keributan politik untuk menjatuhkan lawan politik salah satu pihak.

Informan 4

“Iya inkonstitusional karena kemarin mereka langsung ke Mahfud kan, padahal harusnya melalui DPR lalu mengajukan ke MK. Saya setuju juga ini merupakan memancing keributan...”

Informan 4 dan 9 lebih lanjut menjelaskan bahwa proses yang dilakukan dalam wacana pemakzulan Jokowi tidak sesuai dengan konstitusi. Mereka menilai bahwa langkah yang diambil, yaitu langsung menghadap Mahfud (saat itu merupakan Menkopolkam) tanpa melalui prosedur yang benar di DPR dan MK (Mahkamah Konstitusi), melanggar tata cara yang seharusnya diikuti.

Pandangan para Informan mengenai Pemakzulan Jokowi yang tidak sesuai konstitusi (Inkonstitusional) merujuk pada proses *impeachment* Presiden di Indonesia yang seharusnya melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR bertanggung jawab untuk melakukan proses penuntutan, yang merupakan bagian dari hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR. Hak menyatakan pendapat ini dapat diajukan apabila minimal 25 anggota DPR menyatakan adanya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Selain itu, hak menyatakan pendapat juga dapat diajukan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (MKRI, 2010). Namun apa yang dilakukan oleh Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat lalu tidaklah sesuai dengan prosedur tersebut. Hal inilah yang menyebabkan wacana Pemakzulan Presiden Jokowi dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Informan 9 kemudian juga berasumsi bahwa apa yang dilakukan oleh Petisi 100, yang mana mengajukan Pemakzulan kepada Menkopolkam (Mahfud Md), adalah bentuk atau upaya untuk mencari kerjasama atau kekuatan terhadap pihak lawan politik paslon 02 yang merupakan Ketua Menkopolkam itu sendiri.

Informan 3 menyebutkan bahwa seruan pemakzulan presiden datang dari pihak yang kalah dalam pemilu atau dalam konteks politik. Dia melihat kritik ini sebagai reaksi dari mereka yang tidak puas dengan hasil Pemilu tersebut. Dia mengungkapkan bahwa isu pemakzulan semakin mencuat setelah adanya permintaan untuk pemilu ulang. Informan 3 menganggap bahwa isu pemakzulan mungkin dimunculkan sebagai langkah selanjutnya setelah gagal dalam permintaan pemilu ulang.

Informan 3

“Saya setuju. Karena yang protes itu ya kubu yang kalah. Apalagi isu ini semakin naik setelah inikan minta Pemilu ulang. Setelah itu minta pemakzulan. Kayak ngapain gitu loh.”

Di sisi lain ada Informan 6 yang setuju dan berpendapat bahwa isu pemakzulan dianggap inkonstitusional, namun menolak pendapat bahwa isu ini tidak penting. Dia berargumen bahwa selama suatu isu berhubungan dengan pemerintahan, maka isu tersebut tetap penting. Informan 6 juga percaya bahwa isu ini tidak akan menghambat pemilu. Dia berpendapat bahwa klaim tentang pemakzulan yang dapat mengganggu pemilu hanyalah "cocokologi" atau spekulasi

yang tidak berdasar. Menurutnya, mengaitkan isu pemakzulan dengan calon presiden atau wakil presiden yang akan datang adalah penafsiran yang tidak objektif.

Informan 6

“kalau menurut saya isu ini tuh bener inskonstitusional makanya isunya nggak berlanjut toh. Terus kalau misalnya isu ini akan menghambat pemilu sih enggak ya. Itu paling kayak cuman cocokologi orang-orang yang mengaitkan presiden yang menjabat...”

Sementara itu, Informan 5 dengan keras membantah tanggapan dari pihak-pihak yang menganggap wacana pemakzulan Jokowi adalah Inkonstitusional. Informan 5 menekankan bahwa hak angket, yang merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah tertentu, adalah suatu mekanisme yang konstitusional. Ia berpendapat bahwa selama hak angket dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, maka artinya sudah sesuai dengan hukum. Informan 5 memperingatkan agar tidak menganggap hak angket sebagai bentuk *people power* (kekuatan rakyat) yang tidak resmi. Informan 5 juga menekankan bahwa penting untuk memahami apa yang sebenarnya dianggap inkonstitusional. Ia menyarankan agar pihak-pihak yang kontra mencari informasi lebih lanjut tentang hal ini untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai batasan-batasan konstitusi.

Hak Angket sendiri merupakan perwujudan fungsi pengawasn DPR (Dewan perwakilan rakyat). Melalui hak angket, parlemen memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap kebijakan, tindakan, atau keputusan yang diambil oleh pemerintah. Berdasarkan konstitusi, hak angket diatur dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945, dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 79

Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta peraturan lainnya. Adanya hak angket diharapkan dapat menjaga akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal Pemilu (Hasanah & Setiadi, 2024).

Informan 2 tidak setuju dengan klaim yang mengatakan bahwa wacana pemakzulan ini hanya keributan politik yang tak perlu. Menurutnya, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Dia berpendapat bahwa isu pemakzulan berasal dari pergerakan atau dinamika di dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Ini berarti bahwa proses pemakzulan bukan hanya sebuah tindakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari situasi atau masalah yang sudah ada di pemerintahan. Menurut Informan 2, jika masyarakat merasa bahwa pemakzulan adalah tindakan yang diperlukan, maka itu adalah hal yang sah untuk dipertimbangkan. Artinya, jika mayoritas masyarakat mendukung pemakzulan, maka hal tersebut tidak boleh diabaikan atau dianggap tidak penting oleh pihak-pihak yang menentangnya.

Informan 2

“Menurut pandangan saya, tidak setuju. Karena isu ini sendirikan landasannya dari pergerakan dalam tubuh pemerintah sendiri dan ya ketika masyarakat memandang itu sebagai tindakan yang diperlukan, maka ya sah-sah saja untuk diajukan...”

Sepaham dengan pandangan Informan 2, bahwa wacana ini merupakan ekspresi dan suara dari masyarakat, Informan 8 juga tidak setuju dengan klaim yang mengatakan isu ini tidak diperlukan. “Aku menganggap isu ini perlu karna inikan suara masyarakat. Kayak yang tadi aku bilang kalau ini tuh buat peringatan kalau kesalahan itu harus ditetapkan kalau ini tuh salah gitu.”

Informan 8 merasa bahwa isu ini penting karena merupakan refleksi dari suara atau aspirasi masyarakat. Menurutnya, pemakzulan bisa dianggap sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau tuntutan masyarakat terhadap tindakan presiden. Dia berpendapat bahwa isu pemakzulan berfungsi sebagai peringatan bahwa kesalahan dalam pemerintahan harus diakui dan diperbaiki. Dalam pandangannya, pemakzulan adalah langkah untuk menunjukkan bahwa tindakan atau keputusan yang salah harus ditindaklanjuti dan tidak dibiarkan begitu saja.

4.2.2.2 Pemakzulan Presiden Merupakan Wacana yang Perlu Dilakukan Akibat Kemunduran dalam Pemerintahan

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti memiliki pandangan yang berbeda dengan pihak yang kontra wacana pemakzulan Jokowi. Beliau menguraikan unsur-unsur pemakzulan yang dapat dikenakan kepada Presiden Jokowi berupa kemunduran dalam pemerintahan beliau, termasuk tanggapan kontroversial Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dalam Pemilu (Tempo.co, 2024). Demo mahasiswa dalam hal ini juga manyuarakan tuntutan untuk memakzulkan Presiden Jokowi, dengan menyebutkan sejumlah isu berupa kecurangan pemilu, korupsi, kolusi dan nepotisme, agraria, monopoli sumber daya alam, lingkungan, biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal, kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender, kekerasan aparat dan produk hukum bermasalah (Tempo.co, 2024).

Informan 5 setuju mengenai dugaan kemunduran yang terjadi di pemerintahan Jokowi. Informan 5 menganggap bahwa kemunduran yang dirasakan

dalam pemerintahan Jokowi adalah hasil dari analisis mendalam oleh para ahli yang mengidentifikasi berbagai masalah serius yang mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Analisis ini mencakup berbagai faktor, seperti penyalahgunaan bantuan sosial (bansos), kecurangan dalam Pemilu, nepotisme, dan masalah-masalah demokrasi lainnya. Hasil analisis inilah yang telah memicu kemarahan di kalangan mahasiswa dan masyarakat, yang kemudian mendorong para akademisi untuk menyampaikan tuntutan. Hal ini mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap kemunduran demokrasi yang dianggap sebagai dampak dari praktik-praktik buruk dalam pemerintahan.

Informan 5

“... Menurut saya isu ini menjadi perhatian serius dimana para cendekiawan dan juga para orang-orang terpelajar telah mendalami isu ini sehingga mereka mengemukakan pendapat sampai bahkan menyampaikan suatu tuntutan...”

Informan 8 juga menilai bahwa kemunduran dalam pemerintahan Jokowi terlihat dari cara undang-undang dibentuk dan diberlakukan. Ia merasa bahwa beberapa UU dikeluarkan secara mendadak dan tanpa melibatkan partisipasi atau masukan dari masyarakat secara memadai. Hal ini mengakibatkan UU yang diberlakukan terasa seperti dipaksakan tanpa adanya konsultasi atau input dari berbagai lapisan masyarakat. Sependapat dengan Informan 8, Informan 2 memiliki pandangan bahwa kemunduran di pemerintahan Jokowi mencerminkan kekhawatiran terhadap proses demokrasi yang melibatkan pembuatan undang-undang (UU). Menurut Informan 2, demokrasi tidak hanya berlaku selama pemilihan umum, tetapi juga dalam proses pembuatan UU yang harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Ia berpendapat bahwa UU seharusnya

mencerminkan kepentingan dan aspirasi mayoritas masyarakat. Dengan kata lain, Informan 2 mengkritik kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan UU sebagai indikasi adanya kemunduran dalam demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi.

Informan 2

“Ya saya setuju. Karena bicara mengenai demokrasi bukan hanya terjadi ketika pemilihan saja tetapi saat terbentuknya UU. Kembali lagi UU itu berawal dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri juga. Harusnya mayoritas masyarakat terlibat dalam pembentukan UU.”

Berbeda pandangan dengan tiga informan sebelumnya, Informan 3 dan 9 justru tidak setuju dengan dugaan terhadap kemunduran yang terjadi di pemerintahan Jokowi. Mereka menyatakan bahwa hingga saat ini, mereka belum menemukan alasan yang masuk akal atau meyakinkan terkait upaya pemakzulan Presiden Jokowi. Mereka merasa bahwa tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap Jokowi dan para pejabat pemerintahannya tidak terbukti secara jelas. Dalam hal ini Informan 3 berargumen meskipun berbagai pihak, termasuk menteri-menteri seperti Bu Risma, Bu Sri Mulyani, dan staf-staf Presiden Jokowi telah dipanggil untuk dimintai keterangan, tidak ada bukti yang mendukung tuduhan-tuduhan tersebut. Ini menunjukkan bahwa menurut Informan 3, proses pemakzulan tampaknya tidak didasarkan pada bukti yang kuat atau substansial.

Informan 3

“Kalau saya sendiri sih sampai sekarang masih belum menemukan alasan mereka memakzulkan yang masuk di akal. Karena dari tuduhan-tuduhan dan apa yang mereka ajukan itu semua tidak terbukti.”

Informan 9 lebih lanjut menjelaskan bahwa, tuduhan terkait penurunan indeks demokrasi tidak sesuai dengan kenyataannya. Demokrasi di Indonesia menurut Informan 9 masih terjaga dengan kenyataan Presiden Jokowi yang tetap mengikuti masa tugas, tidak berusaha mencoba untuk melanjutkan periode kepemimpinan sampai yang ketiga. Ia juga melihat bahwa dengan adanya demonstrasi dan Pemilu, sudah cukup menjelaskan bahwa negara Indonesia masih memiliki demokrasi yang cukup baik.

Selanjutnya Informan 4 juga mengungkapkan bahwa tuduhan mengenai kemunduran atau penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks pemilihan umum tidak berdasar. Ia mengakui mengenai adanya pernyataan dari Jokowi tentang hak presiden untuk memilih, namun ia menilai bahwa Jokowi tidak secara terang-terangan terlibat dalam kampanye politik untuk pihak tertentu. Informan 4 berpendapat bahwa Jokowi tidak secara jelas melakukan kampanye untuk pihak tertentu atau secara aktif memihak calon tertentu dalam Pemilu. Informan 4 lalu menjelaskan bahwa meskipun ada klaim bahwa Jokowi memihak ke calon tertentu, ini hanya merupakan asumsi publik dan belum terbukti secara konkret. Ia menyoroti bahwa Jokowi pernah berpose dengan simbol tertentu, tetapi hal ini dipandang sebagai sesuatu yang bisa ditafsirkan atau dikaitkan dengan berbagai cara oleh media, dan belum ada bukti yang jelas tentang keterlibatan aktifnya dalam kampanye.

Informan 4

“Engga setuju sih. Mungkin yang dibahas dalam hal inikan kemunduran karena ada statement dari Jokowi bahwa presiden bisa memilih kan, sementara bisa dilihat lagi apakah presiden melakukan kampanye sebagai warga atau presiden yang mungkin bisa disalahkan...”

Menanggapi dugaan kemunduran di pemerintahan Jokowi, Informan 7 terutama tidak setuju dengan anggapan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia. Ia berpendapat bahwa keberadaan Pemilu dan adanya aksi demonstrasi dari mahasiswa menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Menurutnya, kegiatan seperti Pemilu dan kebebasan berekspresi, termasuk melalui demonstrasi, adalah tanda bahwa demokrasi masih berfungsi secara efektif. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat tetap aktif dalam mengawasi dan menyuarakan pendapat mereka, yang merupakan bagian penting dari sistem demokrasi.

Informan 7

“Enggak sih. Dengan adanya Pemilu dan ada demo-demo dari mahasiswa itu sudah contoh dari adanya demokrasi yang baik yah. Jadi enggak sih menurut saya. Nggak ada kemunduran.”

Berbeda dengan pandangan Informan-informan sebelumnya yang sepenuhnya menolak dugaan pelanggaran Presiden Jokowi, Informan 1 justru mengakui memang ada tindakan nepotisme yang dituduhkan, namun ia merasa hal tersebut belum fatal untuk menjadi alasan pemakzulan seorang Presiden. Informan 1 berpandangan bahwa selama dua periode pemerintahan Jokowi, banyak hal positif yang telah dicapai, termasuk pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa meskipun ada isu nepotisme, hal tersebut tidak harus menjadi fokus utama jika dibandingkan dengan kontribusi positif yang diberikan pemerintah selama masa jabatannya.

Informan 6

“Saya kurang setuju. Yah memang tindakan nepotisme, atau KKN sangat dilarang di republik kita. Cuma secara di

pemerintahan Jokowi kita melihat tidak ada yang terlalu menonjol dalam hal tindakan nepotisme...”

Informan 6 dalam hal ini juga berpandangan demikian. Informan 6 merasa bahwa kemunduran yang diklaim dalam pemerintahan Jokowi tidak signifikan. Ia berpendapat bahwa meskipun ada tuduhan mengenai nepotisme, korupsi, dan masalah lainnya, tidak ada kemunduran yang mencolok atau signifikan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Praktik nepotisme dan korupsi bukanlah hal baru di pemerintahan Indonesia. Ia berpendapat bahwa masalah-masalah tersebut juga terjadi di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dan tidak eksklusif pada masa pemerintahan Jokowi.

Informan 6 memiliki paham bahwa pandangan mengenai tingginya tingkat nepotisme dan korupsi dalam pemerintahan Jokowi mungkin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Ia mengamati bahwa dengan adanya internet dan media sosial, informasi tentang tindakan-tindakan negatif atau kontroversial lebih mudah tersebar dan viral. Hal ini dapat menyebabkan kesan bahwa terdapat lebih banyak masalah dalam pemerintahan saat ini dibandingkan dengan sebelumnya, padahal masalah-masalah tersebut mungkin sudah ada sejak lama.

4.2.2.3 Kemungkinan Wacana Pemakzulan Jokowi Dapat Terjadi

Calon Wakil Presiden Mahfud Md mengatakan bahwa dugaan kecurangan Pemilu 2024 dapat ditangani melalui jalur politik dengan mengajukan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia menjelaskan bahwa hak angket tersebut dapat mengenakan sanksi pada Presiden, termasuk pemakzulan atau impeachment. Pernyataan dalam berita Tempo tersebut memberikan pandangan bahwa ada peluang dalam pelaksanaan wacana pemakzulan Jokowi. Usulan penggunaan hak

angket untuk mengungkap kecurangan dalam Pemilu 2024 muncul karena adanya dugaan kecurangan dan ketidaknetralan, terutama dalam Pilpres. Hal ini dianggap melanggar asas Pemilu yang mengutamakan kejujuran dan keadilan, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Diharapkan, hak angket dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu, selain melalui jalur hukum.

Menanggapi pernyataan tersebut, Informan 5 setuju bahwa pemakzulan bisa saja terjadi jika hak angket dari DPR diberlakukan dan prosesnya sesuai dengan undang-undang dan konstitusi yang berlaku. Dengan kata lain, hak angket dapat menjadi mekanisme yang sah untuk menyelidiki isu-isu yang mungkin mengarah pada pemakzulan. Hak angket adalah salah satu alat pengawasan yang dimiliki DPR. Informan 5 menjelaskan bahwa hak angket berfungsi sebagai kewajiban DPR untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan eksekutif, termasuk pemerintahan presiden. “Mungkin saja kalau hak angket dari DPR itu diberlakukan dan prosesnya sesuai dengan UU dan konstitusi yang berlaku.”

Informan 5

”Menurut saya isu ini menjadi perhatian serius dimana para cendekiawan dan juga para orang-orang terpelajar telah mendalami isu ini sehingga mereka mengemukakan pendapat sampai bahkan menyampaikan suatu tuntutan...”

Hak angket memungkinkan DPR untuk menyelidiki dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dianggap penting. Ketika hak angket diberlakukan, DPR akan melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada. Ini termasuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan kontroversial, dugaan pelanggaran undang-undang, dan praktik nepotisme yang mungkin terjadi. Jika terdapat bukti bahwa

kebijakan presiden atau tindakan pemerintah melanggar hukum atau menimbulkan masalah serius, hak angket dapat menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut. Informan 5 mengindikasikan bahwa hasil dari hak angket dapat menjadi acuan untuk proses pemakzulan, jika ditemukan bahwa tindakan presiden atau kebijakan pemerintah memang melanggar hukum atau menciptakan masalah serius yang memerlukan penanganan.

Informan 2

“Menurut saya adanya pemakzulan sendirikan karena adanya dasar hukum yang mudah diubah-ubah juga kurangnya perhatian dari pemerintah bahwasanya dasar hukumnya ini juga perlu dari masyarakat...”

Informan 2 mengakui bahwa hak angket memang dapat berujung pada pemakzulan, tetapi ia juga mengekspresikan pesimisme tentang efektivitasnya. Ia merasa bahwa dengan kondisi pemerintahan yang ada, proses pemakzulan melalui hak angket mungkin tidak berjalan dengan baik atau efektif, seperti yang terlihat dari situasi sebelumnya. Menurut Informan 2, kesulitan dalam melakukan pemakzulan terkait dengan bagaimana peraturan dan hukum ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki pengaruh besar dalam pembentukan peraturan, sehingga membuat mungkin akan membuat proses pemakzulan menjadi lebih rumit.

Hal serupa telah diungkapkan oleh penelitian berjudul “Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia” yang dilakukan oleh Nuranida dan Wicipto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelidikan yang dilakukan melalui hak angket, sebagai bagian dari tindakan ketatanegaraan, menghasilkan rekomendasi terbatas pada perubahan peraturan pemilu yang ada

(termasuk perbaikan undang-undang yang berlaku) atau menjadi bukti dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, kemungkinan penggunaan hak angket untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sangat kecil (Hasanah & Setiadi, 2024).

Informan 4

“Menurutku sih belum ada hal yang fatal yang sampe bisa membuat pak Jokowi dimakzulkan, tapi mungkin dimakzulkan ya mungkin-mungkin aja. Bisa-bisa aja karena inikan suara rakyat. Kalau semisal rakyat serentak ingin pak Jokowi dimakzulkan ya sah-sah saja...”

Meskipun menganggap belum ada faktor-faktor yang dapat memakzulkan Presiden Jokowi, Informan 4 mengakui bahwa pemakzulan masih mungkin terjadi. Ia menekankan bahwa keputusan untuk memakzulkan presiden pada akhirnya tergantung pada suara rakyat. Jika rakyat secara serentak menginginkan pemakzulan, hal tersebut bisa saja terjadi, sesuai dengan prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat.

Informan 6

“Kalau saya pribadi, sesuai dengan peraturan pemakzulan itu sendiri, kayaknya belum memungkinkan. Karena pemakzulan itu kan ada beberapa tahap yang harus dilalui ya...”

Seperti Informan 4 yang menganggap belum ada faktor-faktor dalam memakzulkan Jokowi, Informan 6 dan Informan 9 merasa bahwa proses pemakzulan tidak mungkin terjadi dalam kondisi saat ini. Informan 6 berpendapat bahwa, sesuai dengan peraturan yang ada mengenai pemakzulan, saat ini belum memungkinkan untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Ada prosedur dan tahapan tertentu yang harus dilalui sebelum pemakzulan dapat dilakukan. Untuk pemakzulan dapat terjadi, presiden harus melakukan pelanggaran serius terhadap

undang-undang atau konstitusi. Namun, menurut mereka hingga saat ini Presiden Jokowi belum terbukti melanggar hal-hal yang menjadi dasar pemakzulan.

Informan 1

“menurut saya pastinya sudah ada UU yang mengatur hal tersebut, artinya tidak segampang itu untuk mengajukan pemakzulan Presiden. Harus ada sesuatu yang fatal agar pemakzulan ini bisa dilakukan...”

Selanjutnya, Informan 1 berpendapat bahwa pemakzulan bukanlah proses yang sederhana. Ada prosedur hukum yang panjang dan kompleks yang harus dilalui, termasuk persetujuan dari berbagai pihak dan lembaga. Ia juga menyebutkan bahwa menggunakan hak angket untuk memakzulkan presiden akan menghadapi banyak kesulitan dan hambatan, menegaskan bahwa proses tersebut sangat sulit dan memerlukan usaha yang signifikan. Menurutnya, banyaknya opini atau klaim yang viral mengenai pemakzulan berasal dari tokoh politik atau pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintahan Jokowi. Perdebatan ini dipicu oleh ketidaksukaan terhadap Jokowi daripada oleh fakta-fakta substansial.

Sementara itu Informan 3 mengatakan bahwa wacana ini tidak memiliki kemungkinan untuk terjadi. “Kayaknya kalau dari rapat kemarin tuh, engga terbukti ada faktor pemakzulan buat pak Jokowi. Jadi ya enggaklah ya.” Pandangan ini ia katakan oleh sebab setelah rapat atau proses evaluasi yang dilakukan, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung adanya faktor-faktor yang dapat menyebabkan pemakzulan Presiden Jokowi. Dengan kata lain, tuduhan atau alasan yang diajukan untuk pemakzulan tidak terbukti secara substansial.

Informan 7

“Menurut saya nggak sih. Kan mayoritas masyarakat Indonesia, sebanyak 70% suka sama Jokowi...”

Setuju bahwa wacana ini tidak mungkin terjadi, Informan 7 menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia, sekitar 70%, merasa puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden. Dukungan publik yang tinggi ini, menurutnya, menunjukkan bahwa tidak ada alasan kuat untuk memakzulkan Jokowi. Informan 7 juga tidak setuju dengan dugaan bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam nepotisme. Ia berargumen bahwa nepotisme—yaitu adanya hubungan keluarga dalam posisi-posisi penting—bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Ia menyebutkan bahwa sanak-saudara dari pemerintah sebelumnya juga memiliki hak untuk mencalonkan diri atau maju dalam politik, sehingga fenomena ini bukanlah sesuatu yang luar biasa atau khusus untuk pemerintahan Jokowi.

Informan 8

“Menurutku sih nggak bakal bisa diturunkan, karna suara yang nuntut pemakzulan itu nggak sebanyak suara yang *medback up* presiden Jokowi. Jadinya menurutku jatuhnya demo kemarin itu cuman sementara aja karna panas-panasnya pemilu aja gitu.”

Memiliki pemikiran yang sama dengan Informan 7, bahwa dukungan mayoritas masyarakat Indonesia ada pada pihak Jokowi, membuat informan 8 memiliki pandangan bahwa pemakzulan presiden Jokowi tidak mungkin dapat terjadi. Namun, Informan 8 sendiri mendukung wacana pemakzulan Jokowi berbeda dengan Informan 7 yang terang-terangan tidak menyukai ide pemakzulan tersebut. Informan 8 menyayangkan bahwa meskipun demonstrasi dan protes dilakukan untuk mendukung wacana pemakzulan, hasilnya mungkin menjadi sia-sia. Menurutnya, demonstrasi yang menggaungkan pemakzulan mungkin tidak mencapai tujuan yang diinginkan karena kurangnya dukungan dari mayoritas masyarakat dan keberatan terhadap proses yang terlibat. Ia menganggap bahwa

tanpa adanya perubahan signifikan dalam pandangan publik atau adanya bukti-bukti yang kuat, demonstrasi tersebut tidak akan efektif dalam mengubah situasi politik.

4.2.2.4 Penerimaan Pembaca Terhadap Isu Pemakzulan Jokowi

Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memunculkan beragam reaksi dari masyarakat yang mencerminkan kompleksitas pandangan dan kepentingan individu. Respon terhadap isu ini tidak terlepas dari latar belakang sosial, ideologi politik, serta kepentingan pribadi yang dimiliki masing-masing orang. Hal ini juga ditunjukkan oleh kedelapan informan yang telah diwawancarai.

“Saya memandang bahwa saya sebagai masyarakat juga mahasiswa, saya sangat setuju untuk adanya pemakzulan Jokowi ini,” Informan 2 menyetujui pelaksanaan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Sebagai mahasiswa yang aktif terlibat dalam berbagai forum kemahasiswaan, terutama dalam diskusi mengenai isu-isu sosial dan politik, ia memandang bahwa isu ini merupakan salah satu bentuk ekspresi suara masyarakat. Dalam konteks ini, pelaksanaan isu tersebut memiliki makna penting karena mencerminkan upaya penegakan keadilan.

Menurutnya, sebagai mahasiswa, keterlibatan dalam diskusi-diskusi semacam ini tidak hanya memberikan ruang untuk mengungkapkan berbagai pandangan, tetapi juga berperan krusial dalam mendorong perubahan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial mendapat perhatian yang layak. Dengan demikian, isu tersebut bukan sekadar wacana, melainkan bagian integral dari proses sosial dan politik yang bertujuan mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Informan 5 yang juga terlibat aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa juga memiliki pandangan yang sama dengan Informan 2. Menurut Informan 5, isu pemakzulan Presiden Jokowi adalah topik yang sangat penting dan perlu dikawal dengan cermat oleh berbagai pihak. Namun, ia menekankan bahwa tidak boleh ada tindakan sembarangan dalam memanggil presiden melalui hak angket DPR. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang mendalam, bukan semata-mata karena adanya keberpihakan politik. Informan 5 menegaskan bahwa pemakzulan Presiden tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan motif politik semata. Hak angket DPR, yang memungkinkan anggota legislatif untuk menyelidiki tindakan pemerintah, harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh menjadi alat untuk tujuan-tujuan politik yang tidak sah. Keputusan untuk memanggil presiden atau mengambil langkah-langkah hukum harus didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan objektif, serta bukti yang jelas dan substansial.

Informan 5

“Menurut saya isu ini merupakan isu yang harus dikawal bersama. Tetapi jangan sembarangan kita bisa memanggil presiden melalui hak angket itu karena disisi lain harus ada identifikasi khusus. Bukan hanya karena keberpihakan dalam politik maka hal itu dapat dilakukan oleh DPR...”

Selanjutnya, Informan 8 percaya bahwa isu pemakzulan adalah cerminan dari suara masyarakat yang ingin mengungkapkan ketidakpuasan atau kekhawatiran mereka terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Ia merasa bahwa ada pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang perlu terlibat dalam mengawasi dan mendukung isu ini untuk memastikan bahwa perhatian publik terfokus pada masalah tersebut. Tujuan dari pengawalan isu ini adalah untuk

menyebarkan kesadaran (awareness) tentang apa yang dianggap sebagai masalah serius, agar masyarakat dan pembuat kebijakan lebih memperhatikan dan mempertimbangkan isu ini. Informan 8 menyatakan bahwa meskipun masa jabatan Presiden Jokowi hampir berakhir, kesalahan yang dilakukannya harus tetap diakui dan diberi konsekuensi. Ia merasa bahwa tidak seharusnya ada pengecualian terhadap kesalahan hanya karena periode kepemimpinan yang tinggal sedikit. Menurutnya, akuntabilitas dan konsekuensi terhadap tindakan yang salah harus tetap ditegakkan, tanpa memandang kapan masa jabatan seorang pemimpin akan berakhir.

Informan 8

“menurutku sebenarnya ini itu suara masyarakat. Mungkin beberapa pihak yang sadar yang punya power gitu perlu mengawal isu ini. Supaya spread awareness gitu. Soalnya pasti isu ini bisa jadi bahan evaluasi lah...”

“Meskipun periode beliau sebentar

Sementara itu, di sisi lain ada Informan 6 yang mengungkapkan ketertarikannya dengan isu, namun ia menolak atau tidak setuju dengan pemakzulan tersebut karena ia merasa bahwa syarat-syarat atau dasar hukum yang diperlukan untuk melakukannya belum terpenuhi. Ketertarikan ini timbul dari rasa ingin tahunya terhadap hal-hal yang jarang terjadi dalam ranah politik.

Menurut Informan 6, pemakzulan harus didasarkan pada bukti dan prosedur yang lengkap dan jelas. Jika syarat-syarat hukum dan konstitusi yang mengatur proses pemakzulan tidak dipenuhi, maka isu ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa meskipun isu ini menarik, tindakan pemakzulan harus didasarkan pada alasan yang valid dan prosedur yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Informan 6

“Pandangan saya diawal, saya sangat tertarik sih sebenarnya cuman saya nggak terlalu nyari. Kenapa saya tertarik karena isu pemakzulan di indoensia itukan jarang diangkat ya. Jadi mungkin begitu ada yang menggaungkan isunya saya jadi kayak “ada apa nih? Terkait isu ini saya kontra sih, karena syarat-syarat untuk pemakzulan nya sendiri itu belum lengkap.”

Informan 7 mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap adanya isu pemakzulan yang muncul di tengah-tengah periode Pemilu. Ia merasa bahwa kemunculan isu ini tidak tepat atau tidak sesuai dengan konteks politik saat ini, mengingat pentingnya pemilihan umum sebagai fokus utama. Ketidaksetujuan ini menunjukkan bahwa Informan 7 menganggap isu pemakzulan sebagai gangguan atau faktor yang tidak relevan dalam konteks Pemilu yang sedang berlangsung.

Informan 7 menyebutkan data survei yang menunjukkan bahwa 70% masyarakat Indonesia puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan angka kepuasan yang tinggi ini, ia merasa bahwa munculnya isu pemakzulan tidak sejalan dengan pandangan mayoritas masyarakat. Informan 7 kemudian juga mengekspresikan kebingungannya tentang motivasi di balik isu pemakzulan. Ia bertanya-tanya apakah isu tersebut timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap Presiden Jokowi secara pribadi atau karena ada upaya untuk merugikan pasangan calon (paslon) 02. Informan 7 merasa bahwa ada ambiguitas dalam hubungan antara Presiden Jokowi dan paslon 02, dan ia menuntut kejelasan tentang apakah isu ini memang berkaitan langsung dengan Jokowi atau hanya digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan politik.

Informan 7

“Saya pribadi nggak suka sih ada isu ini. Kenapa ditengah-tengah Pemilu ini ada muncul isu seperti itu. Apalagi kita tahu kan menurut survei 70% masyarakat Indonesia menyukai Jokowi,

puas sama Jokowi. Jadi kenapa harus protes ini atau itu? Apakah isu ini karena Jokowi atau cuman mau jatuhin paslon 02 aja? Kayak apa hubungannya Jokowi sama paslon 02 gitu.”

Informan 9 juga merasa tidak setuju dengan isu pemakzulan terhadap Jokowi. Menurutnya, sejak dulu isu-isu seperti ini memang kerap dilayangkan kepada beliau. Namun tidak ada faktor yang membuktikan beliau dapat dimakzulkan. Dengan munculnya isu di saat menjelang Pemilu, Informan memiliki dugaan kuat bahwa isu ini memang untuk memicu keributan dan menjatuhkan lawan politik.

Informan 9

”Saya kontra ya. Saya merasa tidak setuju dengan isu ini, karena ya seperti yang saya ungkapkan tadi. Sejak dulu memang kerap kali ada isu-isu yang menyerang Jokowi seperti ini dan balik lagi tidak ada yang terbukti hingga sekarang.”

Informan 3 justru melihat isu ini sebagai sebuah bentuk kerusuhan yang berpotensi mengganggu ketenangan dan stabilitas masyarakat. Menurutnya, konflik semacam ini tidak hanya akan memperburuk keadaan, tetapi juga mengancam terciptanya situasi yang damai dan kondusif. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa di penghujung masa jabatan Jokowi, alih-alih terlibat dalam perselisihan atau upaya untuk menurunkan kepemimpinan beliau, masyarakat seharusnya lebih fokus pada pemikiran ulang mengenai dampak dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Informan 3 berpendapat bahwa memikirkan kembali keputusan atau pendapat yang melibatkan penggulingan kepemimpinan akan lebih konstruktif jika dilakukan dengan pertimbangan matang dan berdasarkan pada upaya untuk menjaga stabilitas negara, bukan hanya pada emosi atau ketidakpuasan semata.

Informan 3

“Duh damai-damai aja nggasih. Maksudnya tuh pak Jokowi ini tuh uda mau selesai. Ngapain diributin lagi, biarlah beliau

menjabat sampai selesai. Kecuali dia masih menjabat setahun dua tahun lagi, barulah terserah mau diributin.”

Informan 4 juga berpikiran bahwa politik sering kali menyebabkan ketegangan dan perpecahan di masyarakat, dengan pihak-pihak yang pro dan kontra. Ia berpendapat bahwa tujuan dari isu pemakzulan dan tuduhan terhadap Presiden Jokowi adalah untuk merusak kredibilitas paslon 02, dengan harapan bahwa hal ini akan mempengaruhi pemilih dan mengurangi dukungan terhadap paslon tersebut. Ia mempertegas pandangannya bukan semata-mata karena ia mendukung paslon 02, melainkan sudah berdasarkan apa yang ia amati bahwa ada cerita atau berita hoaks seperti halnya tuduhan mengenai Presiden Jokowi yang menggunakan bantuan sosial (bansos) untuk mendukung paslon 02 adalah tidak benar dan merupakan hoaks. Informan 4 berpendapat bahwa isu tersebut adalah rekayasa atau manipulasi informasi yang bertujuan untuk membuat gaduh dan menggiring opini publik ke arah yang tidak benar.

Informan 4

“Kalau pandanganku sih, isu ini hanya untuk menjelekkan paslon 02. Pak Jokowi tidak menggunakan fasilitas negarakan untuk mengkampanyekan atau mendukung 02. Orang hanya mengasumsikan saja kalau ada privileg Jokowi dalam keuntungan 02 ini...”

“Kalau saya sih pastinya kontra ya, satu sisi karena saya mendukung paslon 02. Tapi bukan semata-mata karena fanatik 02 saya jadi menolak isu ini, bukan begitu. Karena memang menurutku pak Jokowi masih dalam batasannya...”

Berbeda dengan Informan lain yang dapat memosisikan dirinya dalam menerima isu sebagai pihak pro atau kontra, Informan satu memilih untuk bersikap netral. Informan 1 memiliki pandangan bahwa isu ini merupakan sebuah fenomena yang wajar terjadi ketika mendekati pemilu. Di akhir masa pemerintahan,

masyarakat biasanya mulai menyuarakan opini dan penilaian mereka terhadap pemerintah yang akan segera digantikan. Pada saat-saat seperti inilah, seringkali muncul beragam pendapat yang pro dan kontra terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Opini ini bisa mencerminkan penilaian atas kinerja pemerintah selama masa jabatannya, serta harapan dan kekhawatiran mengenai calon pengganti yang akan datang. Dinamika ini tidak hanya mencerminkan kepuasan atau ketidakpuasan publik, tetapi juga menggambarkan harapan masyarakat akan arah dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah baru. Ia juga merasa, isu ini ada kaitannya dengan persaingan politik dalam Pemilu. Ada upaya yang dilakukan salah satu pihak untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Informan 1

“Saya kira isu-isu seperti ini pasti sering terjadi dikarenakan ya ditahun ini kan kita sedang berada pada masa-masa tahun politik yang mana dekat dengan pemilihan umum. Dikarenakan adanya pro dan kontra terhadap pemerintahan, dan ingin menjatuhkan lawan politik.”

“Kalau dari saya sendiri hanya bersikap netral saja. Saya hanya memperhatikan perkembangan isu dari media. Kalau memposisikan diri ke pro atau kontra, saya memilih netral saja.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para Informan, ditemukan berbagai pandangan dan penerimaan terhadap isu Pemakzulan Presiden Jokowi. Dalam posisi *dominan hegemonic*, yang mana setuju terhadap wacana pemakzulan Jokowi terdapat 3 Informan, yaitu Informan 2, 5 dan 8. Informan 2 dan 5 memiliki latar belakang yang sama dimana keduanya aktif dalam mengikuti organisasi kemahasiswaan. Yang mana melalui organisasi tersebut keduanya mengaku cukup mengikuti dan mendalami perkembangan dari isu pemakzulan Jokowi.

Informan 2, sebagai seorang mahasiswa hukum yang kerap mengikuti kegiatan dari organisasi mahasiswa (GMNI) kerap mendiskusikan isu ini dalam forum organisasi tersebut. Ia secara tegas menyikapi isu ini sebagai sebuah isu yang harus dikawal dan ditegakkan, karena ia percaya dalam hal ini Presiden Jokowi jelas-jelas bersalah atas intervensi yang ia lakukan dalam Pemilu. Informan 5 yang juga merupakan mahasiswa hukum, memiliki pengalaman bergerak aktif dalam penegakan keadilan terhadap isu-isu sosial yang terjadi (demonstrasi), juga memiliki pandangan yang serupa bahwa isu ini adalah wacana yang perlu dilakukan. Ia menyoroti turunnya indeks demokrasi di Indonesia dan banyaknya kecurangan dalam Pemilu 2024.

Informan 5 secara aktif melakukan riset terhadap perkembangan isu ini, menjelaskan bahwa isu ini perlu diperhatikan dan jangan sampai ada campur aduk dalam penegakan isu pemakzulan dan upaya untuk menjatuhkan lawan politik seperti yang menjadi dugaan orang-orang. Meskipun Informan 8 memiliki latarbelakang yang berbeda dengan Informan 2 dan 5, ia juga setuju terhadap wacana pemakzulan ini. Informan 8 melihat bahwa isu ini merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan oleh Presiden Jokowi, oleh sebab keberpihakan yang ia lakukan dan juga karena kebijakan yang ia lakukan sendiri tanpa persetujuan masyarakat Indonesia.

Dalam posisi *negotiated* adalah Informan 1. Informan 1 adalah satu-satunya Informan yang menerima secara terbuka pro dan kontra yang terjadi dan yang menjadi dugaan terhadap isu Pemakzulan Jokowi. Ia mengaku netral terhadap isu ini dimana ia tidak mau menempatkan posisinya apakah ia setuju atau tidak setuju.

Ia setuju terhadap dugaan nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi, namun ia merasa nepotisme yang dilakukan Presiden belum merupakan faktor besar yang dalam memakzulkan beliau. Ia juga merasa kalau isu ini benar digaungkan oleh sebab pergolakan politik atau ada kaitannya dengan persaingan antara paslon capres-cawapres. Secara keseluruhan ia merasa bahwa isu ini wajar terjadi di akhir pemerintahan dan di masa-masa Pemilu. Ia tidak terlalu berpikir isu ini sebagai sesuatu yang perlu dibesarkan atau dipertimbangkan.

Di posisi *oppositional*, yang mana menolak secara tegas wacana pemakzulan ini adalah mayoritas, berupa Informan 3, 4, 6, 7 dan 9. Informan 3 dan Informan 9 sejak awal memiliki pandangan tidak suka terhadap adanya isu ini. Mereka menilai isu ini membuat keributan dan kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Informan 4 juga melihat isu ini sebagai sebuah tuduhan tak berdasar yang dilayangkan oleh lawan politik paslon 02, untuk menjatuhkan kredibilitas pasangan tersebut. Informan 7 yang mengaku memiliki sikap menghargai dan menyukai kepemimpinan Presiden Jokowi juga merasa isu ini tidak relevan. Ia melihat prestasi Jokowi, melalui survey kepuasan yang mencapai 70% sudah cukup menunjukkan bagaimana Jokowi di mata masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Sementara itu Informan 6, meskipun merupakan mahasiswa hukum seperti halnya Informan 2 dan 5, ia justru tidak melihat ada faktor-faktor yang dapat mendasari pemakzulan Jokowi. Meski begitu ia tetap memandang isu ini sebagai suara masyarakat yang tidak masalah untuk disuarakan.

4.2.3 Pemaknaan Pembaca Tentang Media Tempo

Hall menjelaskan bahwa *encoding* media membantu kita memahami bagaimana produk media memengaruhi audiens. Namun, hanya mempelajari *encoding* tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana media menciptakan makna. Produk mungkin mengkodekan makna, tetapi audiens tidak selalu memahami makna tersebut dengan cara yang sama. Hall juga berpendapat bahwa *decoding* media tidaklah mudah. Media menghasilkan berbagai cara pembacaan karena media biasanya menggunakan tanda visual.

Pemberitaan mengenai pemakzulan Presiden Jokowi muncul sejak tahun 2023, lalu memanas kembali di awal tahun 2024 sampai beberapa saat setelah Pemilu. Media massa memiliki peran krusial dalam menyajikan informasi terkini dan mendetail tentang isu pemakzulan serta dampaknya terhadap pemerintah dan masyarakat. Seluruh Informan setuju bahwa isu ini perlu terus diberitakan oleh media untuk menyebarkan sikap awas juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersuara mengenai keinginan atau tuntutan terkait hal tersebut.

Isu pemakzulan presiden bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Tempo sebagai media massa perlu terus memantau dan memberikan laporan yang akurat dan objektif mengenai perkembangan pemakzulan, termasuk alasan-alasan di baliknya, proses hukum yang terlibat, serta reaksi dan pandangan dari berbagai pihak. Berikut hasil pemaknaan Informan terhadap pemberitaan Tempo mengenai Pemakzulan Jokowi.

4.2.3.1 Tempo Sebagai Media yang Kritis Terhadap Pemerintah

Sebagai media berita yang dikenal dengan sikap kritisnya, Tempo telah mengambil peran sebagai pengawas pemerintah dan penjaga kebebasan pers dengan jurnalisme kritis dan investigatifnya, Seluruh Informan mengakui bahwa mereka mengenal dan mengetahui Tempo sebagai media yang kritis terhadap Pemerintah. Melihat hal tersebut, Informan 9 menjelaskan bahwa memang media pada hakikatnya adalah representasi suara masyarakat. Dalam memberikan perspektif baru, media perlu memberikan ruang bagi pihak-pihak yang kontra mengenai suatu isu. Dengan begitu bisa diketahui apakah yang menjadi akar masalah ataupun menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Demikian juga pendapat Informan 2 dan Informan 5 yang setuju dengan kekritisannya media Tempo karena merasa bahwa sikap kritik media perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah juga untuk menyuarakan keadilan.

Informan 9

”Biar kita paham POV orang-orang yang kontra itu seperti apa. Seperti hal pentingnya oposisi ya di pemerintahan yang demokratis, supaya nggak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kadang kita tidak tahu sebenarnya pihak mana yang salah atau benar.”

Pandangan Informan tersebut pada hakikatnya menunjukkan pentingnya fungsi atau peran oposisi dalam pemerintahan atau negara demokrasi sebagai penyeimbang kekuasaan serta pentingnya media massa dalam mendukung hal tersebut. Sebagai pilar keempat demokrasi, peran media massa tidak hanya sebatas membandingkan kesamaan dan perbedaan dengan penguasa, tetapi juga berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dengan mengedepankan rasionalitas

objektif dan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat secara maksimal (Cahyadi et al., 2021).

Informan 1, Informan 6 dan Informan 8 juga menyetujui bahwa sikap kritis media memang diperlukan, namun dengan catatan bahwa berita yang dihasilkan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kekritisan tersebut harus berangkat dari fakta atau fenomena yang benar-benar terjadi, tidak sekadar untuk menyerang penguasa. Mengenai kekritisan media Tempo, Informan 3 mengatakan ia berada diantara setuju dan tidak setuju. Hal ini dikarenakan ia merasa media yang bisa mengkritik pemerintah memanglah diperlukan. Namun terkait Tempo ia tidak setuju karena ia merasa sikap kritis media tersebut justru menjadikan media ini tidak netral dan tidak kredibel.

Informan 3

“Saya berpendangan bahwa Tempo merupakan media berita yang cukup idealis dan keberpihakan. Kadang beritanya jadi tidak netral, dia berpihak ke pihak-pihak yang sekiranya menguntungkan dia.”

Informan 7 dalam hal ini juga merasa sikap kritis Tempo justru membuat media ini cenderung membangun opini terkait pemerintah yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Informan 7 berpendapat bahwa Tempo tidak objektif dikarenakan posisi media ini yang kontra terhadap pemerintah. Ia merasa media ini hanya mencari kekurangan pemerintah saja.

Informan 7

“...Kalau dibilang setuju sih enggak. Sebenarnya kalau memberitakan opini yang kritis pemerintah nggak papa tapi Tempo ini seperti membangun opini justru mengenai pemerintah. Ini kan bisa buat publik menilai pemerintah jelek. Orang jadi nggak percaya sama pemerintah. Jadi malas ikut kebijakan pemerintah.”

Pendapat Informan 3 dan informan 7 menunjukkan kekhawatiran terhadap pengaruh media Tempo dalam membentuk opini publik yang menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan, baik dalam konteks sosial maupun politik, memang merupakan syarat mutlak bagi terciptanya pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kepercayaan saling bergantung satu sama lain, di mana kepercayaan akan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik. Dengan kepercayaan publik, menurut Informan 7 akan mempermudah terjalannya program maupun kebijakan pemerintah.

4.2.3.2 Tempo Sebagai Media yang Pro terhadap Pemakzulan Jokowi

Dengan pemberitaannya, baik jumlah berita maupun cara menyampaikam berita, Informan memiliki persepsinya masing-masing mengenai keberpihakan media Tempo. Pada prinsipnya, media seharusnya bersifat netral. Netralitas ini penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik bersifat objektif, tidak berpihak, dan bebas dari pengaruh kepentingan tertentu. Media yang netral memberikan kesempatan bagi beragam pandangan dan opini, sehingga audiens dapat membuat keputusan berdasarkan fakta yang ada. Namun, dalam kenyataannya, mencapai netralitas penuh sering kali sulit, karena faktor-faktor seperti kepemilikan media, ideologi, atau tekanan eksternal dapat memengaruhi cara penyajian berita.

Mayoritas Informan merasa bahwa Tempo berpihak terhadap Pemakzulan Jokowi sementara terdapat 2 informan yang merasa media ini cukup berimbang, terlepas bagaimana cara media ini memberitakan isu tersebut. Informan 1 merasa bahwa Tempo cukup kredibel dalam memberitakan isu pemakzulan Presiden

Jokowi, terutama karena banyaknya fakta yang disajikan. Namun, ia juga menganggap bahwa Tempo tampak sedikit pro terhadap pemakzulan presiden, dan mengasumsikan bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh posisi Tempo yang sejak lama dikenal sebagai oposisi terhadap pemerintah. Meskipun demikian, Informan 1 berpendapat bahwa sikap media yang memihak merupakan hal yang wajar dan merupakan hak setiap media untuk mengambil posisi tertentu. Ia percaya bahwa selama pemberitaan didasarkan pada fakta dan tetap objektif, pandangan media yang berbeda-beda dapat memberikan kontribusi positif dalam diskursus publik.

Informan 2 dan Informan 5 juga memiliki pandangan dan pemahaman yang sama bahwa media Tempo memihak ke arah pro pemakzulan presiden dan mereka mendukung hal tersebut. Informan 5 mengakui sangat mendukung kekritisannya Tempo terhadap pemakzulan Presiden Jokowi, karena ia juga mendukung wacana tersebut. Ia berpendapat bahwa Tempo tampaknya cenderung memihak pada pihak-pihak yang mendukung pemakzulan, sebagaimana tercermin dari cara pemberitaan media ini yang tidak banyak menyoroti pandangan-pandangan yang menolak isu pemakzulan tersebut.

Informan 5

“...masalah Pemakzulan saya setuju kekritisannya karena ada faktor-faktor seperti kecurangan pemilu dan juga faktor-faktor lainnya.”

“Kalau saya melihat beritanya Tempo cenderung kepada pelaksanaan Hak Angket itu harus dilakukan. Kalau saya melihat kepada kontranya saya tidak melihat Tempo memberikan informasi mengenai yang cukup mengenai kontra Pemakzulan. Jadi cenderung ke satu sisi aja, yaitu yang pro pemakzulan.”

Dalam mengemas isu pemakzulan Jokowi Informan 3 berpendapat kalau Tempo sangat memihak ke arah pro pemakzulan dan hal tersebut ia rasa menjadikan

media ini tidak berimbang dalam memberitakan isu tersebut. Informan 7 juga merasa Tempo kurang berimbang melihat kuantitas pemberitaan mengenai pro pemakzulan lebih banyak.

Informan 7

“Mungkin kurang. Entah karena memposisikan diri sebagai kontra pemerintahan atau apa tapi jadinya buat media ini nggak objektif. Apa-apa dicari kekurangan sesuatu. Kayak pemerintah. Semisal dibahas prestasinya juga sih nggak papa. Tapi jarang sih dilakukan.”

“...Tapi nggak objektif, karna kurang berimbang kayaknya ya. Saya rasa kok lebih banyak berita pro pemakzulannya gitu. Kayaknya dia medianya pro pemakzulan Jokowi gitu.”

Informan 4 kemudian menyebut Tempo seringkali "pedas" dalam memberitakan suatu isu, terutama setelah melihat berita mengenai komentar Luhut terkait pemakzulan. Ia menyebutkan, sebelumnya ia telah menonton video pernyataan Luhut yang kemudian diberitakan oleh Tempo. Informan 4 merasa bahwa cara Tempo mengemas berita tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa Luhut meremehkan isu pemakzulan, padahal kesimpulan yang didapatnya dari video tersebut adalah bahwa Luhut merasa sedih mengenai kemunculan isu pemakzulan Presiden Jokowi.

Informan 4

“...kalau dibilang objektif, saya melihat mungkin media ini agak pedas aja kalau memberitakan suatu isu, kayak berita yang Luhut bilang kalau isu ini keributan politik yang tak perlu, aku kebetulan pernah lihat videonya di sosial media, disitu sorotannya Luhut itu sedih adanya isu ini. Mungkin disitu yang agak berlebihannya ya, kayak kurang objektif.

“tuntutan-tuntutan pemakzulan, Tempo uraikan dengan jelas. Tapi mengenai kurang baiknya ada isu ini seperti kurang disorot...”

Informan 4 juga menjelaskan dalam memberitakan isu pemakzulan Presiden Jokowi, Tempo tidak merepresentasikan pihak pro dan kontra secara berimbang. Ia

melihat bahwa Tempo menguraikan tuntutan-tuntutan terkait pemakzulan dengan jelas namun terkait dampak buruk isu ini tidak begitu diinformasikan dalam berita.

Tempo di dalam pandangan Informan 6 juga merupakan media berita yang cukup besar dan kredibel. Ia lalu menyimpulkan media ini cukup berimbang dalam menyampaikan beritanya terkait pemakzulan dengan melihat adanya berita dari pihak kontra dan dari pihak pro. Oleh sebab itu ia menerima pemberitaan Tempo mengenai pemakzulan dan tak ada masalah terhadap hal tersebut.

Informan 6

“Saya rasa kredibel sih. Saya juga merasa cukup berimbang karena ada berita pro dan kontra nya.”

Mirip dengan pandangan Informan 6, yang menganggap sebuah media berita sudah cukup berimbang jika memaparkan pihak kontra dan pro, terlepas dari jumlah atau cara pengemasan beritanya, Informan 8 juga berpikiran bahwa Tempo adalah media yang berimbang. Oleh sebab itu dalam menerima pemberitaan Tempo mengenai pemakzulan Jokowi, Informan 8 tidak memiliki keluhan atau masalah terhadap cara pemberitaan Tempo yang kritis tersebut.

Informan 8

“Saya lihat cukup kredibel sih. Dan saya rasa juga sudah berimbang ya, beritanya dari dua sisi kan. Pro dan kontra nya ada diberitakan. Nggak pake bahasa yang berlebihan juga.”

4.2.3.3 Penerimaan Pembaca Tentang Pemberitaan Pemakzulan Jokowi pada

Tempo

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa semua informan menyadari bahwa Tempo adalah media berita yang kritis terhadap Pemerintah. Banyak yang setuju bahwa keberadaan media yang kritis terhadap pemerintah

penting untuk menyuarakan keresahan masyarakat atau sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah. Namun, terkait media Tempo, ada beberapa orang yang tidak sepenuhnya setuju karena khawatir bahwa konstruksi opini media Tempo dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sebagian besar informan tetap menganggap media ini cukup kredibel. Namun, beberapa informan mengakui bahwa sikap kritis Tempo dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam menyajikan berita.

Informan 1, 2, 5, 6, 8 dan juga informan 9 berada pada posisi *dominan hegemonic*. Informan 1 dan 9 memiliki pandangan bahwa keberpihakan yang dilakukan media itu wajar dan merupakan hak suatu media. Pandangan ini membuatnya merasa bahwa berita Tempo, meskipun sepertinya pro terhadap isu pemakzulan, tetap merupakan informasi yang kredibel. Sementara itu informan 2 dan 5 memiliki pandangan yang serupa bahwa mereka justru mendukung Tempo yang pemberitaannya terkait isu ini kritis dan berpihak. Hal ini dipengaruhi oleh posisi kedua informan yang memang pro terhadap isu pemakzulan presiden tersebut.

Informan 6 dan Informan 8 juga memiliki kesamaan dalam penerimaan terhadap berita Tempo. Mereka tidak merasa media ini tidak objektif atau condong ke arah pihak-pihak tertentu, sehingga mereka dapat menerima sepenuhnya berita Tempo. Menurut mereka, dengan media ini memberitakan pro dan kontra yang ada sudah cukup membuktikan media ini netral, terlepas perbedaan jumlah berita ataupun cara media ini mengemas pemberitaannya.

Informan 3, 4 dan 7 berada pada posisi *oppositional*. Ketiga Informan sepakat bahwa sikap kritis media Tempo menjadikan media ini tidak netral dalam pemberitaannya mengenai isu pemakzulan presiden. Hal ini membuat mereka merasa bahwa berita Tempo menjadi tidak dapat dipercaya. Informan 3 sejak awal memiliki pandangan bahwa Tempo merupakan media yang idealis dan keberpihakan. Ia mengaku tidak menyukai cara Tempo memberitakan suatu isu yang membuat persepsi publik menjadi jelek terhadap pemerintah. Informan 4 yang memiliki pengalaman sebelumnya menonton video Luhut yang menjadi objek pemberitaan Tempo, melihat perbedaan persepsi terhadap apa yang diberitakan oleh media tersebut. Oleh sebab itu ia merasa media ini tidak dapat dipercaya dalam pemberitaan mengenai isu pemakzulan Jokowi. Sementara itu, Informan 7 menyimpulkan Tempo sebagai media yang oposisi dan berusaha mencari kekurangan pemerintah. Dia merasa sikap Tempo yang seperti itu dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan membuat publik enggan mengikuti kebijakan pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengalaman pribadi individu, pengetahuan, latarbelakang sosial budaya, serta konsumsi media mempengaruhi cara mereka memaknai suatu isu dan pesan media. Terdapat beragam interpretasi dan penerimaan terhadap berita pemakzulan Presiden Jokowi. Sebagian pembaca tidak setuju dengan wacana pemakzulan tersebut. Mereka memiliki pandangan bahwa wacana pemakzulan Jokowi itu inkonstitusional dan sebagai keributan politik yang tidak perlu. Pandangan ini terutama berasal dari pembaca yang latarbelakangnya kurang mengikuti isu politik dan cenderung berpihak kepada pemerintah. Di sisi lain, ada juga pembaca yang melihat isu pemakzulan sebagai suara masyarakat yang perlu diperhatikan, sebagai respons terhadap kemunduran yang terjadi dalam pemerintahan Jokowi. Pandangan ini terutama berasal dari pembaca yang merupakan mahasiswa yang tergabung dan aktif dalam organisasi kemahasiswaan.

Seluruh pembaca memiliki penerimaan bahwa Tempo merupakan media yang kritis terhadap Pemerintah. Mereka menyetujui bahwa sikap kritis media memang diperlukan, dengan catatan bahwa berita yang dihasilkan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun, mayoritas pembaca memiliki pandangan bahwa Tempo, dengan sikap kritis tersebut menjadi tidak netral

dalam memberitakan isu Pemakzulan Jokowi. Meski begitu mereka masih merasa media ini cukup kredibel dan dapat dipercaya. Dalam analisis resepsi, Stuart Hall membagi posisi penerimaan pembaca menjadi tiga posisi, namun terkait penerimaan pembaca terhadap berita pemakzulan Jokowi pada Tempo, hanya ditemukan dua posisi. Sebagian besar pembaca berada pada posisi *dominan hegemonic*, yaitu dapat menerima pesan Tempo secara sepenuhnya dan sebagian kecil berada pada posisi *oppositional*, yaitu menolak pesan berita pemakzulan Jokowi dari Tempo.

5.2 Saran

Penulis berharap untuk khalayak media agar dapat berpikir secara kritis dalam menerima pemberitaan suatu isu-isu sosial agar tidak keliru dalam memaknai isi pesan media. Dalam menerima suatu isu wajar terjadi perbedaan pandangan dan terlibat dalam situasi pro dan kontra yang ada, namun diharapkan agar khalayak tetap menjaga situasi yang kondusif di antara sesama masyarakat Indonesia.

Melalui penelitian ini, penulis menyarankan bagi penelitian berikutnya dapat menggunakan metode serupa dengan lebih mengeksplorasi atau mengungkapkan isu-isu sosial lainnya yang terjadi dan dibahas oleh media massa. Dengan begitu nantinya akan dapat memperkaya temuan data dan melengkapi penelitian yang satu dan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Ayuningtiyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Mekanisme Checks and Balances dan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 14–26. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>
- BPK. (2024). *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>
- Cahyadi, N. D., Apriadi, M., & Negara, A. (2021). *TINJAUAN POLITIK HUKUM PERAN OPOSISI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN A REVIEW OF THE LEGAL POLITICS OF THE OPPOSITION ' S ROLE IN THE FORMATION OF LAWS TO ERADICATE CORRUPTION IN*. 6(2).
- CNN Indonesia. (2024). *Awal Mula Wacana Pemakzulan Jokowi dan Pro-Kontra Publik*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240115115856-32-1049600/awal-mula-wacana-pemakzulan-jokowi-dan-pro-kontra-publik>
- Detik News. (2024). *Menyikapi Isu Pemakzulan Presiden*. <https://news.detik.com/kolom/d-7166497/menyikapi-isu-pemakzulan-presiden>
- Dixon, M. (2019). Media Theory for A Level. In *Media Theory for A Level*. Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9780429032240>
- F. Nugrahani, H. M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books.
- Febriandy, R. K., & Wahid, U. (2024). Kemunduran Demokrasi Di Indonesia: Analisis Laporan Varieties of Democracy (V-Dem) Institute 2024. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(2), 1041–1050. <https://doi.org/10.31539/KAGANGA.V7I2.12392>
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Yayasan Obor Indonesia.

- Hasanah, N., & Setiadi, W. (2024). *Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Probability of Implementation of the Right of Inquiry on General Elections in Indonesia angket . Melalui hak angket , parlemen memiliki otoritas untuk menyelidiki secara mendalam*. 7(2), 4–7.
- Kompas.com. (2024a). *Jejak Anwar Usman yang Berujung Diberhentikan dari Ketua MK*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/08/11123371/jejak-anwar-usman-yang-berujung-diberhentikan-dari-ketua-mk?page=all>
- Kompas.com. (2024b). *Jokowi dan Keluarganya Digugat ke PTUN Atas Dugaan Nepotisme*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/15/15131081/jokowi-dan-keluarganya-digugat-ke-ptun-atas-dugaan-nepotisme?page=all>
- Kompas.id. (2024). *Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/31/indeks-demokrasi-turun-kebebasan-pers-turut-terancam>
- Noor, J. (2011). *Metodelogi Penelitian*. Kencana Prenada Media Group.
- Nursitawati, N., & Suseno, A. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Jokowi Minta Dikritik Di Media Online Times Indonesia Dan Tempo.Co (Analisis Framing Berita Times Indonesia Dan Tempo.Co Periode Februari 2023). *INTERPRETASI: Communication & Public Relation*, 3(1), 26–33. <https://doi.org/10.53990/interpretasi.v3i1.242>
- Purnamasari, N. I. (2018). Resepsi Pembaca terkait Berita Demo 4/11 di Kompas.com. *Jurnal ASPIKOM*, 3(5), 958. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.358>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Satriya, C. A. (2022). Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 528–553. <https://doi.org/10.31078/jk1932>
- Silvani, I., Perwirawati, E., & Simbolon, B. R. (2021). Manajemen Media Massa. In *Scopindo Media Pustaka*.
- Suara.com. (2024). *Pemakzulan Jokowi Terindikasi Buat Kacaukan Pemilu, Pengamat: Ada yang Panik Takut Kalah*. <https://www.suara.com/news/2024/01/21/102445/pemakzulan-jokowi->

terindikasi-buat-kacaukan-pemilu-haidar-alwi-institute-ada-yang-panik-takut-kalah

Tempo.co. (n.d.). *Tempo Media Group Sejarah Singkat Filosofi Tempo*. Retrieved May 11, 2024, from <https://www.tempo.id/corporate.php>

Tempo.co. (2024a). *Demonstrasi Mahasiswa Tuntut Pemakzulan Presiden Jokowi*. <https://nasional.tempo.co/read/1831032/demonstrasi-mahasiswa-tuntut-pemakzulan-presiden-jokowi>

Tempo.co. (2024b). *Kontroversi Pernyataan Jokowi: Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye*. <https://www.tempo.co/infografik/infografik/kontroversi-pernyataan-jokowi-presiden-boleh-memihak-dan-berkampanye-621>

Tempo.co. (2024c). *Kronologi Munculnya Wacana Pemakzulan Jokowi*. 2. https://nasional.tempo.co/read/1821974/kronologi-munculnya-wacana-pemakzulan-jokowi?page_num=2

Tempo.co. (2024d). *Luhut Sebut Isu Pemakzulan Jokowi adalah Keributan Politik yang Tak Perlu*. <https://nasional.tempo.co/read/1822521/luhut-sebut-isu-pemakzulan-jokowi-adalah-keributan-politik-yang-tak-perlu>

Tempo.co. (2024e). *Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?* <https://www.tempo.co/politik/putusan-mk-sebut-jokowi-tak-terbukti-lakukan-nepotisme-dan-abuse-of-power-apa-tindakan-masuk-kategori-itu--65521>

Tempo.co. (2024f). *Sebut Penuhi Unsur Pemakzulan, Ini 3 Pernyataan Bivitri Susanti Soal Pelanggaran Jokowi*. <https://nasional.tempo.co/read/1826781/sebut-penuhi-unsur-pemakzulan-ini-3-pernyataan-bivitri-susanti-soal-pelanggaran-jokowi>

Tempo.co. (2024g). *Yusril Sebut Gerakan Pemakzulan Jokowi Inkonstitusional, Ancam Keberlangsungan Pemilu*. <https://www.tempo.co/politik/yusril-sebut-gerakan-pemakzulan-jokowi-inkonstitusional-ancam-keberlangsungan-pemilu-97999>

Wahyuni, I. N. (2014). Komunikasi Massa. In *Graha Ilmu*.

Yunita, A., & Salman. (2022). Objektivitas Tempo.co dalam Memberitakan Sosok

Jokowi (Analisis Isi Kuantitatif Berita Jokowi di Bulan September-Desember 2019). *Jurnal Bisnis Komunikasi* , 9(1), 13–22.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Interview Guideline

A. Kesadaran dan Pengetahuan Pembaca Terhadap Pemakzulan Presiden

1. Apakah anda menyadari (aware) mengenai adanya pemberitaan terkait isu Pemakzulan Presiden Jokowi?
2. Apakah anda mengikuti pemberitaan mengenai isu pemakzulan Jokowi?
3. Apa yang anda ketahui terkait latarbelakang munculnya isu tersebut?
4. Apakah anda tertarik membaca pemberitaan terkait isu tersebut? Mengapa?

B. Penerimaan Pembaca Terhadap Pemakzulan Presiden

1. Apa pandangan anda terhadap isu tersebut?
2. Bagaimana anda memposisikan diri dalam menerima isu tersebut? Apakah anda pro atau kontra terhadap pemakzulan presiden Jokowi?
3. Bagaimana anda menyikapi isu tersebut?

C. Penerimaan Pembaca Terhadap Berita Tempo Tentang Pemakzulan

- Penerimaan terhadap media

1. Apa yang anda ketahui mengenai Tempo?
2. Apakah anda tahu bahwa Tempo merupakan media yang sering mengkritik pemerintah? Apakah anda setuju dengan hal tersebut?
3. Menurut anda bagaimanakah kredibilitas dan objektivitas Tempo sebagai media berita?

4. Bagaimana Tempo.co dalam menampilkan berita mengenai pemakzulan Presiden Jokowi? apakah informasi yang disampaikan oleh tempo kredibel dan objektif?
5. Apakah media Tempo dalam merepresentasikan pihak pro dan kontra dilakukan secara berimbang?

- **Penerimaan terhadap Pesan Berita**

1. Seberapa pentingkan isu mengenai pemakzulan presiden untuk diberitakan?
2. Apakah anda setuju dengan pernyataan pihak kontra pemakzulan Jokowi yang menyatakan bahwa isu ini tindakan inkonstitusional dan merupakan keributan politik untuk mengacaukan pemilu? Mengapa?
3. Apakah anda setuju dengan pernyataan pihak pro pemakzulan Jokowi yang menyatakan bahwa tindakan ini diperlukan akibat kemunduran demokrasi yang terjadi di pemerintahan Jokowi? Mengapa?
4. Apakah anda setuju dengan pesan berita Tempo mengenai kemungkinan Presiden Jokowi bisa dimakzulkan melalui hak angket?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Identitas Informan

Nama : Sandy (Informan 1)
Usia : 22 Tahun
Asal daerah : Pematangsiantar
Latarbelakang : Mahasiswa administrasi bisnis
Tanggal wawancara : 15 Juli 2024

- P : Apakah anda menyadari mengenai adanya pemberitaan terkait isu pemakzulan presiden Jokowi?
- Il : Kebetulan saya orangnya cukup aktif di sosial media khususnya instagram, jadi saya juga mengikuti platform media-media berita online yang mana saya mengetahui berita terkait pemakzulan Jokowi dari situ dan saya membaca dari beberapa sumber dan pada saat itu juga beritanya sempat viral yang mana juga berita itu terus-terus dibahas oleh para tokoh-tokoh politik.
- P : Berarti anda lumayan mengikuti isu ini, benar?
- Il : Iya, saya cukup mengikutinya.
- P : Dari yang sudah anda ketahui, apasih latar belakang munculnya isu pemakzulan Presiden ini?
- Il : Dari pemahaman saya dari media sosial online khususnya akun-akun yang membahas seputar isu tersebut, saya simpulkan adanya benang merah penyebab terjadinya wacana pemakzulan Presiden ini karena adanya unsur neopotisme. Yang mana pada saat masa pemerintahan Jokowi, banyak kerabat-kerabatnya yang diangkat untuk masuk dan menjabat didalam pemerintahan, baik itu dari keluarga menantunya maupun keluarga bapak Presiden itu sendiri. Jadi saya kira alasannya adalah kuatnya nepotisme oleh Presiden kita.
- P : bagaimana ketertarikan anda terhadap isu ini?
- Il : untuk tertarik tidak terlalu, karena saya kurang suka mengikuti berita politik, namun ya mengikuti sedikit-sedikitlah melalui media sosial dan juga

melalui podcast-podcast yang ada di Youtube. Akan tetapi untuk mengulik isu tersebut saya tidak terlalu melakukannya secara mendalam.

P : lalu apa pandangan anda terhadap isu tersebut?

I1 : Saya kira isu-isu seperti ini pasti sering terjadi dikarenakan ya ditahun ini kan kita sedang berada pada masa-masa tahun politik yang mana dekat dengan pemilihan umum. Dikarenakan adanya pro dan kontra terhadap pemerintahan, dan ingin menjatuhkan lawan politik.

P : ngomong-ngomong terkait situasi pro dan kontra ya, jadi dari Tempo

P : Lalu bagaimana anda memposisikan diri dalam menerima isu ini? Apakah anda termasuk yang pro atau kontra?

I1 : Kalau dari saya sendiri hanya bersikap netral saja. Saya hanya memperhatikan perkembangan isu dari media. Kalau memposisikan diri ke pro atau kontra, saya memilih netral saja.

P : lalu dari posisi yang netral ini artinya anda menyikapi isu ini bagaimana?

I1 : Ya saya hanya diam mengamati dan melihat seperti apa yang terjadi kedepannya.

P : apa yang anda ketahui tentang Tempo?

I1 : terkait Tempo, saya tahu bahwa ini merupakan salah satu media berita. Saya juga mengikuti official akunnya di instagram. Namun untuk mendalam saya tidak terlalu mengetahui Tempo. Saya melihatnya hanya sebagai media yang cukup baik dalam memberitakan beritanya.

P : apakah anda tahu kalau Tempo merupakan salah satu media yang mengkritik Pemerintah?

I1 : ya saya cukup tahu.

P : apakah anda setuju dengan hal tersebut?

I1 : saya setuju sih. Media berita punya hak untuk melakukan kritik selama berita itu bisa dipertanggungjawabkan.

P : menurut anda bagaimana objektivitas dan kredibilitas Tempo sebagai media berita?

I1 : menurut saya aman-aman saja sih. Apalagi melihat media ini masih cukup besar sampai sekarang.

- P : Lalu bagaimana sih Tempo dalam mengemas berita mengenai Pemakzulan Presiden ini? Apakah cukup kredibel dan objektif?
- Il : saya kira cukup kredibel sih, meskipun mereka sebagai oposisi. Banyak fakta yang dibawa dalam berita.
- P : Apakah menurut anda dalam merepresentasikan pihak yang pro dan kontra Tempo cukup berimbang?
- Il : saya memang melihat kalau Tempo ini sedikit memihak ke arah yang pro Pemakzulan, dalam arti sedikit berlawanan dengan pemerintah. Mungkin karena mereka dari dulu memang oposisi ya. Tapi ya menurut saya ya itu hak setiap media untuk mengambil sisi yang mana. Sah-sah saja.
- P : menurut anda apakah isu ini penting untuk diberitakan?
- Il : untuk situasi pro dan kontra menurut saya perlu untuk diberitakan. Ya karena penting untuk kita dapat melihat dari situ, apa sebenarnya permasalahan ini apakah dapat menggiring opini publik atau tidak. Jadi menurut saya untuk media memberitakan perlu sekali.
- P : ngomong-ngomong terkait situasi pro dan kontra ya, jadi dari Tempo sendiri beritanya mengenai isu ini mengatakan bahwa pihak Kontra menganggap isu ini merupakan inskontitusional dan merupakan keributan politik yang tidak perlu, untuk mengacaukan pemilu. Apakah anda setuju dengan pernyataan tersebut?
- Il : Menurut saya benar bahwa ini merupakan isu yang tidak sesuai konstitusi, karena jika terjadi Pemakzulan merupakan suatu hal yang tidak baik dan negatif di pemerintahan kita. Negara akan menjadi tidak baik-baik saja, berjalan tidak seimbang. Dengan adanya isu ini bahkan jika sampai terjadi beneran akan membuat negara kacau, seperti tahun 98, kemungkinan. Kita tidak akan tahu.
- P : apakah artinya anda setuju bahwa naiknya isu merupakan suatu tindakan untuk mengacaukan pemilu?
- Il : ya benar. Bisa jadi seperti itu. Artinya pihak yang pro berusaha mencari celah, kelemahan yang ada dari pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri.

- P : Lalu mengenai pernyataan pihak yang pro, bahwa tindakan ini diperlukan akibat kemunduran di pemerintahan Jokowi. Apa pendapat anda?
- Il : Saya kurang setuju. Yah memang tindakan nepotisme, atau KKN sangat dilarang di republik kita. Cuma secara di pemerintahan Jokowi kita melihat tidak ada yang terlalu menonjol dalam hal tindakan nepotisme. Memang ada satu dua hal seperti yang ketua MK, keluarga presiden, yang meloloskan pencalonan Gibran masalah batasan umur untuk ikut Pemilu. Tapi menurut saya jika hal itu pasti sudah dirapatkan oleh MK secara mendalam untuk mengkaji hal tersebut. Artinya tidak langsung bisa dari pamannya sendiri yang memutuskan sendiri. Pasti ada proses panjang. Tapi setelah kita lihat tidak ada tindakan yang terlalu mencolok terkait nepotisme di pemerintahan Jokowi. Tidak ada yang terlalu fatal dan masih oke-oke aja. Artinya kita tidak hanya melihat dari nepotisme atau kemunduran yang baru-baru ini terjadi. Kita harus melihat seperti apa selama pemerintahan Jokowi, perkembangan di negara kita. Harus dipertimbangkan. Selama 2 periode beliau sudah memberikan yang terbaik untuk negara kita, mulai dari pembangunan, sarana-prasarana dan lainnya. Artinya kita melihat kesitu, wajar-wajar saja di akhir pemerintahannya Presiden kita melakukan, bisa dibilang yang tadi itu nepotisme asal tidak kelewat batas.
- P : berarti dalam melihat isu ini, anda mempertimbangkan kebaikan selama pemerintahan Jokowi selain kemunduran yang ada?
- Il : Benar. Artinya kita harus melihat sisi kebaikan beliau selama menjabat di 2 periode ini.
- P : Menurut anda apakah pemakzulan Presiden ini bisa dilakukan di Indonesia ini? Seperti kemungkinan hak angket yang diberitakan Tempo?
- Il : menurut saya pastinya sudah ada UU yang mengatur hal tersebut, artinya tidak segampang itu untuk mengajukan pemakzulan Presiden. Harus ada sesuatu yang fatal agar pemakzulan ini bisa dilakukan. Namun terkait yang viral sekarang ya itu hanya beberapa pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh politik terkait pemerintahan Jokowi, artinya orang-orang yang memviralkan terkait masalah ini adalah orang yang tidak menyukai pemerintahan bapak

Jokowi. Saya kira seperti itu yang saya lihat. Bahwa pemakzulan ini pasti ada peraturannya namun tidak segampang yang kita bayangkan. Pasti ada proses panjang yang akan dilalui. Pun Hak angket ini pasti susah la sampe ke sananya. Ke memakzulkan Presidennya.

Identitas Informan

Nama : Vincent (Informan 2)

Usia : 23 Tahun

Asal daerah : Bekasi

Latar Belakang : mahasiswa jurusan Hukum. Merupakan mahasiswa yang aktif mengikuti isu politik, aktif dalam organisasi pergerakan politik aktivis, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

Tanggal wawancara : 16 Juli 2024

P : Apakah anda menyadari mengenai adanya isu Pemakzulan Presiden?

I2 : Ya saya tahu. Saya cukup mengikuti perkembangan dari isu ini.

P : menurut anda apakah yang menjadi latarbelakang dari munculnya isu pemakzulan Presiden Jokowi?

I2 : latar belakangnya munculnya isu ini sendiri menurut saya adanya gejolak dari pemerintahan yang diperhatikan oleh masyarakat, yang dimana saat itu banyak terjadi perubahan-perubahan undang-undang terkhusus pada, ya momen nya mbak tahu sendiri mau Pemilu terus yang diusung dari beberapa koalisi itu salah satunya adanya kehadiran anak presiden disitu. Itu juga yang menjadi dasar perhatian mengenai adanya isu ini.

P : lalu apakah anda tertarik membaca pemberitaan terkait isu ini?

I2 : saya cukup tertarik, karena memang saya ada ketertarikan dalam mengikuti perkembangan isu ini. Membaca beritanya akan membuat saya lebih paham arahnya isu ini.

P : Lalu bagaimana pandangan anda terhadap isu ini?

I2 : Saya memandang bahwa saya sebagai masyarakat juga mahasiswa, saya sangat setuju untuk adanya pemakzulan Jokowi ini.

P : Bagaimana anda menempatkan posisi dalam mengikuti isu ini? Apakah anda pro atau kontra?

I2 : Saya pro.

- P : Anda sebagai orang yang pro terhadap pemakzulan Jokowi ini, bagaimana anda menyikapi wacana ini? Adakah gerakan atau tindakan yang anda lakukan?
- I2 : Saya terutama cukup sering mendiskusikannya dengan orang lain, juga saya sebagai anggota organisasi mahasiswa tadi yaitu GMNI, kami pernah melakukan deklarasi pemakzulan Jokowi dengan melayangkan surat petisi terhadap KPU, Bawaslu dan pihak penegak hukum seperti polri dan TNI. Kami kerap menyuarakan pemilu yang adil tanpa intervensi dari presiden atau penguasa.
- P : Baik kita ke kategori selanjutnya terkait berita Tempo. Apa yang anda ketahui tentang Tempo?
- I2 : Saya mengetahui Tempo sebagai media berita yang kerap memperhatikan isu-isu sosial, dalam pemerintahan maupun isu-isu kemasyarakatan.
- P : Apakah anda tahu bahwa Tempo, merupakan media yang sering mengkritik pemerintahan? Apakah anda setuju dengan hal tersebut?
- I2 : Saya tahu sih, dan saya juga sangat setuju dengan adanya media yang mengkritik pemerintah karena pergerakan dari tubuh Pemerintah perlu untuk diawasi. Pengawasannya bukan hanya dari masyarakat saja tapi juga media dalam hal ini berperan besar untuk membantu menyuarakan keadilan. Agar masyarakat awam bisa lihat ada gejolak apa yang ada di dalam tubuh pemerintahan ataupun diluar dari itu.
- P : Mengetahui Tempo sebagai media yang seperti itu, bagaimana kredibilitas dan objektivitas Tempo sebagai media berita? Apakah cukup baik?
- I2 : Kredibel sudah pasti kredibel juga menurut saya sudah cukup objektif.
- P : Dalam mengemas berita mengenai pemakzulan Jokowi, apakah media ini juga kredibel dan objektif?
- I2 : Saya meyakini kebenaran dari beritanya, karena bukan dari media Tempo saja, hal ini juga disampaikan oleh media lain. Jadi cukup kredibel. Namun untuk objektif, mungkin sedikit ada kekurangan karena dari media ini sendiri cukup terang-terangan mengekspos pemerintah.

- P : Dalam merepresentasikan posisi Pro dan kontra bagaimana? Apakah menurut anda sudah berimbang?
- I2 : Menurut saya berimbang sih, karena tidak hanya menyampaikan sisi masyarakat tapi juga menyampaikan sisi pemerintah. Mungkin ya itu tadi kalau masalah objektif, bisa dilihat sepertinya ada keberpihakan dalam merepresentasikan pihak yang pro pemakzulan. Tapi ya justru itu yang diperlukan agar masyarakat tahu kebenaran dari isu ini.
- P : Menurut anda seberapa penting isu ini diberitakan?
- I2 : Menurut saya penting diberitakan karena isu ini sangat butuh atensi atau perhatian dari masyarakat agar mereka tahu bahwasanya ada kemunduran-kemunduran yang terjadi di pemerintah Jokowi. Seperti nepotisme, pengubahan UU, juga terkait adanya bantuan sosial yang digunakan untuk membantu mendorong kampanye salah satu paslon. Agar ada validasi juga terkait keraguan-keraguan masyarakat mengenai apa yang terjadi di pemerintah.
- P : seputar isu ini, ada pernyataan pihak kontra yang menyatakan bahwa isu ini adalah tindakan inkonstitusional dan merupakan upaya melakukan keributan politik yang tidak perlu. Apakah anda setuju mengenai pernyataan tersebut?
- I2 : Menurut pandangan saya, tidak setuju. Karena isu ini sendirikan landasannya dari pergerakan dalam tubuh pemerintah sendiri dan ya ketika masyarakat memandang itu sebagai tindakan yang diperlukan, maka ya sah-sah saja untuk diajukan. Bukan berarti keinginan masyarakat bisa disepelkan seperti itu oleh yang pihak yg kontra tadi. Bahwa ini cuman keributan politik yang nggak perlu atau mengacaukan pemilu saja. Tapi ya, kalau mereka berpendapat seperti itu wajar-wajar saja. karena mereka pada dasarnya kontra terhadap isu ini.
- P : Lalu dengan pernyataan pihak yang pro, bahwa tindakan pemakzulan ini diperlukan karena adanya kemunduran demokrasi dalam pemerintahan Jokowi. Apa pendapat anda?

- I2 : Ya saya setuju. Karena bicara mengenai demokrasi bukan hanya terjadi ketika pemilihan saja tetapi saat terbentuknya UU. Kembali lagi UU itu berawal dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri juga. Harusnya mayoritas masyarakat terlibat dalam pembentukan UU.
- P : menurut anda seperti apakah pemakzulan Presiden di Indonesia ini? Apakah dalam hal ini dapat terjadi? Seperti melalui Hak Angket misalnya?
- I2 : Menurut saya adanya pemakzulan sendirikan karena adanya dasar hukum yang mudah diubah-ubah juga kurangnya perhatian dari pemerintah bahwasanya dasar hukumnya ini juga perlu dari masyarakat. Kurangnya pasrtisipasi masyarakat dalam pembentukan UU. Hal tersebut menyebabkan pemakzulan ini sulit dilakukan karena peraturannya sendiri dibuat sendiri oleh pemerintah begitu. Memang Hak angket sebenarnya bisa sih berujung ke Pemakzulan, tapi melihat pemerintah yang begitu pesimis sih bakal berjalan baik seperti kemarin kan.

Identitas Informan

Nama : Windi (Informan 3)
Umur : 23 Tahun
Asal daerah : Surabaya
Latar belakang : Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Tanggal wawancara : 18 Juli 2024

P : Apakah anda menyadari mengenai adanya isu pemakzulan Jokowi?

I3 : sadar banget la ya, apalagi isu ini tuh muncul dimana-mana. Entah berita di TV, atau sosial media manapun, beritanya pemakzulan Jokowi pas lagi anget-angetnya kemarin.

P : Apakah anda mengikuti pemberitaan terkait isu ini?

I3 : Sebenarnya kalau dibilang mengikuti tidak terlalu ya, cuman karena berita ini muncul dimana-mana. Lewat di instagram, lewat di Twitter jadinya mau engga mau ya baca judulnyalah, baca beritanya. Apalagi di Tiktok, cuplikan-cuplikannya.

P : Apa yang menjadi kesimpulan anda mengenai latar belakang munculnya isu ini?

I3 : Ya karna emang nggak suka aja ga si ama pak Jokowi kayaknya. Maksudnya yang teriak-teriak pemakzulan itu kebanyakan dari kubu yang kalah gitu loh. Jadi kayak merasa ini tuh ya karena bassicnya ga suka aja ama pak Jokowi. Bukan karena pak Jokowi bermasalah. Toh uda tahun terakhir menjabat, sudah sebentar lagi pensiun malah diribut-ributin. Kalau emang pak Jokowi nya yang bermasalah kenapa ga sedari dia baru menjabat disuruh berhenti. Kenapa baru sekarang?

P : Mungkin nggak pemakzulan ini terjadi?

I3 : Kayaknya kalau dari rapat kemarin tuh, engga terbukti ada faktor pemakzulan buat pak Jokowi.

P : Apa pandangan anda mengenai isu tersebut?

I3 : Duh damai-damai aja nggasih. Maksudnya tuh pak Jokowi ini tuh uda mau selesai. Ngapain diributin lagi, biarlah beliau menjabat sampai

selesai. Kecuali dia masih menjabat setahun dua tahun lagi, barulah terserah mau diributin.

P : Artinya anda memposisikan diri dalam menerima isu ini tidak setuju ya?

I3 : Bener sekali.

P : Lalu bagaimana sikap anda sebagai orang yang kontra pemakzulan Jokowi dalam menyikapi isu ini?

I3 : Saya cuman mengamati saja sih mengenai perkembangannya. Apalagi saya tidak terlalu pandai dalam hal politik. Baru mengikuti baru-baru pas Pilpres yang ini. Kadang memang mendiskusikan dengan teman, tapi lebih ke arah mengungkapkan pendapat saja. Tidak berdiskusi seserius itu.

P : Apa yang anda ketahui mengenai media Tempo?

I3 : Saya berpendangan bahwa Tempo merupakan media berita yang cukup idealis dan keberpihakan. Kadang beritanya jadi tidak netral, dia berpihak ke pihak-pihak yang sekiranya menguntungkan dia.

P : Anda tahu nggak kalau Tempo ini merupakan media yang sering mengkritik pemerintah?

I3 : Tahu sih. Kalau misal ada permasalahan-permasalahan yang paling muncul pertama itu pasti Tempo.

P : Setuju nggak dengan cara Tempo yang suka kritik ini?

I3 : Antara setuju dan nggak setuju sih. 50-50. Setujunya karena ya memang pasti diperlukan media yang bisa mengkritik pemerintah. Cuman nggak setuju karena caranya Tempo itu kadang narasinya tidak netral gituloh. Kayak maksudnya kalau mau mengkritik itu kalau media yang netral kalau dia mau mengkritik, isunya tuh harus yang benar terjadi gitu. Tapi Tempo ini kadang isunya itu belum benar belum ada faktanya tapi mereka sudah memberitakan ini sehingga menjadi fakta dan jelek gitu. Kadang apa yang disebut Tempo terbalik gitu dari apa yang ada di lapangan. Sama kaya kasus perumahan murah yang dari Jokowi, katanya terbengkalai ternyata banyak yang speak up warga disitu kalau itu ga bener. Dan justru komplek perumahannya ramai.

- P : Kesimpulan anda bagaimana kredibilitas dan objektivitas Tempo sebagai media berita?
- I3 : Kurang sih. Cuma karena medianya udah terlanjur besar dari dulu udah ada jadinya orang-orang nggak mikir ke situ. Mereka langsung percaya aja apa yang dikasih Tempo. Orang yang paham pasti akan coba bandingin ke media berita lain. Nggak cuma baca Tempo aja.
- P : Dalam memberitakan isu mengenai Pemakzulan ini gimana? Tempo kredibel dan objektif nggak?
- I3 : Judulnya Click bait sih. Kayak memancing emosi orang. Judul-judulnya dia tuh dan narasinya pokoknya kayak memancing emosi. Orang kalau yang gampang kesulut baca Tempo pasti akan makin benci sama pemerintah. Dan saya rasa kurang berimbang ya, kayak mihak ke arah yang pro pemakzulan.
- P : Terkait pro dan kontra yang ada mengenai isu ini, menurut anda penting nggak untuk diberitakan?
- I3 : Kalau ngelihat kemarin ya, kalau dari aku pribadi ngerasa jatuhnya gerakan-gerakan isu ini apalagi demo itu jatuhnya sudah banyak yang anarkis. Dari pemberitaan yang ada aku lihat enggak pentinglah untuk diberitakan. Tapi ya mungkin terkait pendapat pro dan kontra nya bisalah untuk diberitakan.
- P : Apa pendapat anda mengenai pernyataan pihak kontra yang menganggap isu ini merupakan inkonstitusional dan suatu tindakan yang mengacaukan pemilu?
- I3 : Saya setuju. Karena yang protes itu ya kubu yang kalah. Apalagi isu ini semakin naik setelah inikan minta Pemilu ulang. Setelah itu minta pemakzulan. Kayak ngapain gitu loh.
- P : Bagaimana dengan pendapat pihak yang pro pemakzulan yang menyuarakan wacana ini dengan alasan adanya kemunduran demokrasi di pemerintahan Jokowi? Apakah anda setuju?
- I3 : Kalau saya sendiri sih sampai sekarang masih belum menemukan alasan mereka memakzulkan yang masuk di akal. Karena dari tuduhan-tuduhan

dan apa yang mereka ajukan itu semua tidak terbukti. Sampai kemarin uda manggil bu Risma terus siapa lagi, menteri-mentri pak Jokowi, bu Sri Mulyani juga, staf pak Jokowi ternyata kan nggak terbukti. Jadi untuk menanggapi hal ini saya sih kek “kenapa?” gitu loh. Jatuhnya kayak cari sensasi aja.

P : Berarti anda tidak setuju terhadap ungkapan bahwa adanya kemunduran Demokrasi di pemerintahan Jokowi?

I3 : Saya tidak setuju sih. Apalagi di pemerintahan Jokowi ini bisa kita lihat orang-orang bebas berpendapat, bahkan menghina presiden juga engga kena pidana atau apa. Jatuhnya sudah seperti Liberal. Kurang demokrasi apalagi kalau sudah seperti itu.

P : Mungkin nggak pemakzulan ini terjadi? Seperti yang diberitakan melalui pengajuan Hak Angket?

I3 : Kayaknya kalau dari rapat kemarin tuh, engga terbukti ada faktor pemakzulan buat pak Jokowi. Jadi ya enggaklah ya.

Identitas Informan

Nama : Heru (Informan 4)

Usia : 27 Tahun

Asal Daerah : Cilegon

Latar Belakang : bekerja sebagai Supervisor Mechanical Static di Cilegon.

Tanggal wawancara : 19 Juli 2024

P : Apakah anda menyadari munculnya isu Pemakzulan Presiden Jokowi?

I4 : Lumayan menyadari. Saya banyak melihat di sosial media terutama instagram mengenai pergolakan isu ini.

P : Mengikuti pemberitaannya nggak?

I4 : Sedang-sedang ajasih. Kadang kalau lihat di sosial media pasti ada link sumbernya. Karna penasaran pasti saya coba baca link beritanya.

P : Anda tertarik nggak mengikuti isu ini?

I4 : Enggak terlalu sih dikarenakan nggak begitu relate dengan kehidupan sehari-hari. Saya sebagai buruh ya tertarik dengan berita mengenai kesejahteraan buruh, kenaikan gaji kah, kebijakan-kebijakan bonus, ya yang seperti itulah pokoknya. Mungkin ini juga karena saya membela 02, bukan karena Gibran ya. Dari awal saya sudah menyukai pak Prabowo, udah mikir milih beliau. Jadi dengan saya yang memihak mereka ketika ada isu ini mikir kalau isu ini tuh nggak penting gitu. Cuman buat keributan aja dari lawan paslon 02.

P : Menurut anda apasih yang menjadi latar belakang munculnya isu pemakzulan Jokowi ini?

I4 : Asumsi saya mengenai isu ini adalah bahwa isu ini dilatar belakang oleh adanya dugaan politik dinasti di keluarga Jokowi. Juga mengenai kontroversi umur pak Gibran yang mencalon masih terlalu muda untuk maju, tapi akhirnya ada perubahan UU yang menguntungkan beliau buat maju, akhirnya karena banyak yang kecewa muncullah wacana mau memakzulkan presiden Jokowi ini. Terutama dari pihak lawan politik 02, pasti tidak terima dengan munculnya Gibran sebagai Cawapres.

- P : Apasih pandangan anda akhirnya terhadap isu ini?
- I4 : Kalau pandanganku sih, isu ini hanya untuk menjelekkkan paslon 02. Pak Jokowi tidak menggunakan fasilitas negarakan untuk mengkampanyekan atau mendukung 02. Orang hanya mengasumsikan saja kalau ada privilege Jokowi dalam keuntungan 02 ini. Tapi ya karena ini politik, ada yang suka dan tidak suka jadinya ricuh. Padahalkan presiden sebenarnya pun ada hak memilih dan menyuarakan dukungannya asal tidak menggunakan fasilitas negara. Ada undang-undangnya. Intinya isu ini untuk menurunkan kredibilitas paslon 02 agar tidak ada yang memilih.
- P : Bagaimana anda memposisikan diri dalam menerima isu ini? Apakah anda pro atau kontra?
- I4 : Kalau saya sih pastinya kontra ya, satu sisi karena saya mendukung paslon 02. Tapi bukan semata-mata karena fanatik 02 saya jadi menolak isu ini, bukan begitu. Karena memang menurutku pak Jokowi masih dalam batasannya. Misal isu dia bagi-bagi banson yang dugaan untuk mendukung pihak 02, ternyata itu hoaks. Nggak bener. Ternyata itu kegiatan lama di up lagi buat gaduh, menggiring opini publik. Kita pasti riset apapun isu-isu itu, apa itu bener, kenapa bisa begitu segala macam.
- P : Bagaimana anda sebagai orang yang kontra menyikapi isu ini?
- I4 : Ya sedikit-sedikit mengamati lah. Karena nggak bisa dipungkiri isu ini kemarin lumayan hybe-hybe nya. Jadi mau nggak mau jadi lumayan penasaranlah. Aku juga orangnya ya baca juga dan riset juga.
- P : Apa yang anda ketahui mengenai Tempo?
- I4 : Saya tahu bahwa Tempo merupakan media berita yang lumayan besar ya, apalagi dari dulu majalah Tempo ya yang terkenal banget.
- P : Tahu nggak kalau Tempo itu lumayan merupakan media yang kritis?
- I4 : Sedikit tahu sih.
- P : Apakah anda setuju dengan media yang seperti itu?
- I4 : Menurut saya nggak masalah asal dia punya data dalam melakukan kritik ke pemerintah. Asal ada batasan gitu, berdasarkan riset dan terbukti. Nggak masalah lah.

- P : Tempo dalam pemberitaannya gimana menurut anda? Apakah kredibel dan objektif?
- I4 : Saya kurang tahu media berita ya, cuman karena isu ini beritanya dan informasinya datang dari mana-mana saya melihat itu sama dengan pemberitaan Tempo. Jadi sepertinya cukup kredibellah. Tapi kalau dibilang objektif, saya melihat mungkin media ini agak pedas aja kalau memberitakan suatu isu, kayak berita yang Luhut bilang kalau isu ini keributan politik yang tak perlu, aku kebetulan pernah lihat videonya di sosial media, disitu sorotannya Luhut itu sedih adanya isu ini. Mungkin disitu yang agak berlebihannya ya, kayak kurang objektif. Tapi nggak tahulah, mungkin ini perasaan saya aja karena saya sekali lagi, memihak 02. Gitu.
- P : Artinya media ini kurang berimbangkah dalam menyampaikan pro-kontra gitu?
- I4 : Ya sepertinya begitu ya. Kaya tuntutan-tuntutan pemakzulan, Tempo uraikan dengan jelas. Tapi mengenai kurang baiknya ada isu ini seperti kurang disorot. Mereka beritakan tanggapan pihak yang kontra saja, seperti komentar negatifnya tapi mengenai isu ini yang misal bisa membahayakan negara nggak terlalu dibahas. Ya mungkin ada dibahas, tapi nggak sebanyak berita yang tentang pro pemakzulan lah intinya.
- P : Menurut anda penting nggak isu ini untuk diberitakan?
- I4 : Kalau menurutku untuk pendukung paslon selain 02 mungkin penting. Ya bisa diserang juga karena ada beberapa poin yang dianggap dilanggar oleh 02 ini. Tapi bagi saya pribadi enggak sih.
- P : Nah setelah membaca berita Tempo terkait pemakzulan presiden, pesan yang ingin disampaikan itukan bahwa pihak pro menganggap ada kemunduran demokrasi yang terjadi di Pemerintahan Jokowi. Menurut anda gimana?
- I4 : Engga setuju sih. Mungkin yang dibahas dalam hal inikan kemunduran karena ada statement dari Jokowi bahwa presiden bisa memilih kan, sementara bisa dilihat lagi apakah presiden melakukan kampanye sebagai

warga atau presiden yang mungkin bisa disalahkan. Tapi aku melihat sih engga ada ya pak Jokowi terang-terangan melakukan kampanye. Entah ada di ruangan tertutup ya nggak tahu. Kan masih asumsi publik aja kalau Jokowi memihak 02, karena kedekatannya sama Prabowo dan karna Gibran itu anaknya. Tapi kan dia tidak pernah blak-blakan bilang akan memilih 02. Adanya pernah dia berpose 2 jari, terus langsung disorot media di cocokologikan gitu. Hanya asumsi aja. Belum terbukti benar.

P : Apakah anda setuju mengenai pihak kontra yang menganggap isu ini inkonstitusional dan merupakan keributan politik yang tak perlu?

I4 : Iya inkonstitusional karena kemarin mereka langsung ke Mahfud kan, padahal harusnya melalui DPR lalu mengajukan ke MK. Saya setuju juga ini merupakan memancing keributan. Kecuali memang ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada jaringan yang mendukung kemenangan paslon 02, disediakan oleh presiden langsung gitu. Misal penyuaapan duit atau apa untuk mengajak pemilihan salah satu paslon.

P : Ketika isu ini naik-naiknya dibarengi oleh demo-demo mahasiswa, menurut anda mungkin nggak pemakzulan Jokowi ini terjadi? Misal melalui Hak Angket?

I4 : Menurutku sih belum ada hal yang fatal yang sampe bisa membuat pak Jokowi dimakzulkan, tapi mungkin dimakzulkan ya mungkin-mungkin aja. Bisa-bisa aja karena inikan suara rakyat. Kalau semisal rakyat serentak ingin pak Jokowi dimakzulkan ya sah-sah saja. Kekuasaan itu adalah rakyat kan. Nah disitu yang bekerja tentu MK, untuk mengurus atau prosesnya. Walaupun balik lagi MK yang memutuskan masalah batasan umur dan lainnya, ya mereka tetap berhak untuk memilih mengenai ketentuan calon presiden dan wakil presiden. Meskipun mungkin itu tidak fair bagi beberapa pihak.

Identitas Informan

Nama : Budi (Informan 5)

Usia : 23 Tahun

Asal Daerah : Sipahutar, Tapanuli Utara

Latar Belakang : Mahasiswa Hukum. Selama kuliah aktif dalam organisasi, BEM Fakultas Hukum, Asosiasi Muda Mudi Batak, dan panitia Pencegahan Kekerasan Seksual BEM Fakultas Hukum. Sebagai Advokasi BEM, aktif dalam mengikuti forum kemahasiswaan untuk demonstrasi. Misalnya pada saat demonstrasi UU Cipta Kerja, isu kelangkaan minyak, dan demonstrasi penyelesaian agraria mengenai pertanahan.

Tanggal wawancara : 28 Juli 2024

P : Apakah anda menyadari mengenai adanya isu Pemakzulan Presiden Jokowi?

I5 : Ya sangat menyadari hal tersebut dan lumayan mengikuti.

P : Menurut anda apa yang menjadi latar belakang dari munculnya isu ini?

I5 : Menurut saya latar belakangnya itu yang pertama banyaknya informasi mengenai langkah-langkah ataupun kebijakan pemerintah terutama presiden dalam memberikan pelayanan publik atau mencapai suatu program. Misalnya soal bantuan sosial dan juga informasi-informasi mengenai perencanaan pemindahan ibu kota yang melibatkan dana yang begitu besar, utang negara dan juga penurunan indeks demokrasi.

P : apakah anda setuju mengenai tuduhan-tuduhan terkait kemunduran-kemunduran tersebut?

I5 : Kemunduran-kemunduran itu ada dan saya setuju. Saya merasa hal tersebut dapat menjadi dasar orang-orang untuk tau dan setuju pemakzulan. Tapi disisi lain saya menyadari banyaknya kemajuan yang diberikan oleh pemerintah saat ini.

P : Kemudian bagaimana anda melihat isu ini? Apa pandangan anda?

- I5 : Menurut saya isu ini merupakan isu yang harus dikawal bersama. Tetapi jangan sembarangan kita bisa memanggil presiden melalui hak angket itu karena disisi lain harus ada identifikasi khusus. Bukan hanya karena keberpihakan dalam politik maka hal itu dapat dilakukan oleh DPR. Tetapi lebih ke apakah memang sudah melanggar konstitusi terutama dalam hal berkaitan dengan nepotisme, jika itu menjadi dasar dari DPR ataupun yang mengajukannya maka hal ini harus dikawal dan dijelaskan lebih lanjut. Tidak boleh asal-asalan.
- P : Artinya dalam hal isu Pemakzulan ini anda pro ya?
- I5 : Ya, saya pro pemakzulan.
- P : Sebagai seorang yang pro terhadap isu ini bagaimana anda dalam menyikapinya?
- I5 : Sikap saya adalah mencari tahu lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang diusulkan oleh orang-orang terkait terutama yang ada di dalam DPR. Karena kita tahu bahwa isunya itu berasal dari seorang calon presiden. Calon presiden itu mengusulkan hak angket dimana partai politik calon presiden itu diusung oleh partai terbesar yang dulunya itu adalah koalisi dari presiden. Dimana kerenggangan terjadi secara politik. Ketika calon presiden itu mengajukan kita harus lihat, apakah ada faktor-faktor keberpihakan kepentingan oleh calon yang mengusulkan tersebut sehingga usulan ini beredar di DPR, atau menjadi untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai kepentingan masyarakat itu dibawa-bawa secara “headline”. Tidak benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Untuk menjatuhkan lawan politik dengan membawa atas nama “masyarakat”.
- P : Apakah anda aktif dalam mendiskusikan isu ini dengan rekan atau mungkin ada forum mahasiswa tertentu?
- I5 : Kami pernah menganalisis soal pemakzulan presiden Jokowi. Dalam hal ini kami membahasnya tidak secara spesifik. Namun diskusi anggota-anggota organisasi mahasiswa.
- P : Mengenai media Tempo nih, apasih yang anda ketahui mengenai Tempo?
- I5 : Tempo adalah media yang memberikan berita terkini sebagai pers.

- P : Apakah anda tahu bahwa Tempo ini kritis terhadap pemerintah? Setuju nggak?
- I5 : Saya tahu. Kadang-kadang saya setuju kadang-kadang tidak. Misalnya dalam berita program IKN. Mereka sangat kritis dalam hal tersebut. Di sisi lain menurut saya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti ketidaklayakan Jakarta lagi sebagai Ibu Kota. Tempo ini hanya menyajikan sisi yang menolak atau faktor menolak IKN. Tapi sisi baiknya enggak. Kalau misal masalah Pemakzulan saya setuju kekritisannya karena ada faktor-faktor seperti kecurangan pemilu dan juga faktor-faktor lainnya.
- P : Menurut anda secara keseluruhan bagaimana kredibilitas dan objektivitas Tempo?
- I5 : Kredibilitasnya terjaga selagi mereka dilindungi oleh UU Pers dan juga memiliki hak tolak, hak jawab, dan juga hak koreksi dalam UU Pers itu satu dasar bahwa Pers itu bisa saja menghadirkan dua perspektif yang berbeda-beda dalam masyarakat., seperti yang saya katakan tadi kadang saya setuju kadang saya tidak. Tapi di sisi lain mereka juga bisa menjawab ketika ada orang yang tidak setuju pada beritanya, mereka bisa memberikan hak koreksi ataupun hak jawab ataupun hak tolak tergantung perspektif apa yang dibangun.
- P : Apakah menurut anda dalam merepresentasikan pihak pro dan kontra dalam isu Pemakzulan Presiden Jokowi, Tempo sudah berimbang? Atau cenderung ke salah satu sisi?
- I5 : Kalau saya melihat beritanya Tempo cenderung kepada pelaksanaan Hak Angket itu harus dilakukan. Kalau saya melihat kepada kontranya saya tidak melihat Tempo memberikan informasi mengenai yang cukup mengenai kontra Pemakzulan. Jadi cenderung ke satu sisi aja, yaitu yang pro pemakzulan.
- P : Menurut anda penting nggak isu ini untuk diberitakan?
- I5 : Penting sekali agar masyarakat bisa tetap mengawal isu ini dan mendapatkan informasi terkait isu ini.

- P : Pihak kontra menganggap isu ini inskonstitusional dan mengancam keberlangsungan Pemilu. Menurut anda bagaimana?
- I5 : Menurut saya pihak yang kontra itu mungkin perlu mencari informasi lebih lanjut bahwa Hak angket itu konstitusional. Jika hak itu dilakukan maka harus sesuai prosedur yang ada. Jika dilihat dari konstitusional maka kita jangan berharap itu sebagai people power. Jika people power yang diberlakukan, itu baru inskonstitusional. Harus diketahui dan mencari informasi lebih lanjut inkonstitusiol itu seperti apa. Hak angket itu sudah sesuai konstitusi. Jadi saya tidak setuju bahwa isu ini tidak diperlukan.
- P : Lalu apa tanggapan anda terhadap banyaknya demo mahasiswa menuntut pemakzulan bahkan sampai turunnya civitas akademik dalam hal ini?
- I5 : Sekali lagi saya tekankan kepada faktor-faktor yang membarengi kemarahan mahasiswa dan juga pakar-pakar tata negara dan juga dosen-dosen atau guru-guru besar di tiap universitas yang mengemukakan pendapat. Menurut saya isu ini menjadi perhatian serius dimana para cendikiawan dan juga para orang-orang terpelajar telah mendalami isu ini sehingga mereka mengemukakan pendapat sampai bahkan menyampaikan suatu tuntutan. Terutama analisa yang dilakukan oleh ada tiga pakar hukum tata negara, sepengetahuan saya mungkin bisa dilihat lebih lanjut lagi, dari Universitas Andalas, Universitas Gajah Mada dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta. Mereka menganalisa setiap faktor-faktor yang terkait dari Bansos kemudian dari kecurangan Pemilu, dari nepotisme dan juga hal lainnya mengenai demokrasi. Faktor-faktor tersebutlah yang kemudian membuat para guru besar yang tadi sampai memberikan tuntutan dan memancing kemarahan di Indonesia.
- P : Akan tetapi ada banyak yang menganggap kalau isu ini tuh karena adanya yang tidak terima kalah Pemilu. Menurut anda gimana?
- I5 : Menurut saya hal itu sah-sah saja untuk sebagai pendapat. Tapi sekali lagi saya hanya berpatokan pada apa yang saya ketahui. Sayang saya ketahui dari media-media yang kredibel seperti Tempo, bisa dicek kalau ada penurunan indeks demokrasi di Indonesia dan juga kecurangan Pemilu.

Hal ini bahkan bisa mengancam bagaimana cara berdemokrasi di Indonesia. Kalau misalnya kita setuju saja untuk mengatakan bahwa isu itu hanya untuk kepentingan politik belaka, kenyataannya ada data yang menunjukkan demokrasi Indonesia menurun. Sekali lagi faktor-faktor yang terkait dengan isu ini itu penting untuk dibahas sebelum kita mengemukakan pendapat dari suatu headline ataupun berita.

P : Menurut anda mungkin nggak terjadi pemakzulan Jokowi seperti yang diwacanakan orang-orang?

I5 : Mungkin saja kalau hak angket dari DPR itu diberlakukan dan prosesnya sesuai dengan UU dan konstitusi yang berlaku.

P : Oh iya mengenai hak angket apasih hubungannya dengan pemakzulan Jokowi kalau boleh tahu?

I5 : Hak angket itu hubungannya ialah sebagai kewajiban DPR. Dimana DPR memiliki fungsi pengawasan. Salah satu pengawasan yang dilakukan adalah Hak Angket. Nah ketika hak angket ini diberlakukan ini akan menjadi suatu dasar dimana DPR sebagai legislasi dan pemerintah sebagai eksekutif itu akan melakukan yang namanya identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada. Apakah berasal dari presiden melalui kebijakan-kebijakan yang kontroversial, melanggar UU dengan nepotisme, maka hal itu bisa menjadi acuan hak angket.

Identitas Informan

Nama : Juni (Informan 6)

Usia : 22 Tahun

Asal Daerah : Medan

Latar Belakang : Mahasiswa hukum di Jawa Timur yang memiliki minat berkecimpung di dunia politik.

Tanggal wawancara : 29 Juli 2024

P : Apakah anda menyadari mengenai isu pemakzulan presiden Jokowi? Kalau iya menurut anda apa latar belakang munculnya isu tersebut?

I6 : Ya saya menyadari akan munculnya isu tersebut. Beberapa bulan lalu ya. Latar belakang munculnya isu ini sudah pasti sesuai dengan pemakzulan itu sendiri, kenapa ada, ya karena ada ketidakpercayaan legislatif atau parlemen sama presiden. Begitu pula ketidakpercayaan warga negara Indonesia dengan presiden sekarang.

P : apakah anda mengikuti pemberitaan ini?

I6 : saya lumayan mengikuti isu ini melalui sosial media.

P : Terus apasih pandangan anda mengenai isu ini?

I6 : Pandangan saya diawal, saya sangat tertarik sih sebenarnya cuman saya nggak teralalu nyari. Kenapa saya tertarik karena isu pemakzulan di indoensia itukan jarang diangkat ya. Jadi mungkin begitu ada yang menggaungkan isunya saya jadi kayak “ada apa nih?”

P : Bagaimana anda memposisikan diri dalam menerima isu ini? Apakah anda pro atau kontra?

I6 : Terkait isu ini saya kontra sih, karena syarat-syarat untuk pemakzulan nya sendiri itu belum lengkap.

P : Bagaimana sikap anda terhadap isu ini?

I6 : Terkait isu ini saya sering mendiskusikannya sih dengan teman-teman saya. Tapi ya ujungnya cuman jadi debat kusir aja. Nggak ada penyelesaiannya.

- P : Baik kita ke kategori selanjutnya mengenai berita Tempo. Apa yang anda ketahui mengenai Tempo?
- I6 : Tempo itu platform media berita yang cukup besar bahkan lumayan banyak bersileweran di sosial media.
- P : Apakah anda tahu kalau Tempo itu suka kritik sama pemerintah? Setuju nggak?
- I6 : Kurang tahu sih mengenai sikap kritisnya, tapi aku setuju sih dengan adanya media berita yang suka kritik.
- P : Setelah membaca berita Tempo tentang pemakzulan Jokowi, bagaimana pendapat anda? Apakah media ini cukup kredibel dan berimbang?
- I6 : Saya rasa kredibel sih. Saya juga merasa cukup berimbang karena ada berita pro dan kontra nya.
- P :Sebenarnya penting nggak isu-isu seperti ini diberitakan oleh media?
- I6 : Penting dong. Kayak untuk masyarakat Indoensia kan sumber atau source kita untuk mendapatkan suatu informasi itu ya dari platform berita-berita.
- P : Kan dari yang kita lihat dari pihak yang kontra merasa kalau isu ini tuh inkonstitusional, mengancam keberlangsungan Pemilu sama keributan politik yang nggak perlulah, apa pandangan anda terhadap pernyataan tersebut?
- I6 : kalau menurut saya isu ini tuh bener inskonstitusional makanya isunya nggak berlanjut toh. Terus kalau misalnya isu ini akan menghambat pemilu sih enggak ya. Itu paling kayak cuman cocokologi orang-orang yang mengaitkan presiden yang menjabat sekarang sama calon wakil presiden yang akan datang, gitu sih. Kalau dibilang isu ini nggak penting, saya kurang setuju. Selama isu ini terjadi di pemerintahan saya rasa nggak ada isu yang nggak penting. Tergantung cara kita menyikapi isunya aja kadang. Seenggak penting-pentingnya isunya selama itu menyangkut pemerintah dan pemerintah itukan yang mengatur dan menjalankan negara inikan, jadi tetap penting-penting ajasih adanya isu.
- P : Apakah anda setuju mengenai tuduhan bahwa banyak kemunduran di pemerintahan Jokowi sehingga wacana pemakzulan ini perlu dilakukan?

- I6 : Kemunduran secara significant sih nggak ada ya. Kalau dibilang di pemerintahan Jokowi itu nepotisme banyak, korupsi banyak dan semacamnya, di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga terjadi hal yang demikian kok. Terus mungkin menurut saya sendiri kenapa keliatannya di pemerintahan ini yang banyak, karena internet dan kecepatan seseorang menerima informasi itu. Sekarang jadi gampang viral begitu.
- P : Bagaimana dengan dugaan presiden mengintervensi Pemilu? Apakah anda setuju?
- I6 : Terkait dugaan itu saya mungkin ditengah-tengah ya. Kalau dibilang presiden mengintervensi secara langsung, saya tidak setuju. Karena presiden nggak ada andil apa-apa. Tapi kalau misal dibelakangnya, mungkin. Menurut saya.
- P : Menurut anda mungkin nggak sih seorang presiden Jokowi dimakzulkan?
- I6 : kalau saya pribadi, sesuai dengan peraturan pemakzulan itu sendiri, kayaknya belum memungkinkan. Karena pemakzulan itu kan ada beberapa tahap yang harus dilalui ya. Terus ada beberapa hal yang harus dilanggar dulu oleh presiden menjabat untuk dimakzulkan. Dan kayaknya presiden Jokowi sendiri belum ada melanggar hal-hal tersebut. Belum memenuhi faktor untuk dimakzulkan.
- P : Berarti anda nggak setuju ya kalau Hak Angket yang lalu bisa memakzulkan Presiden.
- I6 : Betul. Buktinya sampe sekarangpun yang kemarin itu nggak jelas kan hasilnya apa. Kayak selesai gitu aja.

Identitas Informan

Nama : Sondang (Informan 7)

Usia : 24 Tahun

Asal daerah : Yogyakarta

Latar Belakang : Merupakan seorang freshgraduated lulusan Universitas di Yogyakarta.

Tanggal wawancara : 30 Juli 2024

P : Apakah anda menyadari mengenai adanya isu Pemakzulan Presiden Jokowi?

I7 : Saya cukup menyadari dan lumayan mengikuti ya, karena lumayan viral isunya.

P : Tertarik nggak mengikuti isu ini?

I7 : tidak terlalu sih, karena saya tidak begitu menyukai politik. Tapi karena ini menyangkut pak Jokowi, yang mana saya menyukai beliau, saya jadi lumayan mengikuti isu ini.

P : Menurut anda apa yang menjadi latar belakang isu ini?

I7 : Menurut saya inih dikarenakan adanya pergolakan politik di Pemilu. Ada perbedaan pilihan di Pemilu. Ada yang sakit hati begitu. Masyarakat tidak terima Gibran mencalonkan juga melihat kedekatan pak Jokowi dengan salah satu paslon.

P : Lalu apa pandangan anda terhadap isu ini?

I7 : Saya pribadi nggak suka sih ada isu ini. Kenapa ditengah-tengah Pemilu ini ada muncul isu seperti itu. Apalagi kita tahu kan menurut survei 70% masyarakat Indonesia menyukai Jokowi, puas sama Jokowi. Jadi kenapa harus protes ini atau itu? Apakah isu ini karena Jokowi atau cuman mau jatuhin paslon 02 aja? Kayak apa hubungannya Jokowi sama paslon 02 gitu.

P : Artinya mba kontra terhadap pemakzulan ini ya?

I7 : Benar saya kontra.

P : Lalu sebagai orang yang kontra, bagaimana anda menyikapi isu ini?

- I7 : Saya cukup mengamati saja sih mengenai perkembangan isunya. Kadang juga mendiskusikannya dengan temen. Gitu aja sih.
- P : Apa yang anda ketahui mengenai Tempo?
- I7 : Saya tahu Tempo itu media berita yang cukup besar ya dan juga kontroversi. Sering memberikan ruang bagi opini publik atau tokoh-tokoh yang kecewa dengan pemerintah.
- P : Anda tahu mengenai Tempo yang suka kritik pemerintah? Setuju nggak?
- I7 : Cukup tahu ya, apalagi dari majalahnya. Kalau dibilang setuju sih enggak. Sebenarnya kalau memberitakan opini yang kritis pemerintah nggak papa tapi Tempo ini seperti membangun opini justru mengenai pemerintah. Ini kan bisa buat publik menilai pemerintah jelek. Orang jadi nggak percaya sama pemerintah. Jadi malas iku kebijakan pemerintah.
- P : Menurut anda sebagai media berita, Tempo ini kredibel nggak?
- I7 : Kredibel sih.
- P : Objektif?
- I7 : Mungkin kurang. Entah karena memposisikan diri sebagai kontra pemerintahan atau apa tapi jadinya buat media ini nggak objektif. Apa-apa dicari kekurangan sesuatu. Kayak pemerintah. Semisal dibahas prestasinya juga sih nggak papa. Tapi jarang sih dilakukan.
- P : Bagaimana Tempo dalam memberitakan isu Pemakzulan Jokowi menurut anda? Apakah sudah kredibel dan objektif?
- I7 : Kredibel berarti benarkan? Kayaknya kredibel sih. Tapi nggak objektif, karna kurang berimbang kayaknya ya. Saya rasa kok lebih banyak berita pro pemakzulannya gitu. Kayaknya dia medianya pro pemakzulan Jokowi gitu.
- P : Menurut mba kalau ada isu kayak gini penting nggak media berita memberitakannya?
- I7 : penting sih buat spread awareness gitu.
- P : Pihak kontra kan menganggap isu ini inkonstitusional, mengancam pemilu dan merupakan keributan politik yang tidak perlu. Mba setuju nggak dengan pernyataan tersebut?

- I7 : Setuju sih. Cuma buat mengacaukan aja.
- P : Mba setuju nggak kalau ada kemunduran demokrasi di Indonesia? Seperti tuduhan-tuduhan dari pihak yang pro terhadap isu ini?
- I7 : Enggak sih. Dengan adanya Pemilu dan ada demo-demo dari mahasiswa itu kan sudah contoh dari adanya demokrasi yang baik yah. Jadi enggak sih menurut saya. Nggak ada kemunduran.
- P : Menurut mba ketika maraknya demo mahasiswa terkait isu ini mungkin nggak terjadi pemakzulan Presiden Jokowi?
- I7 : Menurut saya nggak sih. Kan mayoritas masyarakat Indonesia, sebanyak 70% suka sama Jokowi. Puas dengan pelayanannya selama menjabat sebagai presiden. Jadi nggak mungkin sih. Saya tidak setuju dengan dugaan presiden Jokowi melakukan nepotisme. Karena dari dulu kan sanak-saudara pemerintah siapapun itu bebas sih kalau mau maju, atau mencalonkan diri.

Identitas Informan

Nama : Rena (Informan 8)

Usia : 23 Tahun

Asal Daerah : Pangururan, Sumut

Latar Belakang : merupakan mahasiswi akhir teknik kimia di Medan.

Tanggal wawancara : 31 Juli 2024

P : Apakah anda menyadari adanya isu pemakzulan Presiden Jokowi? Dan menurut anda apasih latar belakangnya?

I8 : Saya cukup menyadari adanya isu ini. Saya cukup mengikutinya di Sosmed. Di medan kemarin juga ada yang demo walaupun nggak terlalu banyak. Kalau ditanya latar belakangnya, menurut saya sih karena nggak sesuai ekspektasi orang banyak aja gitu loh. Kayak awalnya Jokowi bilang kalau dia tidak bakal terlalu berpihak tapi pada ujungnya dia jadi berpihak gitukan. Jadi banyak yang kecewa gitu. Apalagi dari partai yang usung dia dulu jadi presiden, terus malah merasa dikhianati la istilahnya. Mungkin jadi memancing amarah la dari partai yang dulu ngusung dia.

P : Gimana pandangan anda terhadap adanya isu ini?

I8 : menurutku sebenarnya ini itu suara masyarakat. Mungkin beberapa pihak yang sadar yang punya power gitu perlu mengawal isu ini. Supaya spread awareness gitu. Soalnya pasti isu ini bisa jadi bahan evaluasi lah supaya kedepannya di pemerintahan berikutnya nggak terjadi hal-hal kayak gini. Biar tahu kalau hal ini tuh salah. Jadi isu ini perlulah digaungkan.

P : Bagaimana anda memposisikan diri dalam menerima isu ini? Apakah anda pro atau kontra?

I8 : Aku sendiri nggak bisa membenarkan keputusan pak Jokowi akhir-akhir. Aku merasa beliau menggunakan kuasanya untuk kepentingan tertentu. Jadi aku pro la terhadap wacana pemakzulan itu.

P : Artinya anda bukan orang yang mau menoleransi penyalahgunaan kekuasaan yang ada ya?

- I8 : Iya tepat sekali. Meskipun periode beliau sebentar lagi, ya beliau tetap salah gitu loh. Tetap harus menerima konsekuensi dari kesalahan tersebut.
- P : Baik, kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait berita Tempo. Apasih yang anda tahu mengenai tempo?
- I8 : Saya tahu Tempo sebagai media berita sih. Yang kayaknya sering kritik pemerintah ya kalau nggak salah.
- P : Iya. Apakah anda setuju dengan sikap kritis Tempo tersebut?
- I8 : Saya setuju sih, karena saya lumayan tahu ya media berita itu kayak jurnalistik itu juga ada fungsila buat mengawasi pemerintah, buat menyuarakan suara publik kayak keluhan atau ketidakadilan yang ada. Asal itu merupakan kritik membangun saya cukup setuju sih. Buat peringatan ke pemerintah.
- P : Menurut anda dalam pemberitaannya Tempo ini kredibel dan objektif nggak?
- I8 : Saya rasa cukup kredibel dan objektif sih. Apalagi melihat media ini sebesar sekarang, pastilah karena media ini cukup dipercaya di Indonesia.
- P : Kalau dalam merepresentasikan berita pemakzulan Presiden ini gimana? Menurut anda sudah kredibel dan berimbang nggak?
- I8 : Saya lihat cukup kredibel sih. Dan saya rasa juga sudah berimbang ya, beritanya dari dua sisi kan. Pro dan kontra nya ada diberitakan. Nggak pake bahasa yang berlebihan juga.
- P : menurut anda isu Pemakzulan Presiden ini penting nggak untuk diberitakan?
- I8 : Penting banget sih. Karna kan buat mengangkat suara masyarakat kan isu ini berasal dari keresahan masyarakat gitu. Jadi dengan isu ini diberitakan berarti keluhan masyarakat udah disuarakan.
- P : setelah baca berita Tempo terkait pemakzulan, menurut pihak yang kontra kalau isu ini nggak sesuai UU, nggak perlulah. Menurut anda gimana?
- I8 : Aku menganggap isu ini perlu. Karna inikan suara masyarakat. Kayak yang tadi aku bilang kalau ini tuh buat peringatn kalau kesalahan itu harus ditetapkan kalau ini tuh salah gitu.

- P : Apakah anda setuju kalau dalam pemerintahan Jokowi ada kemunduran seperti yang didemo orang-orang?
- I8 : Menurutku iya dari pembentukan dan pemberlakuan UU yang tiba-tiba tanpa campur tangan masyarakat. Kayak tiba-tiba kita ya harus nerima doang. Disitu sih yang kemundurannya.
- P : Tapi apakah anda merasa bahwa seorang Presiden Jokowi bisa dimakzulkan? Seperti melalui rencana pengajuan Hak Angket kemarin misal?
- I8 : Menurutku sih nggak bakal bisa diturunkan, karna suara yang nuntut pemakzulan itu nggak sebanyak suara yang *meback up* presiden Jokowi. Jadinya menurutku jatuhnya demo kemarin itu cuman sementara aja karna panas-panasnya pemilu aja gitu.

Identitas Informan

Nama : Kevin (Informan 9)
 Usia : 30 Tahun
 Asal Daerah : Palembang
 Latar Belakang : merupakan pekerja bangunan.

P : Apakah anda tahu mengenai adanya isu pemakzulan terhadap presiden Jokowi?

I9 : iya saya lumayan mengikuti dari sosial media juga mengenai adanya isu ini. Kebetulan juga dulu saya kuliah skripsinya tentang kepresidenan ya, jadi isu ini lumayan membuat saya tertarik.

P : Menurut anda apakah yang menjadi latar belakang dari munculnya isu ini?

I9 : Setahu saya awalnya isu ini dari tahun 2023 ya kemunculannya, ada isu-isu mengenai kemungkinan anak Presiden naik mencalonkan jadi pasangan calon di Pemilu 2024. Saat itu ada prediksi bahwa akan dimajukan, makanya di buat wacana ini untuk anjang-angcal kalau terjadi demikian, ya pada intinya untuk menjatuhkan saingan politik yang kuat, seperti anak presiden. Apalagi melihat panasnya isu inikan pada saat mau pemilu. Mereka melihat bahwa dukungan suara terhadap Prabowo-Gibran sepertinya tinggi makanya mereka makin takut.

P : Gimana pandangan anda terhadap isu ini?

I9 : Kalau saya sih melihat isu ini tidak masuk akal dan tidak terbukti juga ya. Cuma karena Pemilu, dipanas-panasis gitu. Dari dulu memang isu terhadap Presiden Jokowi ini uda ada. Sering kali dia dituding dalam hal intervensi KPK ataupun program beliau yang dibilang memakan banyak anggaran. Ya itu dasarnya karena pro-kontra yang menurut saya wajar saja terjadi dalam pemerintahan seorang presiden dengan masyarakatnya yang berbeda-beda. Pada akhirnya isu ini ya hanya sekadar isu. Tidak pernah tuduhan tersebut terbukti. Hanya sampai pada asumsi saja.

P : Bagaimana anda memposisikan diri dalam menerima isu ini?

- I9 : Saya kontra ya. Saya merasa tidak setuju dengan isu ini, karena ya seperti yang saya ungkapkan tadi. Sejak dulu memang kerap kali ada isu-isu yang menyerang Jokowi seperti ini dan balik lagi tidak ada yang terbukti hingga sekarang.
- P : Baik, mungkin kita lanjut ke kategori selanjutnya ya mengenai Tempo. Apasih yang anda ketahui mengenai media Tempo?
- I9 : Media Tempo ya seperti yang diketahui, sejak dulu media yang lumayan terkenal dalam menyuarakan suara masyarakat. Saya juga lumayan tahu kalau media ini cukup kritis dalam jurnalisme investigasinya, terutama dalam terbitan majalah-majalahnya. Dulu saya mencoba cari tahu berita-berita tentang isu-isu Jokowi juga dari media ini, karena lebih banyak dari ini.
- P : Apakah anda setuju dengan kekritisannya media ini?
- I9 : Saya tidak ada masalah sih. Karena balik lagi media itu buatan orang. Bagusnya juga ada media yang menyuarakan masyarakat, supaya seimbang ya dan diperhatikan apa keresahan masyarakat.
- P : Kemarin baca berita Tempo mengenai pemakzulan? Bagaimana tanggapan anda melihat pemberitaannya? Apakah kritis atau seperti apa yang diberitakan media lain?
- I9 : Wah lumayan kritis sih. Kesimpulan saya juga memang tampaknya Tempo oposisi sekali ya terhadap pemerintah Jokowi. Memang media ini sangat menyoroti kekurangan-kekurangan Jokowi.
- P : Lalu bagaimana penerimaan anda? Apakah anda setuju?
- I9 : Kayak yang saya jelaskan sebelumnya ya. Media itu buatan manusia, buatan perusahaan, ya pasti punya apa ya istilahnya, semacam prinsip, visi misinya sendiri. Saya sendiri tidak setuju dengan pengadaaan pemakzulan Jokowi ya, agak kasar saya rasa kata-kata "pemakzulan" ini. Apalagi terhadap Presiden Jokowi yang selama 2 periode dinyatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap beliau lumayan ya. Mayoritas puas. Kalau tidak salah menurut survei kemarin. Akan tetapi kalau media Tempo memilih seperti itu ya silahkan. Nggak ada yang salah. Balik lagi ke kita

yang baca, mau coba cari fakta lain melalui media lain atau tidak. Saya sendiri juga bacanya Kompas, media yang lumayan netral saya rasa. Tapi tidak salah kalau baca Tempo, biar bisa lihat apasih yang dipermasalahkan gitu loh. Jadi pembandingan. Biar kita paham POV orang-orang yang kontra Jokowi itu seperti apa. Seperti hal pentingnya oposisi ya di pemerintahan yang demokratis, supaya nggak terjadi penyalangunaan kekuasaan, kadang kita tidak tahu sebenarnya pihak mana yang salah atau benar.

P : Baik. Nah dari berita Tempo kan ada pernyataan orang-orang yang kontra ditampilkan bahwa mereka memandang pemakzulan ini inkonstitusional dan keributanan politik yang tidak perlu. Anda setuju kah?

I9 : Setuju terhadap pandangan itu. Benar sekali bahwa pemakzulan ini memang tidak sesuai dengan konstitusi. Karena tidak melalui DPR ke MK ya, tapi kemarin malah ke Menkopolkam, pak Mahfud pada saat itu masih calon wakil Presiden. Mungkin mereka mau minta dukungan ke pak Mahfud yang notabenehnya lawan politik kubu pro pemerintah, supaya ada power mungkin mengajukan wacana ini. Tapi jatuhnya ya itu tidak sesuai konstitusi. Jadi menyalahi UU yang mengatur pemberhentian Presiden. Keributan politik juga iya ya, namanya juga mau menjatuhkan lawan.

P : Ada pernyataan yang mengatakan wacana ini diperlukan akibat kemunduran pemerintahan Jokowi nih, bagaimana pandangan anda?

I9 : Kemunduran apa ya, sepertinya tidak ada.

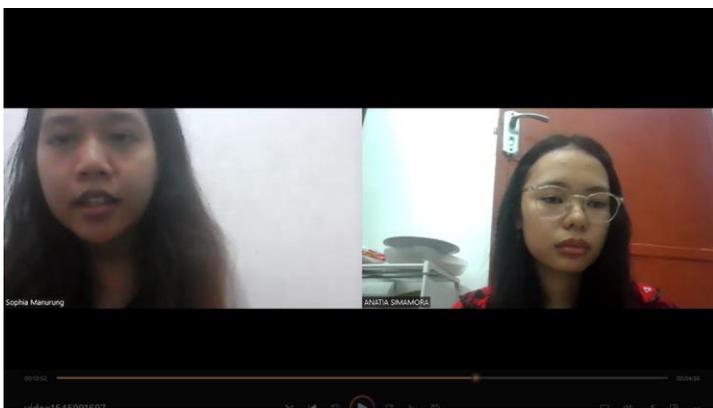
P : Misal tuduhan mengenai kemunduran demokrasi di pemerintahan beliau.

I9 : Ah menurut saya itu tuduhan tidak berdasar. Bisa kita lihat selama 2 periode kepemimpinan Jokowi, lalu bahwa ia periode beliau berhenti di Oktober, dia ya berhenti kan tidak mencoba untuk minta 3 periode atau menurunkan jabatannya langsung. Tetap dilaksanakan yang namanya Pemilu. Suara masyarakat tetap yang utama. Berarti demokrasi itu tetap berjalan dengan baik. Kemunduran-kemunduran itu pernyataan tidak terbukti menurut saya. Hanya penilaian pribadi. Rasa-rasa mereka. Datanya tidak ada yang buktikan.

- P : Mengenai kemungkinan pemakzulan dari hak angket itu bagaimana? Apakah anda merasa bahwa hal tersebut memungkinkan?
- I9 : Hak angket? Enggak sih. Pun akhirnya nggak jelas kan sidang kemarin. Panas-panas pemilu aja. Saya rasa memang sejak awal kemunculan isu ini ya nggak mungkin terjadi sih.

Lampiran 3
Dokumentasi Kegiatan





Lampiran 4

Kartu Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Tlp. (031) 8706369 (Hunting) Fax (031) 8706372 Surabaya 60294

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Anatia Simamora
NPM : 20043010202
JURUSAN : Ilmu Komunikasi
JUDUL SKRIPSI : Penerimaan Pembaca Terhadap Berita Pemakzulan Presiden Jokowi Pada Portal Berita *Online* Tempo.co
PEMBIMBING : Syifa Syarifah A., S.Sos., M.Commun

NO	TGL PEMBIMBINGAN	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING UTAMA
1.	13 Maret 2024	Pengajuan judul skripsi	✓
2.	27 Maret 2024	Diskusi topik dan pengarahan skripsi	✓
3.	14 Mei 2024	Pengajuan Bab 1-3	✓
4.	21 Mei 2024	Bimbingan Revisi Bab 1-3	✓
5.	28 Mei 2024	Bimbingan Revisi Bab 1-3	✓
6.	11 Juni 2024	Bimbingan Revisi Bab 1-3	✓
7.	15 Juli 2024	Bimbingan Revisi Proposal Skripsi Setelah Sidang	✓
8.	11 September	Bimbingan Bab 4 (Hasil penelitian)	✓
9.	13 September	Bimbingan Revisi Bab 4-5 (Penyajian dan pembahasan data temuan)	✓
10.	25 September	Bimbingan Revisi Bab 5	✓
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			

SURABAYA, 04 Oktober 2024

MENGETAHUI
KAPROGDI ILMU KOMUNIKASI


(Dr. Syafrida Nurrachmi S.Sos., M. Med.Kom.)
NIP. 198302232021212008

RIWAYAT HIDUP

Nama : Anatia Simamora
Tempat Tanggal Lahir : Pulo Bayu, 9 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Huta bayu, Kab. Simalungun
Alamat Email : anatiasims@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|---|-----------|
| 1. SDN 091538 Hutabayu Raja | 2008-2014 |
| 2. SMP Swasta Budi Mulia Pematangsiantar | 2014-2017 |
| 3. SMA Sw Budi Mulia Pematangsiantar | 2017-2020 |
| 4. S1 Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jatim | 2020-2024 |

Pengalaman Organisasi

- | | |
|---|-----------|
| 1. UPN Televisi, UPN “Veteran” Jawa Timur | 2022-2023 |
| 2. HIMA Ilmu Komunikasi | 2022-2023 |

Pengalaman Lain

- | | |
|---------------------------|------|
| 1. Kampus Mengajar (MBKM) | 2023 |
|---------------------------|------|